



Jurnal Forum Ilmu Sosial

Volume 43 Nomor 2 Desember 2016

ISSN 1412-971X

Ketua Penyunting
Maman Rachman

Wakil Ketua Penyunting
Eva Banowati

Sekretaris Penyunting
Edi Kurniawan

Bendahara
Setiajid

Penyunting Pelaksana

Cahyo Budi Utomo

Putri Agus Wijayati

Arif Purnomo

Juhadi

Sriyanto

At. Sugeng Priyanto

Puji Lestari

Thriwaty Aarsal

Ninuk Sholikhah Akhiroh

Penyunting Ahli

Tri Marhaeni Pudji Astuti

Mitra Bebestari

Warsono (Universitas Negeri Surabaya)

Udin S. Winataputra (Universitas Terbuka)

Wahyu (Universitas Lambung Mangkurat)

Sapriya (Universitas Pendidikan Indonesia)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Pelaksana Tata Usaha

Suharyati

Mariyam

Penerbit

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Alamat Penerbit

Gedung C7 Lantai 3 Kampus Sekaran

Gunungpati, Semarang 50229

Telp. (024) 8508006

Email : foris@mail.unnes.ac.id

Alamat E-Journal

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>

Daftar Isi

- | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111-126 | Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Wonosobo.
Moch Arifien dan Heri Cahyono |
| 127-134 | Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Werda di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
Afiyatur Rosidah, Lusiana Devika F.s dan Rifqi Firda S |
| 135-143 | Pengaruh Teknologi terhadap Perubahan Sikap Anak S (Sudah Mengenal Make-up, Pacaran, dapat Mengendarai Sepeda Motor) dan Motivasi Belajar.
Inka Eva Umulaili, Theola Zevana Putri, dan Umdatul Khoirot |
| 144-152 | Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sinergi Program Puap, Gapoktan, dan Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kabupaten Grobogan).
Eko Santoso dan Umi Erniasih |
| 153-160 | Model Implementasi Desa Argo-Ekowisata dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kecamatan Ampelgading).
Rohmatul Khasanah |
| 161-168 | Perubahan Sosial Masyarakat Desa Mulyoagung akibat Pembangunan Berwawasan Lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Annisa Dwi Apsari, Lely Viki Fatmala dan Tesalonika Taradebora |
| 169-175 | Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo.
Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono |
| 176-188 | Peranan Guru Dan Siswa pada Kegiatan Perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (SWALIBA).
Apik Budi Santoso, Wahyu Setyaningsih, dan Dhahrul Biqih |
| 189-203 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran IPS Materi Masalah Sosial Kelas IV Sekolah Dasar.
Qurun In Evri Lilasari, Muhari, dan Suhanadji |
| 204-210 | Pemberdayaan dan Tantangan Monetisasi Berbasis Potensi Lokal Desa Wisata Karangasem Bantul.
Ghifari Yuristiadhi |

Pembina : Moh Solehatul Mustofa Penanggungjawab : Prof. Wasino,
Pengarah : Apik Budi Santoso, Ngabiyanto.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 22 halaman, dengan format tercantum pada halaman kulit belakang ("Ketentuan Penulisan Artikel Forum Ilmu Sosial"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.



UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN TANANAM PANGAN DI KABUPATEN WONOSOBO

Moch Arifien dan Heri Cahyono

Jurusan Geografi-FIS UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

poverty, development planning, food crops

Abstrak

Komoditas tanaman pangan merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang tepat agar pembangunan yang berorientasi pada masalah kemiskinan dapat berhasil dengan baik. Perencanaan pada hakekatnya harus didasarkan pada masalah, kebutuhan dasar dan potensi wilayah agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah yang berkaitan pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan. Adanya perbedaan, baik secara fisik alamiah maupun buatan antar daerah dalam suatu wilayah menyebabkan adanya perbedaan dalam peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat perencanaan dalam upaya pengembangan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan demi peningkatan perekonomian daerah dengan cara melihat *performance* (kinerja) sektor pertanian, mengidentifikasi komoditas tanaman pangan yang potensial untuk dapat dikembangkan, menyusun hirarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi, dan menyusun perencanaan pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan. Dari hasil penelitian, ditentukan daerah yang akan menjadi sentra produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan adalah komoditas unggulan dan potensial yaitu tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif atau salah satunya. Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo adalah : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Komoditas tanaman pangan unggulan apabila dilakukan pemetaan akan terlihat bahwa telah terjadi pengelompokan wilayah secara cluster. Dari cluster komoditas tersebut akan diarahkan pengembangannya, yaitu pembangunan sentra produksi dan sentra pengolahan.

Abstract

Food crops is one asset that can be used to address the problem of poverty. For that we need proper planning for development-oriented poverty problem can be managed properly. Planning is essentially be based on issues, basic needs and potential of the region so that development undertaken appropriate and targeted so as to boost the regional economy development of the agricultural sector related food crops sub-sector. The big

difference, both physically natural or artificial between regions within a region causes the difference in opportunities to grow and develop. The main objective of this research is to make planning in the development of the agricultural sector in particular sub sectors of food crops in order to improve the regional economy by looking at the performance (performance) the agricultural sector; identifying food crops that are potential to be developed, draw up a hierarchy of centers of social services and economy, and planning the development of the agricultural sector of food crops sub sector. From the research, it was determined that the area will become a center for the production of rice, maize, cassava, sweet potatoes, beans, vegetables, and fruits. Food crops that can be developed in each sub-district is excellent commodities and the potential that crops have kompetitif and comparative advantages or one of them. Food crops that can be developed in each sub-district in Wonosobo regency are: rice, maize, cassava, sweet potatoes, beans, vegetables and fruits. Featured food crops when the mapping will be seen that there has been a regional grouping as a cluster. Of the commodity will be directed cluster development, namely the construction of production centers and processing centers.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- mocharifien@mail.unnes.ac.id
- heriridlo@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Propinsi Jawa Tengah (BPS, 2009). Dilihat dari nilai Product Demestic Regional Bruto (PDRB) per kapitanya Kabupaten Wonosobo juga termasuk daerah yang memiliki PDRB per kapita terendah. Untuk itu diperlukan suatu upaya meningkatkan perekonomian daerah agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kunci keberhasilan pembangunan adalah perencanaan yang tepat. Perencanaan pada hakekatnya harus didasarkan pada permasalahan kebutuhan dasar dan potensi wilayah agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Upaya pengembangan wilayah (*regional development*) secara terpadu melalui penyusunan rencana tata ruang harus diarahkan pada pemecahan masalah

utama di daerah tersebut, dalam hal tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Wonosobo terletak di daerah dataran tinggi dan merupakan wilayah yang memiliki basis sektor pertanian yang tumbuh dengan baik. Pemanfaatan sector unggulan untuk peningkatan perekonomian perekonomian daerah dapat dilakukan dengan membuat perencanaan yang berbasis potensi ekonomi lokal dan salah satunya adalah pertanian tanaman pangan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun perencanaan dalam upaya pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan demi peningkatan perekonomian daerah dengan cara melihat *performance* (kinerja) sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo, mengidentifikasi komoditas tanaman pangan yang potensial untuk dapat dikembangkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonosobo, menyusun hirarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di Kabupaten Wonosobo

dan menyusun perencanaan pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo yang kemudian digambarkan dalam sebuah peta perencanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu BPS Kabupaten Wonosobo, BAPPEDA Kabupaten Wonosobo serta instansi yang terkait lainnya. Sedangkan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak pembuat perencanaan daerah, dalam hal ini adalah pihak BAPPEDA Kabupaten Wonosobo, diskusi dengan kelompok-kelompok petani di tiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo serta pengamatan lapangan secara langsung.

Alat analisis yang digunakan adalah dengan analisis *Shift Share*, *Location Quotien* (LQ) dan analisis Skalogram. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui komoditas-komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif di tiap kecamatan. Sedangkan dari hasil analisis LQ dapat diketahui komoditas-komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif di tiap kecamatan. Dari hasil analisis Shift Share dan LQ akan diketahui komoditas-komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan. Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan adalah komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif atau salah satunya. Sedangkan

analisis Skalogram digunakan untuk menentukan hirarki pusat pelayanan yang nantinya juga digunakan sebagai pedoman pendirian industri pengolahan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Performance (Kinerja) Sektor Pertanian Di Kabupaten Wonosobo.

Jika dilihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo, sebagian besar lahan di daerah tersebut digunakan untuk kebun dan sawah. Penggunaan lahan untuk kebun mencapai 43% dari total luas wilayah Kabupaten Wonosobo atau seluas 42.083 Ha. Sedangkan untuk penggunaan lahan sawah mencapai 17 % atau 17.174 Ha. Melihat gambaran tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo adalah untuk sektor pertanian. Dari sub-sub sector pertanian yang ada, yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo adalah pertanian tanaman pangan dengan komoditasnya meliputi tanaman padi dan palawija, tanaman sayur dan buah-buahan. Pada tahun 2009, produksi padi sawah mengalami peningkatan sebesar 41 ton meskipun luas panennya mengalami penurunan 946 hektar (3,14 %). Berbeda dengan padi sawah, produksi padi gogo meningkat dari 1524 ton pada tahun 2008 menjadi 2982 ton (95,67 %) dengan luas panen meningkat sebesar 166,29 %. Hal ini berarti rata-rata produksi padi sawah per hektar mengalami peningkatan, sedangkan rata-rata produksi per hektar padi gogo mengalami penurunan pada tahun 2008. Secara keseluruhan produktivitas padi mencapai 162.955 ton dengan luas panen 30.071 hektar. Peningkatan produktivitas

padi tidak lepas dari usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan seperti bantuan benih, pupuk, dan sarana

pertanian lainnya serta didukung oleh tenaga penyuluh pertanian di lapangan.

Tabel. 1. Luas Panen dan Produktivitas Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2009

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha/pohon)	Produktivitas (ton)
Padi	30.071 Ha	162.955
Jagung	32.390 Ha	136.683
Ubi kayu	6.204 Ha	147.122
Ubi jalar	713 Ha	13.962
Kacang-kacangan	214 Ha	277
Sayuran	13.383 Ha	176.981
Buah-buahan	4.106.391 pohon	124.661

Sumber : Buku Wonosobo Dalam Angka 2009

Produktivitas tertinggi dalam pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah tanaman sayuran yang mencapai 176.981 ton dengan luas panen 13.383 hektar. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan sebanyak 4.106.391 batang pohon, mampu menghasilkan 124.661 ton. Sumber makanan pokok selain padi di Kabupaten Wonosobo adalah jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2009 produksi jagung dan ubi mengalami peningkatan. Produksi jagung meningkat sebesar 5 % dengan luas panen yang hanya meningkat 2,33 %, bahkan produksi ubi kayu meningkat 9,05 % meskipun terjadi penurunan luas panen sebesar 10,31 %. Peningkatan produksi jagung dan ubi kayu sangat menunjang pemerintah dalam rangka mencapai ketahanan pangan.

Produksi tanaman sayuran pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali wortel dan kacang merah. Tanaman sayuran utama di Kabupaten

Wonosobo adalah kobis, petsai/sawi, kentang, daun bawang, tomat, cabai, wortel, dan buncis. Daerah penghasil sayuran yang utama di Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Kalikajar, Kertek, garung dan Kejajar.

Untuk tanaman buah-buahan yaitu : salak dan pisang banyak dihasilkan di Kabupaten Wonosobo, namun demikian komoditi ini tidak tersebar secara merata di semua kecamatan. Pisang lebih banyak dihasilkan dari Kecamatan Kaliwiro dan Selomerto, sedangkan salak lebih banyak dihasilkan di Kecamatan Leksono, Sukoharjo dan Kalikajar.

2. Sebaran Komoditas tanaman pangan unggulan yang potensial

Untuk mengidentifikasi komoditas tanaman pangan unggulan yang potensial untuk dapat dikembangkan di masing-masing kecamatan di kabupaten Wonosobo pada penelitian ini didasarkan pada

komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, atau memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif saja. Yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah komoditas yang mampu bersaing dengan komoditas yang sama dengan daerah lain, hal ini dapat diukur dengan melihat nilai komponen Cij pada analisis *Shift Share* bernilai positif (+), maka komoditas tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan komparatif manakala hasil produksi dari suatu komoditas di suatu daerah hasilnya dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah dan sisanya masih bisa dipasarkan keluar daerah. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis LQ. Jika nilai analisis LQ pada suatu nilai komoditas di suatu daerah bernilai lebih besar dari satu ($LQ > 1$) maka komoditas tersebut bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam penelitian ini, komoditas yang dikembangkan di tiap kecamatan adalah komoditas yang merupakan komoditas unggulan dan komoditas potensial. Dikatakan komoditas unggulan apabila komoditas di suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Sedangkan dikatakan potensial apabila memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan komparatif saja.

2.1 Komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif

Dari hasil analisis *Shift Share* (SS) maka diperoleh hasil komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif di tiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Wadaslintang : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayuran.
- 2) Kecamatan Kepil : kacang-kacangan dan buah-buahan.
- 3) Kecamatan Sapuran : padi, jagung, ubi kayu dan sayuran.
- 4) Kecamatan Kalibawang : jagung, ubi kayu dan buah-buahan
- 5) Kecamatan Kaliwiro : jagung dan buah-buahan.
- 6) Kecamatan Leksono : jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.
- 7) Kecamatan Sukoharjo :-
- 8) Kecamatan Selomerto : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.
- 9) Kecamatan Kalikajar : jagung, ubi jalar dan buah-buahan.
- 10) Kecamatan Kertek :-
- 11) Kecamatan Wonosobo : sayuran
- 12) Kecamatan Watumalang : padi, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.
- 13) Kecamatan Mojotengah : padi, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.
- 14) Kecamatan Garung : padi, ubi jalar dan sayuran
- 15) Kecamatan Kejajar : jagung, ubi kayu dan buah-buahan.

2.2 Komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif

Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) masing-masing kecamatan di Wonosobo, maka diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel nomor 2

Tabel 2. Hasil Analisis LQ Berdasar Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Masing - Masing Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2009

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi kayu	Ubi jalar	Kacang-kacangan	Sayuran	Buah-buahan
1	Wadaslintang	6.72	1.59	5.20	0.00	36.01	0.15	1.30
2	Kepil	5.73	7.85	2.01	0.66	4.87	0.41	1.00
3	Sapuran	1.88	2.50	1.07	0.41	2.48	2.40	0.08
4	Kalibawang	3.42	12.71	10.65	0.00	3.20	0.40	0.31
5	Kaliwiro	1.14	0.17	0.71	0.00	0.00	0.00	2.22
6	Leksono	0.29	0.08	0.41	0.31	0.30	0.03	2.28
7	Sukoharjo	1.21	0.99	1.47	0.00	0.00	0.02	2.10
8	Selomerto	2.12	0.28	0.57	0.62	2.06	0.46	1.77
9	Kalikajar	1.26	3.38	0.33	4.03	0.32	1.77	0.59
10	Kertek	3.96	3.32	0.05	0.71	0.00	1.84	0.38
11	Wonosobo	3.61	0.54	0.42	0.00	0.00	2.02	0.41
12	Watumalang	3.76	8.81	5.62	3.46	0.00	1.09	0.28
13	Mojotengah	4.41	5.13	5.48	5.12	0.00	1.55	0.09
14	Garung	0.38	0.63	4.30	7.02	0.00	2.41	0.04
15	Kejajar	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00	2.92	0.01

Sumber : Data diolah 2011

Dari hasil analisis LQ di atas dapat dilihat komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kriteria LQ, yaitu jika $LQ > 1$. Sebaliknya jika nilai $LQ < 1$, maka komoditas tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

- 1) Kecamatan Wadaslintang : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan buah-buahan.
- 2) Kecamatan Kepil : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan buah-buahan.
- 3) Kecamatan Sapuran : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayuran
- 4) Kecamatan Kalibawang : padi, jagung, ubi kayu dan buah-buahan.
- 5) Kecamatan Kaliwiro : padi.
- 6) Kecamatan Leksono : buah-buahan.
- 7) Kecamatan Sukoharjo : padi, ubi kayu dan buah-buahan
- 8) Kecamatan Selomerto : padi, kacang-kacangan, dan buah-buahan.
- 9) Kecamatan Kalikajar : padi, jagung, ubi jalar dan sayuran
- 10) Kecamatan Kertek : padi, jagung dan sayuran
- 11) Kecamatan Wonosobo : padi dan sayuran
- 12) Kecamatan Watumalang : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sayuran.
- 13) Kecamatan Mojotengah : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sayuran.
- 14) Kecamatan Garung : ubi kayu, ubi jalar dan sayuran
- 15) Kecamatan Kejajar : sayuran.

2.3 Komoditas tanaman pangan unggulan yang dapat dikembangkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Komoditas tanaman pangan unggulan yang dapat dikembangkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonosobo, ditentukan berdasarkan hasil analisis *Shift Share* (SS) dan LQ. Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan adalah komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif atau salah satunya. Hasil dari analisis SS dan LQ yang telah diuraikan di atas dapat dibuat tabel komoditas tanaman pangan yang memiliki

keunggulan kompetitif dan komparatif seperti dimuat dalam tabel 3.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa komoditas tanaman pangan dapat dikategorikan menjadi beberapa kriteria, yaitu : 1) komoditas unggulan yaitu komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif (SS dan LQ bertanda positif), 2) komoditas potensial yaitu komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan komparatif (SS atau LQ bertanda positif), 3) komoditas terbelakang, yaitu komoditas yang tidak memiliki keunggulan kompetitif ataupun komparatif (SS dan LQ bertanda negatif).

Tabel 3 .Komoditas Tanaman Pangan Unggulan

No	Kecamatan	Padi		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang-kacangan		Sayuran		Buah-buahan	
		SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ
1.	Wadaslintang	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+
2.	Kepil	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+
1.	Sapuran	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-
2.	Kalibawang	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-
3.	Kaliwiro	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
4.	Leksono	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-
5.	Sukoharjo	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
6.	Selomerto	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
7.	Kalikajar	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-
8.	Kertek	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
9.	Wonosobo	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
10.	Watumalang	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-
11.	Mojotengah	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-
12.	Garung	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-
13.	Kejajar	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-

Sumber : Data diolah 2011

Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan adalah komoditas unggulan dan potensial

yaitu komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif atau salah satunya.

Jadi dari tabel 3 dapat disimpulkan komoditas-komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Wadaslintang : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.
2. Kecamatan Kepil : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan buah-buahan.
3. Kecamatan Sapuran : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayuran.
4. Kecamatan Kalibawang : padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan buah-buahan.
5. Kecamatan Kaliwiro : padi, jagung dan buah-buahan.
6. Kecamatan Leksono : jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.
7. Kecamatan Sukoharjo : padi, ubi kayu dan buah-buahan.
8. Kecamatan Selomerto : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.
9. Kecamatan Kalikajar : padi, jagung, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.
10. Kecamatan Kertek : padi, jagung dan sayuran.
11. Kecamatan Wonosobo : padi dan sayuran.
12. Kecamatan Watumalang : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.
13. Kecamatan Mojotengah : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.
14. Kecamatan Garung : padi, ubi kayu, ubi jalar dan sayuran.

15. Kecamatan Kejajar : jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.

3. Hirarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi

Berdasarkan hasil analisis Skalogram dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur tinggi adalah Kecamatan Kepil, Kertek, Wadaslintang, Wonosobo dan Kaliwiro dengan jumlah unit fasilitas umum sebanyak 595, 509, 508, 491 dan 424. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas umum rendah adalah Kecamatan Kejajar, Selomerto, Leksono, Kalibawang dan Sukoharjo dengan jumlah unit sebanyak 329, 298, 254, 250 dan 237 unit.

Dalam penggolongan pusat wilayah, digolongkan dalam tiga hirarki yaitu hirarki I, yang tergolong dalam hirarki ini adalah daerah-daerah yang infra strukturnya berkembang yaitu Kecamatan Kepil, Kertek, Wadaslintang, Wonosobo dan Kaliwiro. Hirarki II yaitu daerah-daerah yang infra strukturnya moderat (tidak berkembang tetapi juga tidak terbelakang) yaitu Kecamatan Kalikajar, Sapuran, Garung, Watumalang dan Mojotengah. Sedangkan hirarki III yaitu daerah-daerah yang infra-strukturnya terbelakang yaitu Kecamatan Kejajar, Selomerto, Leksono, Kalibawang dan Sukoharjo.

Kecamatan yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Wonosobo meliputi kecamatan yang berada dalam hirarki I yaitu Kecamatan Kepil, Kertek, Wadaslintang, Wonosobo dan Kaliwiro. Kecamatan sebagai pusat pelayanan utama terletak pada kecamatan yang memiliki ranking satu atau kecamatan

yang memiliki jumlah fasilitas umum dan infrastruktur yang paling tinggi yaitu Kecamatan Kepil dengan jumlah unit sebesar 595. Kecamatan Kejajar, Selomerto, Leksono, Kalibawang dan Sukoharjo merupakan kecamatan yang kekurangan fasilitas pelayanan social dan ekonomi sehingga pembangunan pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di kelima kecamatan tersebut perlu diadakan perbaikan dan pengadaan fasilitas umum atau infrastruktur agar menjadi daerah/kecamatan yang mendukung dalam pengembangan ekonomi dan wilayah tersebut.

4. Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* dan *Location Quotient*, terlihat bahwa komoditas-komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo membentuk suatu *cluster*. Komoditas padi terdapat di Kabupaten Wonosobo bagian tengah dan selatan. Komoditas tanaman jagung menyebar di hampir seluruh Kabupaten Wonosobo. Ubi kayu terdapat di daerah bagian utara dan selatan. Ubi jalar di bagian utara. Komoditas tanaman kacang-kacangan terdapat di bagian selatan Kabupaten Wonosobo. Sayuran terdapat di bagian utara dan buah-buahan terdapat di bagian barat dan selatan Kabupaten Wonosobo.

Dalam setiap *cluster* dari komoditas tanaman pangan akan didirikan industri pengolahan, sedangkan wilayah lainnya sebagai daerah pendukung (*hinterland*) akan berfungsi sebagai penyedia input industri pengolahan tersebut. Industri pengolahan perlu dibangun pada masing-masing *cluster*

komoditas unggulan untuk menampung produksi yang dihasilkan. Dengan adanya industri pengolahan, komoditas yang dihasilkan langsung dapat diproses menjadi produk-produk turunannya yang mempunyai nilai jual lebih baik dibanding dengan harga jual dalam keadaan belum diolah.

Pemilihan lokasi industri pengolahan tanaman pangan didasarkan asumsi bahwa investor akan masuk ke suatu daerah apabila infrastruktur di daerah tersebut baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai skalogram untuk masing-masing kecamatan. Semakin tinggi jumlah unit fasilitas ekonomi dan sosial dari suatu kecamatan menunjukkan bahwa semakin lengkap infrastruktur yang telah dimiliki oleh kecamatan tersebut dan sebaliknya. Dalam hal ini nilai tingkat kelengkapan fasilitas sosial ekonomi dapat dilihat dari ranking pada analisis skalogram. Selain berdasarkan tingkat kelengkapan fasilitas sosial ekonomi, untuk menentukan lokasi pendirian industri pengolahan juga didasarkan pada teori lokasi. Dalam teori lokasi dinyatakan bahwa untuk menentukan lokasi pendirian industri terdapat dua orientasi. Pertama, adalah orientasi pasar dan kedua orientasi sumberdaya. Karena sebagian besar produksi yang berbahan baku hasil biadanya terjadi *weight losing activity*, maka rekomendasi penentuan lokasi industri adalah di wilayah sumberdaya atau lokasi bahan baku. Berdasarkan pada teori tersebut, pada penelitian ini rekomendasi lokasi pendirian industri pasti di daerah sumberdaya dan memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi yang tinggi.

Komoditas Padi

Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah yang berpotensi dalam menghasilkan komoditas padi. Oleh sebab itu komoditas padi di Kabupaten Wonosobo terdapat di hampir semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo diantaranya adalah Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Sapuran, Kalibawang, Watumalang, Mojotengah dan Kecamatan Garung. Hal tersebut dikarenakan wilayah Wonosobo merupakan daerah yang memiliki tanah subur. Padi yang dikembangkan di daerah ini adalah tanaman padi pada lahan basah dan lahan kering. Keberhasilan dalam panen padi selain karena dukungan luas tanam wilayah juga sangat bergantung pada keberhasilan pengendalian hama.

Tabel nomor 4 menyajikan arah pengembangan untuk komoditas padi yaitu

melalui pemabngunan penggilingan padi dan sentra produksi. Pertimbangan pemabngunan industri pengolahan berupa penggilingan padi adalah pada kecamatan-kecamatan tersebut di atas yang memiliki sejumlah fasilitas sosial dan ekonomi yang tinggi, yang berarti menggambarkan kelengkapan infrastruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan penggilingan padi untuk komoditas padi unggulan direkomendasikan berada di kecamatan Kepil dan Kertek. Penggilingan padi di Kecamatan Kepil digunakan untuk menampung produksi dari Kecamatan Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang sedangkan penggilingan padi di kecamatan Kertek digunakan untuk menampung produksi padi dari Kecamatan Kalikajar, Selomerto, Wono-sobo, Mojo-tengah, Garung, Watumalang dan Sukoharjo.

Tabel 4. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Padi

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Wadaslintang	3	+	+	Sentra produksi
2	Kepil	1	-	+	Penggilingan padi
3	Sapuran	7	+	+	Sentra produksi
4	Kalibawang	14	-	+	Sentra produksi
5	Kaliwiro	5	-	+	Sentra produksi
6	Sukoharjo	15	-	+	Sentra produksi
7	Selomerto	12	+	+	Sentra produksi
8	Kalikajar	6	-	+	Sentra produksi
9	Kertek	2	-	+	Penggilingan padi
10	Wonosobo	4	-	+	Sentra produksi
11	Watumalang	9	+	+	Sentra produksi
12	Mojotengah	10	+	+	Sentra produksi
13	Garung	8	+	-	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Komoditas Jagung

Pengembangan komoditas jagung terdapat di Kecamatan Wadaslintang, Kepil,

Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Selomerto, Kalikajar, Kertek, Watumalang, Mojotengah dan Kejajar. Komoditas jagung

banyak dijumpai di kecamatan-kecamatan tersebut di atas karena merupakan daerah yang sebagian lahannya berupa lahan kering (*dry land*) dalam bentuk lading dan pekarangan. Adapun bentuk produksi dari komoditas ini yaitu dalam pipilan kering. Tabel 5 berikut menunjukkan arah pengembangan komoditas tanaman jagung di Kabupaten Wonosobo. Arah pengembangan

komoditas jagung yaitu industri pengolahan komoditas jagung dibangun di Kecamatan Kepil dan Kertek. Pertimbangan dari pemilihan lokasi industri pengolahan di Kecamatan Kepil dan Kertek karena kedua daerah itu merupakan daerah penghasil jagung dan memiliki fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Tabel 5. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Jagung

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan SS LQ		Arah Pengembangan
1	Wadaslintang	3	+	+	Sentra produksi
2	Kepil	1	-	+	Industri pengolahan
3	Sapuran	7	+	+	Sentra produksi
4	Kalibawang	14	+	+	Sentra produksi
5	Kaliwiro	5	+	-	Sentra produksi
6	Leksono	13	+	-	Sentra produksi
7	Selomerto	12	+	-	Sentra produksi
8	Kalikajar	6	+	+	Sentra produksi
9	Kertek	2	-	+	Industri pengolahan
10	Watumalang	9	-	+	Sentra produksi
11	Mojotengah	10	-	+	Sentra produksi
12	Kejajar	11	+	-	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Industri pengolahan jagung di Kecamatan Kepil adalah untuk menampung produksi dari Kecamatan Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang. Sedangkan industri pengolahan di Kecamatan Kertek digunakan untuk menampung produksi jagung dari Kecamatan Kalikajar, Selomerto, Leksono, Mojotengah, Watumalang dan Kejajar. Berbagai produk turunan komoditas jagung antara lain : tepung maizena, keripik jagung dan *pop corn*. Beberapa produk tersebut memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan apabila jagung dijual dalam bentuk pipilan mentah.

Komoditas Ubi Kayu

Komoditas ubi kayu relatif tumbuh dengan baik di Kabupaten Wonosobo bagian utara dan selatan, bentuk produksinya dalam bentuk umbi basah. Ubi kayu di Kabupaten Wonosobo banyak terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Sukoharjo, Leksono, Selomerto, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil. Dilihat dari potensi produk umbi kayu, maka diperlukan industri pengolahan yang mampu menyerap produksi ubi kayu yang dihasilkan menjadi produk makanan yang bernilai tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan teknologi pengolahan pasca

panen dan juga perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan dan pengenalan teknologi kepada para petani terutama di kecamatan-kecamatan yang merupakan basis komo-

ditanya ubi kayu. Tabel 6 menyajikan arah pengembangan komoditas ubi kayu yang terdapat di beberapa kecamatan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 6. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Ubi Kayu

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Wadaslintang	3	+	+	Sentra produksi
2	Kepil	1	-	+	Industri pengolahan
3	Sapuran	7	+	+	Sentra produksi
4	Kalibawang	14	+	+	Sentra produksi
5	Leksono	13	+	-	Sentra produksi
6	Sukoharjo	15	-	+	Sentra produksi
7	Selomerto	12	+	-	Sentra produksi
8	Watumalang	9	-	+	Sentra produksi
9	Mojotengah	10	-	+	Sentra produksi
10	Garung	8	-	+	Industri pengolahan
11	Kejajar	11	+	+	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Pembangunan industri pengolahan ketela pohon/ubi kayu direkomendasikan di Kecamatan Kepil dan Garung dengan pertimbangan bahwa kedua kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil ubi kayu dan memiliki fasilitas ekonomi dan sosial yang paling tinggi di *clusternya*. Sentra industri pengolahan di Kecamatan Kepil digunakan untuk menampung produksi ubi kayu dari Kecamatan Sapuran, Kalibawang dan Wadaslintang. Sedangkan industri pengolahan yang berada di Kecamatan Garung digunakan untuk menampung hasil produksi ubi kayu yang berasal dari Kecamatan Kejajar, Mojotengah, Watumalang, Sukoharjo, Leksono dan Selomerto.

Berbagai produk turunan utama dari komoditas ketela pohon antara lain : tepung tapioca, kripik singkong, kue, makanan ringan dan lain-lain. Dengan diolahnya ubi

kayu menjadi berbagai macam produk turunan tersebut tentunya akan meningkatkan nilai ekonomi dari ubi kayu.

Komoditas Ubi Jalar

Bentuk produksi ubi jalar/rambat ini dalam bentuk umbi basah. Jika dilihat lokasi tumbuh kembangnya umbi rambat cenderung berkembang di Kabupaten Wonosobo bagian utara yaitu Kecamatan Kalikajar, Selomerto, Garung, Mojotengah dan Wadaslintang. Industry pengolahan komoditas ketela rambat direkomendasikan di Kecamatan Kalikajar dengan pertimbangan kecamatan tersebut merupakan penghasil ubi rambat dan memiliki fasilitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Tabel 7 berikut ini akan menyajikan arahan pengembangan komoditas tanaman ubi jalar/ketela rambat.

Tabel 7. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Ubi Jalar

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Selomerto	12	+	-	Sentra produksi
2	Kalikajar	6	+	+	Industri pengolahan
3	Watumalang	9	+	+	Sentra produksi
4	Mojotengah	10	+	+	Sentra produksi
5	Garung	8	-	+	Industri pengolahan

Sumber : Data diolah 2011

Lokasi industri pengolahan yang direkomendasikan adalah Kecamatan Kalikajar dan Garung. Industri pengolahan yang berada di Kecamatan Kalikajar digunakan untuk menampung hasil produksi ubi jalar dari Kecamatan Selomerto. Sedangkan industri yang berada di Kecamatan Garung digunakan untuk menampung produksi dari Kecamatan Mojotengah dan Watumalang. Ubi jalar jika diolah dapat menghasilkan berbagai bentuk produk makanan yang bercita rasa tinggi dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi

dibandingkan dengan sebelum diolah. Berbagai bentuk produk tersebut diantaranya adalah keripik ubi jalar/ketela rambat, kue, snack dan makanan ringan lainnya.

Komoditas Kacang-kacangan

Pengembangan komoditas kacang-kacangan dilakukan di Kabupaten Wonosobo bagian selatan yaitu di Kecamatan Kepil, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Selomerto. Tabel 8 menginformasikan arah pengembangan komoditas tanaman kacang-kacangan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 8. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Kacang-kacangan

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Wadaslintang	3	+	+	Sentra produksi
2	Kepil	1	+	+	Industri pengolahan
3	Sapuran	7	-	+	Sentra produksi
4	Kalibawang	14	-	+	Sentra produksi
5	Selomerto	12	+	+	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Arah pengembangan dari komoditas kacang-kacangan yaitu pembangunan industri pengolahan direkomendasikan di Kecamatan Kepil. Industri pengolahan yang direkomendasikan cukup satu karena dirasa cukup untuk menampung seluruh produksi dari daerah-daerah sentra produksi.

Pertimbangan pembangunan industri pengolahan di Kecamatan Kepil mengingat kecamatan tersebut merupakan salah satu daerah penghasil kacang-kacangan dan memiliki tingkat kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi paling tinggi. Kacang-kacangan bila diolah dapat menghasilkan

produk turunan yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Produk turunan utama dari kacang-kacangan berupa biji kacang dan jika diolah menghasilkan produk makanan seperti snack, kue, selai rasa kacang, permen dan makanan ringan lainnya.

Komoditas Sayuran

Di Kabupaten Wonosobo terdapat sebelas daerah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan komoditas sayuran. Daerah-daerah tersebut adalah Kecamatan Wadaslintang, Sapuran, Leksono, Selomerto, Kalikajar, Kertek, Wonosobo, Watumalang, Mojotengah, Garung dan Kejajar. Daerah pengembangan komoditas sayuran unggulan ini membentuk suatu *cluster* di Kabupaten Wonosobo bagian utara.

Arah pengembangan dari komoditas sayuran yaitu pembangunan industri pengemasan. Sayuran merupakan produk yang biasa dikonsumsi untuk dimasak kembali oleh konsumen, jadi yang dibutuhkan disini adalah usaha pengemasan yang menarik dan dapat membuat sayuran tahan lama serta tetap higienis. Sayuran yang dikemas dengan menarik dan higienis nilainya akan lebih tinggi dan berpeluang untuk masuk ke pasar-pasar swalayan daripada yang dijual tanpa kemasan. Industri pengemasan direkomendasikan di Kecamatan Kertek karena kecamatan tersebut merupakan daerah pengembangan komoditas sayuran yang memiliki tingkat layanan fasilitas ekonomi dan sosial yang tinggi.

Tabel 9. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Sayuran

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Wadaslintang	3	+	-	Sentra produksi
2	Sapuran	7	+	+	Sentra produksi
3	Leksono	13	+	-	Sentra produksi
4	Selomerto	12	+	-	Sentra produksi
5	Kalikajar	6	-	+	Sentra produksi
6	Kertek	2	-	+	Industri pengemasan
7	Wonosobo	4	+	+	Sentra produksi
8	Watumalang	9	+	+	Sentra produksi
9	Mojotengah	10	+	+	Sentra produksi
10	Garung	8	+	+	Sentra produksi
11	Kejajar	11	-	+	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Komoditas Buah-buahan

Di Kabupaten Wonosobo terdapat sebelas daerah pengembangan komoditas tanaman buah-buahan, yaitu Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Kalibawang, Kaliwiro,

Leksono, Sukoharjo, Selomerto, Kalikajar, Watumalang, Mojotengah dan Kejajar. Arah pengembangan komoditas buah-buahan yaitu akan terdapat tiga daerah pembangunan industri yang merupakan industri

pengolahan maupun industri pengemasan buah-buahan. Melihat sebaran daerah sentra produksi buah-buahan yang cukup banyak maka ditunjuk tiga daerah yang akan dijadikan lokasi industri agar bisa menampung hasil produksi di tiga bagian wilayah yaitu daerah Kabupaten Wonosobo bagian barat, utara dan selatan.

Buah-buahan banyak dikonsumsi secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, namun banyak juga produk olahan

yang berasal dari buah-buahan segar yang dikonsumsi masyarakat seperti selai, manisan, buah dalam kaleng, permen buah, keripik buah dan lain-lain. Dengan demikian disini direkomendasikan untuk dibangun/didirikan dua jenis industri pengolahan buah yaitu industri pengolahan dan pengemasan. Tabel 10 menyajikan informasi arah pengembangan komoditas tanaman buah-buahan.

Tabel 10. Arah Pengembangan Komoditas Tanaman Buah-buahan

No	Kecamatan	Rangking Skalogram	Keunggulan		Arah Pengembangan
			SS	LQ	
1	Wadaslintang	3	-	+	Sentra produksi
2	Kepil	1	+	+	IPP
3	Kalibawang	14	+	-	Sentra produksi
4	Kaliwiro	5	+	-	IPP
5	Leksono	13	+	+	Sentra produksi
6	Sukoharjo	15	-	+	Sentra produksi
7	Selomerto	12	+	+	Sentra produksi
8	Kalikajar	6	+	-	Sentra produksi
9	Watumalang	9	+	-	IPP
10	Mojotengah	10	+	-	Sentra produksi
11	Kejajar	11	+	-	Sentra produksi

Sumber : Data diolah 2011

Keterangan : **IPP = Industri Pengolahan dan Pengemasan**

KESIMPULAN

Bertolak dari hasil analisis penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan bahkan beberapa produk pertanian yang terdapat di kecamatan-kecamatan Kabupaten Wonosobo memiliki keunggulan kompetitif

maupun komparatif yang dapat mendorong pendapatan domestic regional bruto (PDRB) dan pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan daerah tersebut. Optimalisasi produk-produk tersebut perlu digarap dengan seksama melalui suatu perencanaan yang tepat. Pendekatan perencanaan dengan menggunakan analisis *Shift Share*, *Location Quotient* dan analisis Skalogram dapat mengungkap segala kemungkinan yang terkait dengan

kegiatan pertanian khususnya untuk memberikan arahan pengembangan berbagai komoditas tanaman pangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anriquez, G., and Kostas Stamoulis, 2007. Electronic Journal of Agricultural and Development Economics' *Rural Development and Poverty reduction : is Agriculture Still the Key?*, 4(1), 5-46
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Ashby, L.D., 1964. *The Geographical Redistribution of Employment : An Examination of the Element of Change*. Survey of Current Business, 44; hal. 13-20
- Beck, Roger J. dan William McD. Herr. 1990. *Employment Linkages From A Modified Share Analysis : An Illinois Example* The Review of Regional Studies. 20; hal.38-45
- Biro Pusat Statistik, *Jawa Tengah Dalam Angka 2010*, BPS Propinsi Jawa Tengah.
- Biro Pusat Statistik, *Wonosobo Dalam Angka 2010*, BPS Kabupaten Wonosobo.
- Djaenudin, D., Sulaeman dan A. Abdulrachman, 2002. Jurnal Litbang Pertanian *'Pendekatan Perwilayahan Komoditas Pertanian Menurut Peda-Agroklimat di Kawasan Timur Indonesia'*. 21 (1), 1-10.
- Sudaryanto, T., dan I Wayan Rusastra, 2006. Jurnal Litbang Pertanian *'Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan'* 25 (4), 115-122.

PEMBERDAYAAN LANSIA MELALUI KARANG WERDA DI DESA NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

Afiyatur Rosidah, Lusiana Devika F.S dan Rifqi Firda S

Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Elderly coral, empowerment of the elderly, welfare.

Abstrak

Karang Werda merupakan organisasi kemasyarakatan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Karang Werda merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan Lansia. Lansia adalah bagian dari masyarakat yang berhubungan sangat erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Wujud dari usaha pemerintah dalam memberdayakan para lansia adalah dicanangkannya pelayanan bagi lansia melalui beberapa jenjang yaitu pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat salah satunya melalui Karang Werda. Program dari Karang Werda yaitu posyandu lansia dimana program ini dapat membantu lansia sesuai dengan kebutuhannya, sehingga para lansia tidak merasa lagi terabaikan di dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan hidup para lansia dari segi fisik maupun segi materil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Karang Werda para lansia kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Setelah adanya Karang Werda para lansia merasa kesejahteraan hidupnya terjamin berupa fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis dan pemberian berupa bahan pokok yang diadakan secara berkala setiap bulannya.

Abstract

Elderly coral is a social organization that is not widely known by the public. Reefs Werdha a container coaching and empowerment Elderly. Elderly is a part of society that is closely related to public welfare issues. The realization of the government's efforts in empowering the elderly is the introduction of services for the elderly through several levels of health services at the community level is one of them through the Coral Werdha. Program of Coral Werdha that Posyandu where this program can help the elderly in accordance with their needs, so that the elderly do not feel anymore neglected in society. This study focuses on the welfare of the elderly in terms of physical and material terms. The method used is a qualitative method approach through interviews and direct observation. The results of this study indicate that prior to the Coral Elderly seniors less noticed by the people around. After the Coral Elderly seniors feel their welfare is

* Alamat korespondensi
- Afiyatur07@gmail.com
- Lusidevika@gmail.com
- Rifqifirdasya@gmail.com

PENDAHULUAN

Penduduk usia lanjut yang kemudian disingkat lansia merupakan bagian masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Siapapun pasti akan mengalami masa fase lansia tersebut. Masalah yang muncul belakangan ini yaitu tentang masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia lansia yang dipengaruhi langsung oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi makanan dan gizi, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta pengakuan masyarakat bahwa mereka masih mempunyai kemampuan kerja dan pendapatan dari pensiunan yang masih rendah. Konsumsi makanan dan gizi kurang (malnutrisi) masih dialami oleh beberapa Lansia di Indonesia yang tersebar pada beberapa desa dan daerah pinggiran kota. Kondisi yang demikian mengakibatkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Lansia.

Lansia sering dianggap sebagai golongan yang lemah, tetapi sesungguhnya lansia memiliki peran yang berarti bagi masyarakat. Lansia memiliki penalaran moral yang bagus untuk generasi dibawahnya. Lansia memiliki semacam gairah yang tinggi karena secara alami, manusia akan cenderung memanfaatkan masa-masa akhirnya secara optimal untuk melakukan pewarisan nilai dan norma. Hal

ini justru mempermudah kita untuk membina moral anak-anak. Pada gilirannya Lansia mempunyai inisiatif, bangkit dan menggerakkan masyarakat sekitarnya untuk memperbaiki kondisi kesehatan, perekonomian, mulai dari perekonomian keluarga, meluas sampai ke perekonomian masyarakat, diharapkan juga sebagai sarana hiburan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Permasalahan lansia perlu ditangani dengan strategi antara lain melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bersama-sama dengan peningkatan prasarana dan pelayanan kesehatan. Pemerintah telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana pada pasal 19 disebutkan bahwa kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif, serta pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Selain itu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya

akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Sejalan dengan itu usaha pemerintah adalah mencanangkan pelayanan bagi lansia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia. Pelayanan kesehatan lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, dan pelayanan tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit. Dengan demikian, posyandu lansia sangat diperlukan, dimana posyandu lansia ini dapat membantu lansia sesuai dengan kebutuhannya dan pada lingkungan yang tepat, sehingga para lansia tidak merasa lagi terabaikan di dalam masyarakat.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesabilitas terhadap sumberdaya, terkait dengan pekerjaan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (Mardikanto, dkk., 2015).

Di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terdapat suatu lembaga kemasyarakatan yang mengembangkan dan membina potensi kelompok masyarakat lanjut usia berupa Karang Werda. Karang werda digunakan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan lansia, yang relatif belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dalam usaha pengembangan organisasi Karang Werda mengalami banyak hambatan serta kendala

karena masyarakat belum paham akan kegiatan atau aktivitas Karang Werda termasuk dari kalangan lansia itu sendiri, tetapi kami sangat optimis bahwa Karang Werda dapat melaksanakan tugas-tugas secara optimal dan berhasil dengan baik.

METODE PENELITIAN

Subjek yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu para ibu-ibu atau bapak-bapak yang tergolong lansia (lanjut usia) yang tergabung dalam Karang Werda serta kegiatan posyandu lansia di desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Jumlah lansia yang mengikuti kegiatan posyandu lansia di Desa Nglegok yakni \pm 200. Sumber data penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yakni pengurus dari Karang Werda, pihak puskesmas Nglegok, dan beberapa lansia yang mengikuti posyandu. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan pengamatan langsung pada kegiatan posyandu lansia.

Menurut Depkes RI tahun 2003 (Maryam, dkk, 2009) seseorang dikatakan mulai memasuki masa pralansia ketika telah memasuki usia 45-59 tahun, selanjutnya masa lansia ketika seseorang telah berusia 60 tahun keatas. Subjek penelitian tersebut dijadikan sebagai informan atau sumber data utama penelitian, yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dan terbuka serta dengan proses observasi partisipatif. Lokasi dari penelitian ini bertempat pada 3 Dusun di Desa Nglegok, yaitu Kedungwaru, Karanganom, dan Selorejo.

Penelitian ini menggunakan pen-

dekatan kualitatif deskriptif, yang artinya penelitian ini berusaha untuk menjelaskan masalah-masalah yang ditemukan ketika proses penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif ini lebih spesifik mengarah pada studi kasus. Selain melakukan pengambilan data dalam penelitian ini juga dituntut untuk menjelaskan isi data yang berupa analisis mendalam dari fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu penggambaran fenomena yang diteliti. Pada hakikatnya pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Convelo, 1993:73).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karang Werda

Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan berpengaruh kepada meningkatnya kualitas hidup bagi penduduk yang berdampak kepada meningkatnya usia harapan hidup bagi masyarakat. Konsekuensi dari meningkatnya jumlah lanjut usia (Lansia) berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya pergeseran nilai sosial budaya oleh masyarakat pada para lansia yang cenderung kepada acuh tak acuh serta kurangnya rasa dihormati, serta semakin tersisih dari lingkungan sosialnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mendirikan sebuah lembaga kemasyarakatan berupa Karang Werda yang

bernama “Seger Waras”. Karang Werda merupakan suatu lembaga ke-masyarakatan desa yang membantu pemerintah Desa atau Kelurahan dalam mengembangkan dan membina potensi kelompok masyarakat lanjut usia dalam rangka pembangunan di Desa. Tujuan dari dibentuknya Karang Werda “ Seger Waras” di Desa Nglegok yaitu sebagai upaya pem-binaan dan sebagai wadah menyalurkan pelayanan yang dibutuhkan oleh para lansia Desa Nglegok dalam bidang kesehatan, kerokhanian, dan sosial budaya.

Sampai saat ini Karang Werda di Desa Nglegok masih tetap berjalan dan telah memiliki struktur organisasi maupun susunan kegiatan resmi yang biasanya dilakukan sebulan sekali. Struktur organisasi ke-pengurusan karang werda terdapat sejumlah 9 pengurus resmi, dengan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kerokhanian, Seksi Kesehatan, Seksi Olah Raga dan Rekreasi, Seksi Seni Budaya, serta Seksi Kesejahteraan.

Kegiatan-kegiatan karang werda yang melibatkan para lansia di Desa Nglegok antara lain, (1) diadakannya kegiatan posyandu lansia yang bertempat pada 3 Dusun di Desa Nglegok, antara lain Kedungwaru, Karanganom, dan Selorejo. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia ini meliputi pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, perhitungan denyut nadi, pemeriksaan gula darah, pelaksanaan rujukan ke puskesma apabila ada rujukan, pemberian vitamin atau obat dasar, pemberian makanan tambahan (PMT) serta penyuluhan dari pihak puskesmas secara berkala, (2) senam lansia yang dilakukan secara bersama-sama di

puskesmas Desa Nglegok, (3) disediakan taman baca bagi para lansia di ruang sekretariat karang werda yang bertempat di Kelurahan Nglegok, (4) diadakan latihan karawitan bagi para lansia yang dilaksanakan setiap hari senin, (5) serta diadakannya arisan simpan pinjam setiap tanggal 28. (sumber: pedoman profil karang werda).

Pemberdayaan Lansia Melalui Posyandu

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jika masalah tersebut tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang kompleks. Dalam hal ini pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia sehingga mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Lanju Usia (lansia) merupakan suatu fase menurunnya kemampuan akal dan fisik,

yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagaimana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki tahap selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya (Darmojo, 2004).

Salah satu upaya pemberdayaan lansia melalui program yang diadakan oleh Karang Werda “Seger Waras” di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini adalah posyandu lansia yang dilakukan setiap tanggal 18 atau setiap 1 bulan sekali. Dari 10 RW yang terdapat di Desa Nglegok kegiatan posyandu hanya diadakan di 3 RW atau di 3 dusun. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Pemberdayaan lansia melalui posyandu desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar

No.	Dusun	RT/RW	Jumlah lansia
1.	Karanganom	RT 04 dan RT 05 / RW 07	±40
2.	Kedungwaru	RT 01 dan RT 02 / RW 08	±39
3.	Selorejo	RT 02 / RW 06	±103

Sumber : diolah melalui wawancara dengan Ketua Karang Werda

Posyandu lansia di Dusun Karangnom diadakan setiap tanggal 18 pada hari efektif kerja, dan apabila pada tanggal tersebut bertepatan pada hari-hari libur kerja maka akan diganti pada hari berikutnya. Selanjutnya posyandu lansia yang bertempat di Dusun Kedungwaru diadakan setiap

tanggal 16 pada hari efektif kerja, sedangkan di Dusun Selorejo diadakan setiap tanggal 11 pada hari efektif kerja. Posyandu lansia ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diadakan oleh lembaga kemasyarakatan Karang Werda “Seger Waras” Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kegiatan posyandu lansia pada ketiga Dusun tersebut sama, tetapi jadwal pelaksanaan kegiatan posyandu berbeda menyesuaikan jadwal bidan dari pihak puskesmas. Dari hasil pengamatan posyandu lansia yang diadakan di Dusun Karanganyom lansia yang mengikuti posyandu tergolong masih sedikit yaitu sekitar 25 orang karena posyandu lansia yang diadakan di Dusun Karanganyom ini baru berlangsung 4 bulan, selain itu posyandu di Dusun Karanganyom masih bercampur dengan posyandu balita hal ini dikarenakan jadwal dari pihak puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan berbenturan dengan kegiatan lain sehingga para lansia yang mengikuti posyandu harus bergiliran dengan para balita (sumber: wawancara kader puskesmas posyandu Karanganyom).

Pihak karang werda juga melakukan kerja sama dengan pihak puskesmas Nglepok sebagai pendukung pelaksanaan posyandu lansia di Desa Nglepok. Apabila terdapat lansia yang kesehatannya mulai menurun, maka pihak penyelenggara posyandu menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke puskesmas agar segera mendapatkan perawatan yang lebih lanjut dikarenakan obat-obatan yang diberikan oleh bidan saat posyandu lansia tersebut masih terbatas, selain itu dalam kegiatan posyandu lansia ini terdapat penyuluhan mengenai kesehatan para lansia secara berkala oleh pihak puskesmas. Selain itu untuk meningkatkan kebugaran program lain dari Karang Werda "Seger Waras" ialah senam lansia yang rutin dilakukan seminggu sekali setiap hari jum'at di Kelurahan Nglepok. Banyak dari para lansia yang mengikuti posyandu mengaku merasa

kebutuhan jasmani terpenuhi, serta merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh posyandu karena para lansia tidak dipungut biaya dan pengetahuan kesehatan yang diberikan pihak puskesmas pada saat penyuluhan di posyandu. Posyandu lansia juga dapat membantu lansia untuk menyesuaikan diri dalam perubahan fase kehidupannya sehingga menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan keberadaannya. Mengenai masalah bantuan berupa bahan pokok, pembagian yang dilakukan pemerintah mengalami pemfokusan jadi jumlah bantuan dikurangi dan diberikan kepada lansia yang lebih spesifik, selain itu kurang menyeluruhnya pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikarenakan jumlah penerima BLT yang layak tidak sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dari itu pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan bantuan yang akan diberikan kepada lansia sehingga bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran.

Dari data penduduk desa Nglepok sendiri tercatat sekitar 822 jiwa penduduk yang telah masuk dalam kategori lansia. Tetapi tidak semua penduduk lansia menyadari akan manfaat kegiatan posyandu lansia bagi kesehatan dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia di 3 Dusun hanya sekitar \pm 200 jiwa penduduk saja. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari setengah jumlah keseluruhan penduduk lansia yang ada di Desa Nglepok. Melihat dari data posyandu lansia pada 3 Dusun di Desa Nglepok, para lansia yang mengikuti kegiatan posyandu berkisar pada usia 50 tahun keatas.

Minimnya pengetahuan para lansia akan

pentingnya kesehatan inilah yang melatarbelakangi mengapa tidak semua lansia ikut berperan aktif dalam kegiatan posyandu lansia yang sudah diadakan di desa Nglegok. Padahal pada kenyataannya kesehatan lansia sangatlah rentan akan penyakit. Kendala lainnya yaitu jarak rumah dengan lokasi posyandu lansia jauh atau sulit dijangkau. Jarak posyandu yang dekat akan membuat lansia mudah menjangkau posyandu tanpa harus mengalami kelelahan atau kecelakaan fisik karena penurunan daya tahan atau kekuatan fisik tubuh. Kemudahan dalam menjangkau lokasi posyandu ini berhubungan dengan faktor keamanan atau keselamatan bagi lansia, selain kurangnya pengetahuan akan pentingnya kesehatan, para lansia di desa Nglegok juga masih memprioritaskan pekerjaannya ketimbang kesehatannya. Mereka lebih memilih untuk pergi ke sawah ataupun berkebun dari pada harus mengikuti posyandu.

Oleh karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mewujudkan masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna dan produktif untuk usia lanjut dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada kelompok usia lanjut ini, Karang Werda di desa Nglegok diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup lansia.

SIMPULAN

Permasalahan lansia perlu ditangani dengan beberapa strategi, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bersamaan dengan peningkatan prasarana dan pelayanan kesehatan. Wujud pem-

berdayaan lansia yang diadakan oleh Karang Werda “Seger Waras” di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini adalah posyandu lansia. Posyandu lansia sangat diperlukan, karena posyandu lansia dapat membantu lansia memenuhi kebutuhan sesuai lingkungannya, sehingga para lansia tidak lagi merasa terabaikan di dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia ini meliputi pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, perhitungan denyut nadi, pemeriksaan gula darah, pelaksanaan rujukan ke puskesmas apabila ada rujukan, pemberian vitamin atau obat dasar, pemberian makanan tambahan (PMT) serta penyuluhan dari pihak puskesmas secara berkala. Meskipun banyak kendala yang ditemui dalam menggerakkan posyandu lansia tetapi kendala tersebut akan dapat diatasi dengan kerjasama semua pihak, yaitu pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu maka Pembinaan kesehatan lansia merupakan salah satu kegiatan yang harus terus digalakkan untuk mewujudkan lansia sejahtera, bahagia dan berdayaguna bagi kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan suatu upaya menghadapi peningkatan status dan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang memberikan dampak pada meningkatnya usia harapan hidup bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

Convelo G. Cevilla, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Indonesia.

- Darmojo, Boedhi dan Martono, Hadi (editor). 2000. *Ilmu Kesehatan Usia Lanjut*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univ. Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Maryam, R. Siti, dkk. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Subijanto, dkk. 2011. *Pembinaan Posyandu Lansia Guna Pelayanan Kesehatan Lansia*. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN SIKAP ANAK S (SUDAH MENGENAL MAKE-UP, PACARAN, DAPAT MENGENDARAI SEPEDA MOTOR) DAN MOTIVASI BELAJAR

Inka Eva Umulaili, Theola Zevana Putri, Umdatul Khoirot
Jurusan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

attitude change, causes, impacts

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan mengenai perubahan sikap yang terjadi pada anak SD (Sekolah Dasar) seperti (sudah mengenal make-up, pacaran, dapat mengendarai sepeda motor). Penelitian dilakukan pada 4 SDN di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. SDN Bedalisodo I, II, III, IV. Tentunya sikap-sikap yang dijelaskan tidak seharusnya terjadi jika melihat usia mereka yang rata-rata dari 12-15 tahun. Perubahan sikap ini dilatarbelakangi oleh satu fenomena pokok yaitu globalisasi. Globalisasi ini membawa perkembangan dalam semua hal salah satunya adalah teknologi. Teknologi inilah yang mengakibatkan perubahan-perubahan sikap pada anak SD tersebut yang tentunya akan membawa dampak-dampak negatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan membagikan kuisioner pada setiap sekolah. Hal tersebut digunakan demi memperoleh data berupa gambaran perubahan sikap yang terjadi. Hasil yang diperoleh adalah kebenaran dari hipotesis yaitu adanya pengaruh kemajuan teknologi dengan perubahan sikap anak SD (Sekolah Dasar). Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam upaya menekan laju perubahan perilaku anak usia dini menjadi solusi yang ditawarkan sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi.

Abstract

This study discusses mengenai change of attitude occurred in elementary school children (elementary school) like (already know the make-up, going out, can ride a motorcycle). The study was conducted at four elementary schools in the District Dalisodo Village Wagir Malang. SDN Bedalisodo I, II, III, IV. Of course, attitudes described should not happen if they see their age an average of 12-15 years. This shift is motivated by a fundamental phenomenon of globalization. Globalization brings progress in all things one of which is technology. This technology led to changes in attitude at the elementary school children which would bring negative impacts. The method used is quantitative method by distributing questionnaires in each school. It is used in order to obtain the data in the form of a picture change of attitude occurred. The result is the truth of the hypothesis that the influence of technological advances with changing attitudes elementary school children (elementary school). Participatory

* Alamat korespondensi
inkalaily19@gmail.com

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses perkembangan yang menjadikan batasan menjadi kabur, pada perkembangan budaya, ekonomi maupun politik. Pada kali ini akan dibahas lebih fokus terhadap perubahan budaya yang diakibatkan karena perkembangan teknologi. Yaitu pada budaya sikap, pola pikir atau karakter seorang anak khususnya pada jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar). Anak-anak pada jenjang SD adalah seorang anak yang belum dapat menentukan hal yang baik dan buruk secara tepat atau sempurna. Mereka mudah terpengaruh oleh suatu hal yang baru. Misalnya pada perkembangan teknologi yaitu permainan modern (game), internet, televisi, kendaraan bermotor, dll. Mereka cenderung menelan bulat-bulat tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Artinya adalah mereka akan langsung menggunakannya tanpa mengetahui aturan atau batasan-batasan saat mereka menggunakannya. Begitu pula dengan dampak-dampak yang akan mereka terima, dampak positif maupun negatif. Tentunya pernyataan tersebut akan mengakibatkan banyak hal yang sebenarnya tidak diharapkan. Salah satu dampak yang tidak diharapkan adalah perubahan sikap mereka yang dianggap kurang baik. Seperti mereka sudah mengenal *make-up* (alat merias diri seperti kosmetik) untuk anak perempuan,

mengerti pacaran, dapat mengendarai sepeda motor dan perubahan sikap yang lainnya lagi yang sebenarnya belum seharusnya muncul pada usia tersebut.

Era globalisasi tentunya menjadi gejala yang memang harus terjadi dan dijalani meskipun banyak dampak negatif sebagai akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu, individu diharapkan lebih jeli dalam hal memilih dan memilah. Dengan tujuan untuk mencari dan memanfaatkan dampak-dampak positif dari perkembangan teknologi. Hal ini tentunya sulit bagi anak-anak yang masih pada jenjang SD. Mereka memerlukan pengawasan lebih dari pihak lain (keluarga, lingkungan tempat tinggal, guru). Diharapkan dari pengawasan ini mereka tidak akan salah memanfaatkan teknologi. Apalagi dikhawatirkan pula jika kesalahan tersebut berdampak pada nilai di sekolah atau semangat belajar mereka.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan penelitian kuantitatif yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengaruh kemajuan teknologi terhadap perubahan sikap anak SD (Sekolah Dasar) seperti sudah mengenal *make-up*, pacaran dan dapat mengendarai sepeda motor. Akan dapat diketahui pula faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan tersebut. Sekaligus dampak-dampak yang akan diperoleh akibat perubahan sikap seperti salah satunya akan dibahas motivasi belajar mereka. Penelitian

dilakukan pada 4 SDN di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur, yaitu SDN Bedalisodo I, II, III, dan IV.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan variable 1 adalah perubahan kemajuan

teknologi, variable 2 adalah perubahan sikap anak SD (sudah mengenal make-up, pacaran, dapat mengendarai sepeda motor), dan variable 3 adalah intensitas belajar siswa SD. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan siswa SDN Bedali-sodo I, II, III, IV yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Diterangkan dalam table 1 sebagai berikut.

Sekolah	Populasi	Sampel
SDN Bedalisodo I	132	15
SDN Bedalisodo II	124	15
SDN Bedalisodo III	150	15
SDN Bedalisodo IV	133	15
Jumlah		60

Sumber : Data Primer, 2016

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel siswa SDN Bedalisodo I,II,III,IV adalah menggunakan Random Sampling. Metode analisis data dengan cara menggunakan program PLS (*partyial least square*). Hipotesis yang dibuat sebelum penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis untuk hubungan Variable 1 dan 2

H0 : Kemajuan Teknologi tidak berpengaruh terhadap perubahan sikap anak SD (sudah mengenal make-up, pacaran, dapat mengendarai sepeda motor).

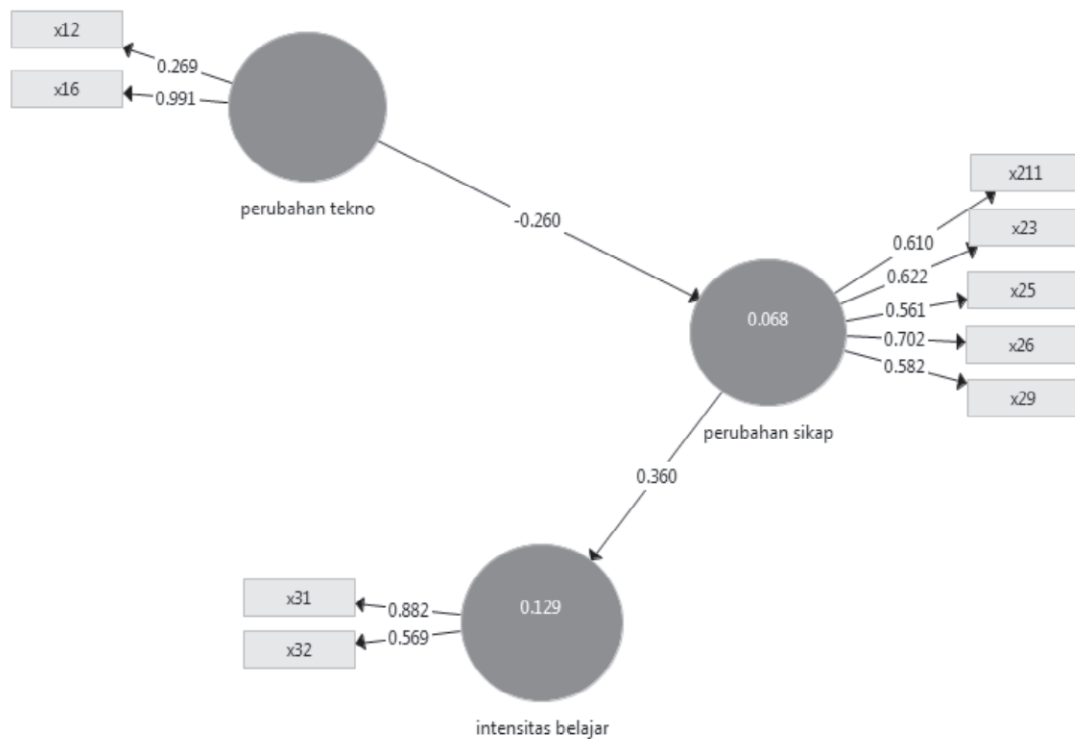
H1 : Kemajuan Teknologi berpengaruh terhadap perubahan sikap anak SD (sudah mengenal make-up, pacaran, dapat mengendarai sepeda motor).

Hipotesis untuk hubungan Variable 2 dan 3

H0 : Perubahan sikap tidak berpengaruh kepada intensitas belajar pada anak SD.

H1 : Perubahan sikap berpengaruh kepada intensitas belajar pada anak SD.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1.1. Output Model Pengukuran

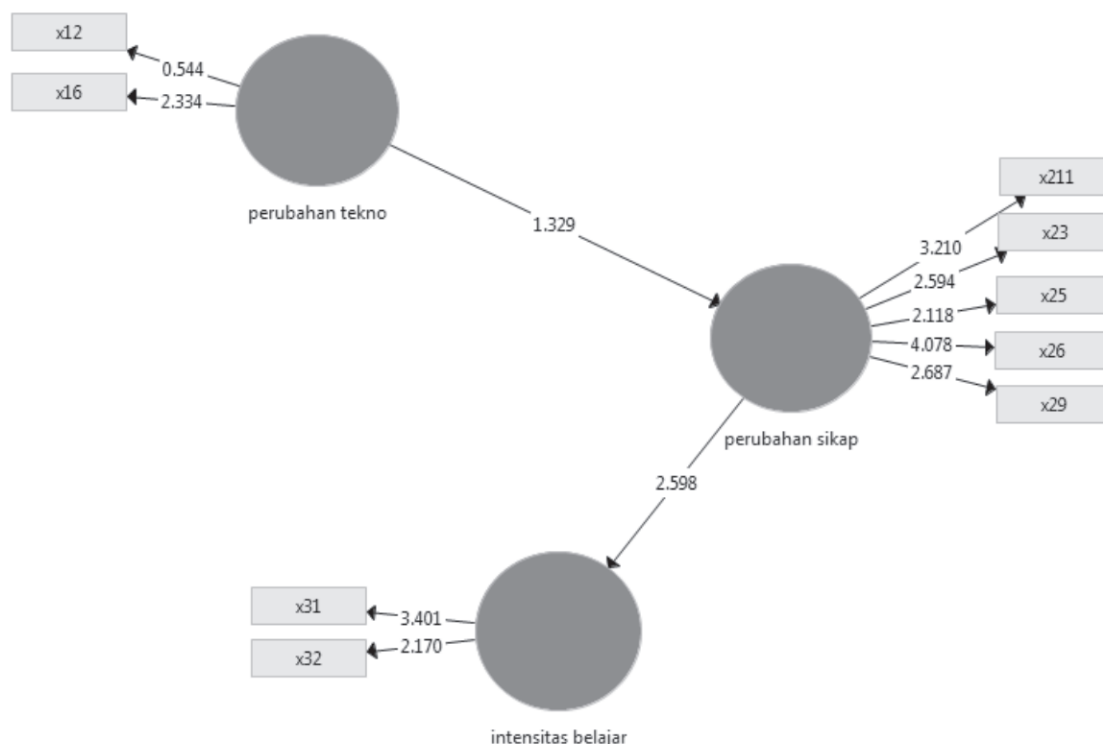
Sumber : Hair et al (2008), dan Santoso (2007)

Gambar di atas merupakan hasil analisis dengan program PLS. Tujuan dari gambar tersebut adalah untuk menunjukkan apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi persyaratan yang direkomendasikan sebagai variabel reflektor. Adapun besarnya nilai parameter faktor *loading* minimal yang masih dalam batas penerimaan mengacu pada pendapat Hair et. al (2008) dan Santoso (2007). Hair et al. (2006) mengemukakan bahwa *rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor sebesar $\pm 0,3$ dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk *loading* sebesar $\pm 0,4$ dianggap lebih baik, dan untuk *loading* $> 0,5$ dianggap signifikan secara praktikal.

Sebenarnya ada banyak indikator dalam satu variabel, tetapi karena indikator tersebut menghasilkan angka negatif dan selain itu ada juga yang menunjukkan angka di bawah 0,3, maka *didelete* dari model. Dalam variabel pertama yaitu perubahan teknologi sebenarnya terdapat 6 indikator, yaitu kegiatan waktu senggang siswa (x11), asal siswa mengetahui internet (x12), sejak kapan siswa menggunakan internet (x13), waktu yang digunakan untuk mengakses internet (x14), siapa yang mendampingi siswa dalam mengakses internet (x15) dan respon orang tua terhadap internet (x16). Dari 6 indikator tersebut ternyata hanya ada 2 yang menjadi variable reflektor, yaitu x12 dengan hasil 0,296 dan x16 dengan hasil 0,991.

Sedangkan untuk variabel perubahan sikap terdapat 15 indikator, namun yang menjadi variabel reflektor hanya 5 indikator. Indikator tersebut ialah tentang kesanggupan siswa mengendarai sepeda motor (x23), sejak kapan siswa bisa mengendarai motor (x25), pengetahuan yang dimiliki siswa mengenai peraturan lalu lintas (x26), asal siswa mengetahui pacaran (x29) dan respon orang tua mengenai penggunaan make up oleh siswa (x211).

Hasil yang diperoleh dari indikator tersebut ialah 0,622 yang dimiliki oleh x23, lalu x25 dengan 0,561, x26 dengan 0,702, x29 dengan 0,582, sedangkan 0,610 untuk x211. Selanjutnya adalah untuk variabel intensitas belajar yang mempunyai 2 indikator. Indikator tersebut adalah waktu yang digunakan siswa untuk belajar (x31) dan cara mengatur jadwal belajar (x32). Hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut ialah x31 dengan hasil 0,882 dan 0,569 untuk x32.



Gambar 1.2. Output Model Struktural

Sumber : Hair er all (2008), dan Santoso (2007)

Gambar di atas gunanya untuk menunjukkan signifikan tidaknya pengaruh dari suatu variabel yang dianalisis. Evaluasi model struktural pada prinsipnya ditujukan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel atau pengujian hipotesis. Hubungan kausal yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh dari perubahan teknologi terhadap

perubahan sikap dan juga intensitas belajar siswa. Evaluasi model structural dalam PLS menggunakan R^2 untuk konstruk dependen dan koefisien *path* atau *t-value* tiap *path* untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Hubungan kausal antar konstruk tersebut dinyatakan signifikan jika nilai T-statistik lebih besar dari 1,64.

Dari hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa pengaruh perubahan teknologi terhadap perubahan sikap, tidak signifikan. Ini dikarenakan hasil yang ditunjukkan berada dibawah 1,64 atau lebih tepatnya hanya dengan hasil 1,329. Akan tetapi berbeda dengan pengaruh perubahan sikap siswa terhadap intensitas belajarnya karena menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu 2,598 atau tepatnya berada diatas 1,64.

Berdasarkan hasil uji analisis diperoleh bahwa T hitung lebih kecil dari 1,64. Dengan demikian maka rumusan H1 alternative ditolak. Dengan kata lain menerima H0 yang berarti bahwa kemajuan teknologi tidak akan berpengaruh terhadap perubahan *life style* (sudah mengenal make-up, pacaran, dapat mengendarai sepeda motor). Hubungan Variable 2 dan Variable 3 berdasarkan uji analisis diperoleh T hitung lebih besar dari 1,64. Dengan demikian maka rumusan H1 alternative diterima. Dengan kata lain menolak H0 yang berarti bahwa perubahan sikap berpengaruh kepada intensitas belajar pada anak SD.

Faktor yang Mempengaruhi dan Dampak-dampak yang akan Didapatkan Akibat Perubahan Sikap Anak

Kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Globalisasi dapat mengakibatkan suatu perubahan.

Dalam hal ini teknologi menjadi salah satu penyebab dari perubahan tersebut. Kemajuan teknologi ini bertujuan baik untuk masa depan peradaban manusia, salah satunya adalah internet. Internet adalah ibarat sebuah dunia, dimana di dalamnya semua ada, dari berita, informasi pengetahuan, pekerjaan, fashion, kuliner, dan game tentunya. Game ini adalah suatu pesona tersendiri bagi kalangan anak-anak di era ini, inilah salah satu yang menjadi perubahan sikap anak-anak khususnya jenjang pendidikan paling dasar yaitu SD. Mereka dapat mengakses internet dengan mudah menggunakan berbagai alat seperti komputer, warnet, dan bahkan di handphone. Seakan-akan internet sudah menjadi kebutuhan anak-anak ketika mereka merasa bosan dan dalam waktu senggang mereka akan memanfaatkan untuk mengakses internet untuk bermain game, sosmed atau hal lainnya. Tentunya orang tua harus berperan aktif dalam membentengi anak-anak mereka dalam mengakses internet, setidaknya mereka haruslah selalu berada di dekat anak saat mereka mengakses internet atau dengan kata lain selalu memantau penggunaan internet tersebut. Karena dalam internet berbagai informasi sangat mudah didapatkan, dikhawatirkan anak-anak akan memperoleh informasi yang harusnya belum mereka terima pada usia mereka misalnya seperti hal mengenai pornografi dan sebagainya.

Sama halnya seperti televisi, meskipun televisi sudah ada lembaga sensornya tetapi tentunya acara-acara yang disensor dalam acara yang identik dengan pornografi atau hal yang tabu. Akan tetapi, sebetulnya adalah sinetron-sinetron jaman

sekarang meskipun tidak berbau porno, sinetron tersebut mempunyai dampak negatif yang sangat luar biasa. Dampak negatif salah satunya adalah imitasi yang dilakukan anak-anak setelah menonton sinetron tersebut. Misalnya sekarang adalah sedang *booming* (hits) sinetron mengenai geng motor anak muda. Tentunya ini sangatlah tidak baik jika sampai ditiru oleh anak-anak yang tentunya mereka tidak berpikir panjang dahulu sebelum menirunya. Apalagi dalam sinetron tersebut banyak sekali adegan-adegan tawuran yang biasanya akan ditiru oleh anak-anak laki-laki. Sebaliknya untuk anak perempuan biasanya akan meniru gaya berpakaian pemeran artis yang mereka lihat, tentunya penampilannya sangatlah tidak sesuai dengan umur anak-anak yang akan meniru mereka. Satu hal lagi banyak sekali dalam sinetron-sinetron tersebut cerita pokoknya adalah mengenai percintaan. Hal ini adalah dampak yang terburuk dari kita salah memilih acara televisi saat bersama dengan anak-anak. Banyak anak-anak sekarang masih dalam usia yang belum remaja pun sudah tidak asing lagi dengan kata pacaran. Mereka seakan-akan menganggap bahwa pacaran adalah suatu yang biasa. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut sangat berbahaya bagi anak-anak. Karena mereka masihlah belum mengerti batasan-batasan atau aturan saat mereka melakukan sebuah hubungan pacaran.

Salah satu kemajuan teknologi yang berdampak negatif jika diajarkan pada anak yang memanglah belum pantas menerima pengetahuan tersebut. Sepeda motor adalah suatu kemajuan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena dengan adanya sepeda motor tersebut,

tentunya akan memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu kala seorang yang ingin melakukan perjalanan haruslah berjalan jauh terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, tidak dengan sekarang manusia akan lebih cepat dalam melakukan suatu perjalanan dan tentunya waktu yang digunakan juga singkat dengan adanya sepeda motor tersebut. Hal ini akan ada suatu kebalikan, yang tadinya memang bertujuan demi kebaikan sekarang berubah menjadi suatu keburukan karena salah penempatannya. Artinya salah penempatan disini adalah yang seharusnya sepeda motor tersebut dirancang untuk seorang yang sudah dewasa dalam jasmani dan rohani. Sekarang tidak, karena kesibukan dari para orang dewasa khususnya para orang tua. Anak-anak mereka di ajari mengendarai sepeda motor demi keperluan mereka dan jika para orang tua tersebut tidak bisa mengantarnya. Suatu missal adalah berangkat sekolah, tak jarang dilihat pada jaman sekarang siswa-siswi berangkat sekolah mengendarai sepeda motor sendiri tanpa diantar orang tua mereka. Parahnya lagi siswa tersebut bukan hanya pada jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas). Akan tetapi, juga siswa pada jenjang yang masih dasar yaitu SD (Sekolah Dasar). Padahal sudah jelas pada peraturan per UU-an lalu lintas bahwa seorang yang mengendarai sepeda motor haruslah memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan tentunya SIM tersebut didapatkan setelah umur mencapai batas minimal 17 tahun. Dari hal tersebut tentunya sudah mengajarkan anak-anak mengenai melanggar atau tidak mematuhi peraturan per-Undang-Undangan.

Kedua peraturan tersebut dibuat pastinya mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Salah satunya adalah usia anak-anak tentunya mereka mempunyai bentuk fisik yang dominan kurang tinggi dan besar yang nantinya akan berdampak pada pengendalian sepeda motor tersebut tidak secara maksimal.

Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam upaya menekan laju perubahan perilaku anak usia dini menjadi solusi yang ditawarkan sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi pada anak SD. Maksudnya pemberdayaan di sini adalah melakukan sosialisasi dengan cara mengadakan kegiatan masyarakat, seperti gotong royong desa, kegiatan keagamaan, diskusi pada saat jaga malam atau lain-lain.

Dari situlah akan disisipkan materi, khususnya kepada orang tua mengenai bagaimana caranya mencegah pengaruh negatif perkembangan teknologi melalui pengetahuan mengenai antara lain:

1. **Fungsi afeksi** seharusnya selalu ada dalam sebuah keluarga agar menjalani hidup dengan normal, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani maupun juga rohani. Fungsi inilah yang nantinya akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara suami dan istri, anak terhadap orang tua, adik kepada kakak dan sebaliknya. Fungsi ini menjadi penting karena dapat mencegah penyimpangan sosial, bila fungsi ini tidak berjalan maka anak tidak memiliki teladan dalam keluarga sehingga anak mencari kesenangan melalui teknologi.
2. **Fungsi dari pengawasan** yaitu untuk mengawasi perilaku seluruh anggota keluarga. Pengawasan ini sangat penting mengingat dalam keluarga selalu tumbuh permasalahan apabila tidak ada kontrol sosial yang berdampak fatal. Jadi disini dapat ditekankan bahwa orang tua harus mengawasi perkembangan anaknya, suami dan istri juga harus saling mengontrol bahkan anak terhadap orang tua juga harus saling mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam keluarga.
3. **Fungsi proteksi**, orang tua mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak-anaknya. Dalam situasi yang aman, orang tua mampu mengarahkan anaknya ke arah yang baik bagi masa depan anak. Mengingat peranan keluarga yang menanggung resiko kebaikan dan keburukan atas dampaknya.
4. **Fungsi pendidikan**, jelas bahwa keluarga adalah tempat pertama anak untuk bersosialisasi. Dimana dalam keluarga tersebut mengajarkan cara berjalan, makan, memakai baju, hingga dikenalkannya nilai dan norma yang baik dalam masyarakat nantinya.
5. **Fungsi rekreasi** berarti keluarga sebagai tempat rekreasi setelah seharian dengan aktivitas tiap anggotanya. Intinya adalah setelah seharian melakukan aktivitas, keluarga adalah tempat yang paling awal agar dapat menghibur atau menghilangkan beban yang ada sehingga anak merasa nyaman tanpa *gadget*.
6. **Fungsi keagamaan**, jadi keluarga merupakan pusat pendidikan ibadah agama bagi para anggotanya. Agama

digunakan sebagai identitas sosial dan juga sekaligus pengatur manusia dalam hidup untuk menuju akhirat yang diinginkan.

KESIMPULAN

Hasil laporan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemajuan teknologi dengan perubahan sikap anak SD. Akan tetapi, pengaruh yang dijelaskan sebelum penelitian seperti yang pertama yaitu mengenai imitasi daripada anak-anak setelah melihat sinetron. Imitasi berupa tiruan gaya, sikap dan tingkah laku seperti cara berpakaian, memakai make-up yang tentunya sikap tersebut belum pantas mereka lakukan di usia yang bahkan belum mencapai remaja. Kedua adalah mengenai internet yang di dalamnya banyak sekali informasi dari yang bermanfaat sampai yang berbahaya. Beberapa perkiraan di atas dapat dibantah karena tidak cocok digunakan dalam realitas sosial anak SD pada wilayah penelitian. Ini dikarenakan imitasi yang disebutkan adalah dari orang-orang ada disekitar mereka, seperti saudara atau teman mereka sendiri. Artinya hanya minoritas anak SD yang mengerti internet dan kemudian teman yang lainnya mengikuti sikap-sikap seperti yang sudah di bahas di atas. Dengan demikian perlunya peran orang tua secara aktif mengontrol atau mengawasi setiap anak mereka mengakses internet. Ketiga adalah kemajuan teknologi transportasi berupa sepeda motor. Sepeda motor yang seharusnya digunakan oleh orang dewasa, tetapi karena kesibukan orang tua

sang anak diajarkan berkendara meskipun belum cukup umur mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhyati, Arifah Mz, 2012. Pengaruh Internet Terhadap Kenakalan Remaja, SNAST Periode III Institut Sains & Teknologi AKPRIND, Yogyakarta.
- Indra, 2006. *Cool Habits*. MedPress, Yogyakarta.
- Jogiyanto, Abdillah, Willy, 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS Untuk Penelitian Empiris*. BPFE, Yogyakarta.
- Priyanta Andri, 2012. *Parenting di Dunia Digital*. Jakarta : Gramedia.
- Setiawan, Jerry, 2014. *Latar Belakang Perilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa SIM (studi kasus pelajar SMPN 11 Samarinda)*. eJournal Ilmu Sosiatri, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mulawarman.
- Sella, Yessi Paradina, 2013. *Analisa Perilaku Imitasi Dikalangan Remaja Setelah Menonton Tayangan Drama Seri Korea di Indosiar (Studi Kasus Perumahan Pondok Karya Lestari Sei Kapih Samarinda)*. eJournal Ilmu Komunikas, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman.



OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI SINERGI PROGRAM PUAP, GAPOKTAN, DAN DESA MANDIRI PANGAN (STUDI KASUS DI BEBERAPA DESA DI KABUPATEN GROBOGAN)

Eko santoso

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNNES

Umi Erniasih

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Demapan, Gapoktan, PUAP,

Community Empowerment

Abstrak

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Adapun persamaannya antara lain: sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya, program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP, Gapoktan, dan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi ketiga program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Hal ini berdasarkan studi kasus yang ada di beberapa desa di wilayah Kabupaten Grobogan.

Abstract

Community empowerment program that aims to alleviate poverty in the countryside, in principle, has many similarities. This is seen in PUAP, Gapoktan and Demapan program. As for the similarities among others: village-based, implemented by community groups, obtain agriculture and non-agriculture venture, establishment of micro-finance institutions at the village, and guided by extension workers and facilitators. In the implementation, the program had experienced many problems and to overcome these coordination is needed by synergizing PUAP, Gapoktan, and Demapan program. Synergies and integrations of the programs cover several aspects, namely: (1) begins with the synergy of data, the election of program recipients village; (2) internal arrangement of institutional programs; (3) strengthening of infrastructure development with the goal of

accelerated poverty reduction; and (4) anticipation of synergy implementation of the three programs in the field. By optimizing these four aspects, it is expected that acceleration of the development of agriculture and rural economy that lead to poverty alleviation can be realized. It is based on case studies that exist in some villages in the district of Grobogan.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- santosoeko24@yahoo.com
- erniumiasih@ymail.com

PENDAHULUAN

Pertanian perdesaan saat ini dihadapkan pada tiga masalah besar yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan, dan kerusakan sumberdaya pertanian (Pranadji, 2004). Salah satu kebijakan holistik untuk mengatasinya adalah implementasi program pemberdayaan masyarakat desa yang mengarah kepada kemandirian; kesinambungan dan keberlanjutan. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan dan ikut dalam perencanaan program akan menghasilkan kemandirian yang tinggi (Mubyarto, 1984; Sajogyo, 1982).

Banyak program parsial sektoral yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat perdesaan. Dalam kenyataannya. Sebagian besar proyek tidak mencapai tujuan secara maksimal dan tidak berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut (Rahayu, 2006), antara lain: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan; (2) paket proyek

tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung; (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana; (4) tidak ada kelembagaan ditingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan proyek. Pembentukan Kelembagaan baru yang coba dibentuk bersifat “*top down*”, sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan umumnya keberlanjutan kelembagaan baru tersebut sangat rendah.

Demikian halnya dengan apa yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Grobogan. Tidak adanya keberlanjutan program dan juga tatanan kelembagaan yang tidak berjalan optimal menjadikan beberapa program pemerintah dalam rangka pengembangan desa seperti, Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K); Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani); Program Desa Mandiri Pangan (Demapan); dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), tidak mampu memberikan hasil yang maksimal. Selain itu tidak terjadinya integrasi diantara program-program tadi membuatnya seakan berjalan secara terpisah pada lokasi yang berbeda-beda sehingga tidak mampu mengatasi masalah pedesaan secara kompleks.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan melihat kondisi dari objek penelitian serta menganalisa dari objek penelitian sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan untuk mencapai konsep perancangan yang ideal. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

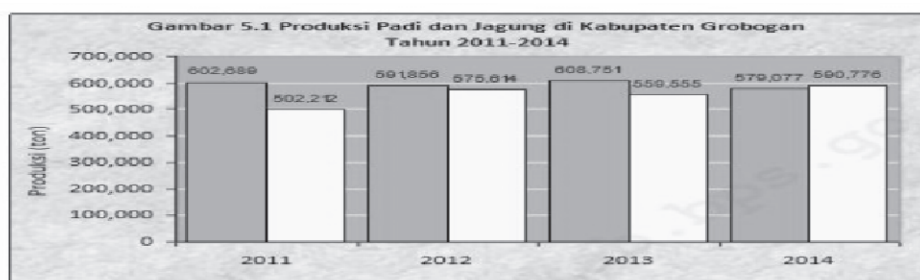
Teknik dan alat pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi dengan menggunakan pedoman observasi berupa catatan tertulis, teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara berupa catatan tertulis, serta teknik dokumentasi dengan menggunakan pedoman dokumenter berupa buku catatan. Sumber informasi yang dijadikan subjek penelitian antara lain, sumber wawancara :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Grobogan.
2. Warga desa di beberapa wilayah desa di kabupaten Grobogan (Desa Sumberagung, Prigi, Krongen, Crewek, Asemrudung, Karanganyar, dll).

Teknik analisis meliputi prostestahapan meringkas (*reduksi*), memaparkan (*display*), dan menyimpulkan (*verifikasi*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 1.402.760 jiwa atau terbesar kedua setelah Cilacap. Sebagian besar penduduknya ($\pm 53\%$) bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung lahan pertanian Kabupaten Grobogan yang cukup luas yaitu sekitar 197.586 Ha yang terdiri dari lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Seiring berkembangnya zaman beriringan dengan munculnya berbagai program pemerintah salah satunya yaitu dibidang pertanian seperti Demapan dan PUAP yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Maka, Kabupaten Grobogan mengajukan beberapa desa untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Bermodalkan lahan pertanian luas untuk diterapkannya program Demapan dan PUAP menjadikan Kabupaten Grobogan mengalami kemajuan. Meskipun demikian capaian Pelaksanaan Urusan Pertanian Kabupaten Grobogan pada tahun 2011-2014 mengalami pasang surut, seperti pada tabel:



Namun yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah yaitu masih terdapatnya beberapa desa di Kabupaten Grobogan yang belum merasakan adanya program pemerintah tersebut, diantaranya yaitu Desa Sumberagung; Desa Prigi; Desa Crewek; Desa Krongen. Selain itu, masih

terdapat 30 desa yang masih rawan pangan. Mensinergikan antara Demapan dan PUAP akan menjadi solusi tersendiri untuk mengejar ketertinggalan atas kemajuan-kemajuan desa-desa lain yang berada di Kabupaten Grobogan.

Daftar Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan di Grobogan tahun 2007 - 2015

007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pengajuan 42 desa	T.Prsiap 42 desa	T.Prtumbuh 42 desa	T.Pngembang 42 Desa	T.Kemandiri 42 desa	(25 desa) T.Kmandiriane (15 desa) T.Pngembang Total: 92	(25 desa) T.Kmandiri (15 desa) T.Pnumbuh Total: 92	(15 desa) T.Pngembang Total: 92	(15 desa) T. Mandiri (4 desa) T. Prsiapan Total: 96
Total: 42 (42 Desa) T.persiapan		T.Persiapan Total: 42 (42 desa) T.Prtumbuha	T.Penumbuhan T. Persiapan 25 desa Total: 67 (25 desa) T. Persiapan (42 desa) T.Pngembang	T.Pngembang T.Pnumbuh 25desa T.Prsiapan Total: 67 (25 Desa) T.Penumbuh (42 Desa) T. Mandiri	T.Kmandiri T.Pngembang 25 desa T.Pnumbuh T.Prsiapan 15 desa	T.Kmandiri 25 desa T.Pngembang T. Penumbuh 15 desa	T.Kmandiri T.Pngembang 15 desa	T.Kema- dirian 15 desa
						T. prsiapan	T.Penumbuh T.Persiapan	T.Pngm- bangan T.pnum buhan T. Persia- pan 4 desa

Hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan sektor pertanian di beberapa desa di Kabupaten Grobogan, berdasarkan observasi dan studi pustaka (Rachman, *dkk*, 2010) terdapat temuan bahwa :

1. Dalam operasionalnya, pengembangan kelompok afinitas (KA) dan pembangunan ekonomi perdesaan membutuhkan dukungan lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pendanaan yang mencakup pengembangan kelembagaan, aktivitas pemberdayaan, dukungan sarana-prasarana dengan sasaran pemantapan

2. ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Eksistensi dan keberlanjutan Demapan sangat ditentukan oleh pengembangan infrastruktur publik dan kehadiran serta peran swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial-kelembagaan dalam perspektif pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi perdesaan yang selama ini belum maksimal.

Sedangkan penyaluran Program PUAP di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Dana PUAP di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2009-2014

No.	Tahun	Jumlah Gapoktan penerima Dana PUAP	Jumlah dana
1	2009	35	3.500.000.000,-
2	2010	32	3.200.000.000,-
3	2011	47	4.700.000.000,-
4	2012	26	2.600.000.000,-
5	2013	20	2.000.000.000,-
6	2014	11	1.100.000.000,-
	Total	171	17.100.000.000,-

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2014

Rivai pada tahun 2010 melakukan evaluasi PUAP dan menemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu: (1) kinerja input : calon lokasi desa penerima PUAP belum seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk nomenklatur, hirarki wilayah, serta persyaratan Gapoktan dan pengurusnya. Belum dikembangkan lembaga keuangan mikro, pengurus Gapoktan, penyuluh pendamping dan PMT perlu ditingkatkan pemahaman dan ketrampilannya. Penggunaan dana PUAP dinilai belum berhasil dalam mengembangkan modal PUAP yang diberikan sebagai *seed capital*. (2) kinerja proses: terbatasnya dana operasional sehingga penyuluhan dari Tim Teknis kabupaten terbatas, peningkatan keterampilan penyuluh pendamping tidak maksimal karena kurangnya pelatihan, pengembangan keuangan di gapoktan tidak maksimal, serta jaringan pemasaran yang lemah.

Hasil evaluasi awal ini mengindikasikan kompleksitas permasalahan implementasi PUAP. Dalam rangka efektifitas pemanfaatan dana pembangunan dan efektifitas kinerja program pemberdayaan

dinilai strategis untuk melakukan optimalisasi program pemberdayaan melalui sinergi program PUAP dengan program Demapan.

SINERGI PROGRAM PUAP DENGAN DEMAPAN

Menggabungkan program PUAP dengan Demapan tidak akan menabrak rambu-rambu yang sudah disepakati. Program Demapan dalam tataran operasional terkait dengan upaya memantapkan program pemberdayaan kelompok miskin (kelompok afinitas), mensinergikan dan mengintegrasikannya dengan pembangunan ekonomi perdesaan. Dengan demikian pembangunan Demapan membutuhkan dukungan lintas sektoral dalam pemberdayaan kelompok dan pembangunan di tingkat desa. Saat ini program demapan sendiri tidak lagi melakukan penambahan desa, tercatat hingga tahun 2015 terdapat 3.260 desa, 429 desa pada tahap kemandirian di 316 Kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan desa yang mendapatkan program PUAP selama setahun rata-rata 10.000 desa dimulai sejak 2008. Di Grobogan sejauh ini ada 92 Desa Pangan

Mandiri dan 171 desa Program PUAP. Sinergi dan integrasi PUAP dengan Demapan melalui beberapa aspek,

1. Demapan sebagai Basis Lokasi Program

Desa Mandiri Pangan yang sudah memasuki tahap kemandirian (tahun ke -4) diharapkan dapat menggerakkan sendiri aktifitas kelompoknya. Pada tahapan ini, desa sudah memiliki Gabungan Kelompok Afinitas, Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Tetapi untuk tenaga pendampingan sudah tidak berlaku lagi. Program PUAP dapat melibatkan desa ini dengan alasan :

- a. Desa ini sudah memiliki kelompok afinitas yang bisa menjadi cikal Gapoktan. Artinya untuk membentuk kelompok tani yang menjadi kaharusan agar dapat memperoleh bantuan program PUAP;
- b. Selain itu desa ini sudah ada lembaga formal yang terbentuk seperti LKD dan TPD. Adapun lembaga-lembaga tersebut intinya adalah membantu anggota kelompok afinitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga ini bisa memberikan masukan tentang calon penerima dan jenis kegiatan yang akan dibiayai PUAP;
- c. Untuk memperkuat permodalan kelompok. Meskipun sudah dapat dana bantuan tetapi pada hakekatnya dana tersebut relatif kecil dan terbatas dalam upaya mendukung peningkatan skala ekonomi atau usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Dana PUAP dapat juga dipergunakan untuk menggalang satu tenaga pen-

damping. Tenaga tersebut bisa dari tenaga pendamping sebelumnya yang habis masa kontraknya (4 tahun) atau dari tenaga baru. Intinya tenaga yang dipilih dapat menggerakkan serta memotivasi anggota kelompok dan menyampaikan informasi atau aktifitas kelompok dengan masyarakat diluar kelompok baik dalam desa maupun diluar desa.

2. Mendukung Desa Binaan Desa Mandiri Pangan

Pada saat desa mandiri atau desa inti membina desa lain atau desa plasma, program PUAP dapat diikutsertakan untuk membina desa plasma tersebut. Desa mandiri pangan dapat dijadikan contoh untuk desa lain, sehingga tujuan dari program PUAP dapat diwujudkan.

3. Penataan Kelembagaan Internal Program

Kelembagaan desa yang terlibat dalam program ini adalah gabungan kelompok afinitas, tim pangan desa, lembaga keuangan desa, penyuluh pendamping, penyelia mitra tani dan kelompok tani baru yang terbentuk akibat adanya program PUAP. Dana program PUAP dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan internal dalam bentuk pelatihan pra dan pelatihan teknis pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tenaga pendamping. Dana juga dapat dialokasikan untuk peningkatan pemahaman sistem ketahanan pangan bagi Tim Pangan Desa (TPD), pelatihan pengelolaan keuangan bagi Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan

pelatihan pengelolaan data base bagi aparat pengelola Demapan.

a. Kelompok Afinitas sebagai Basis Gapoktan

KA baru mulai mendapatkan pinjaman modal usaha umumnya ditahun kedua. Dengan adanya dana PUAP maka modal tersebut bisa digunakan untuk pelatihan didalam pembukuan internal KA dengan tujuan semua anggota tahu perkembangan dana kelompok. Keanggotaan KA kemudian dapat dibentuk menjadi Gapoktan. Pelatihan usaha dengan modal dari PUAP seperti mengatasi serangan hama penyakit tanaman dan ternak, adopsi teknologi produk olahan, pengemasan produk dan pengembangan diversifikasi serta jejaringpemasaran dapat dilakukan.

b. Petugas Pendamping=PMT

Petugas pendamping waktunya sampai pada tahap mandiri atau empat tahun. Dalam pelaksanaannya meskipun desa mandiri pangan sudah memasuki tahap mandiri, tetapi dalam kenyataannya belum sepenuhnya mandiri. Artinya peranan petugas pendamping masih dibutuhkan untuk membina kelompok afinitas. Dengan adanya dana PUAP diharapkan petugas pendamping diberikan kesempatan lagi untuk melakukan pendampingan sampai desa tersebut benar-benar mandiri dan berkelanjutan. Tentunya dengan dukungan dari PMT (Penyelia Mitra Tani) selaku kelembagaan wajib program PUAP.

c. Lembaga Keuangan Desa = Lembaga Keuangan Mikro

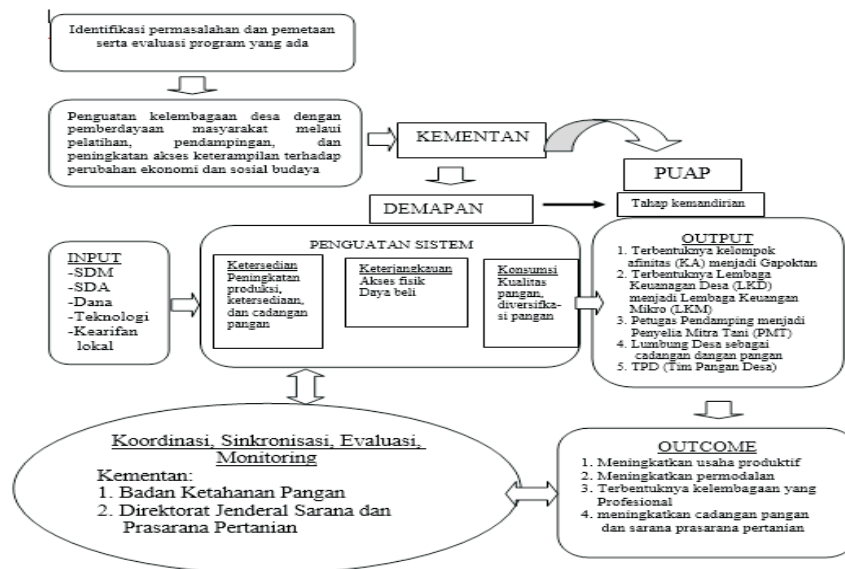
Lembaga Keuangan Desa di Desa Mandiri Pangan dan Lembaga Keuangan Mikro di PUAP sama-sama merupakan hasil akhir dari kegiatan dan lembaga ini diharapkan bisa mengelola keuangan Kelompok Afinitas maupun Gapoktan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya program Demapan yang masuk tahap kemandirian sudah mendirikan lembaga keuangan desa. Dengan adanya dana program PUAP diharapkan dana tersebut masuk kedalam lembaga keuangan desa sebagai tambahan modal usaha anggota dan antisipasi pengembangan usaha kelompok agar lebihberagam.

d. Tim PanganDesa (TPD)

TPD memiliki fungsi koordinasi dalam pembangunan wilayah desa, mengintegrasikan kegiatan pembangunan desadengan program Demapan, serta mengawasi Kelompok Afinitas dan menggantikan fungsi tenaga pendamping. Tugas tenaga pendamping antara lain memberikan motivasi dan fasilitasi inovasi dalam menggerakkan usaha, dan ikut terlibat dalam memasarkan produk-produk olahan Kelompok Afinitas. Dalam pelaksanaannya tidak semua desa memiliki TPD dengan kinerja seperti yang diharapkan. Dengan adanya bantuan dana PUAP diharapkan dapat mendukung operasional dan kegiatan TPD sehingga dapat berperan secara efektif dalam mendukung program

pemberdayaan dan mensinergikannya dengan pembangunan pertanian dan

ekonomi perdesaan. Peta konsep sinergi Program PUAP dan Demapan:



KESIMPULAN

Mendirikan kelembagaan bukanlah pekerjaan yang mudah baik dari sisi pembentukan awal maupun dari sisi menjalankan kelembagaan itu sendiri. Dibutuhkan waktu untuk bisa memantapkan eksistensi kelompok miskin dan kelembagaan terkait lainnya dengan sasaran pemberdayaan masyarakat miskin dan menumbuhkan ekonomi perdesaan.

Mensinergikan program PUAP dengan Demapan di beberapa desa di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan sinergitas program PUAP dalam mendukung Demapan tetap dalam kendali Badan Ketahanan Pangan, namun kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan efektifitas penggunaan dana PUAP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian. Dana program

PUAP tersebut dapat dipergunakan untuk memantapkan tingkat kemandirian dan memfasilitasi desa binaan Demapan dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Demapan bisa dikategorikan sebagai salah satu program yang akan mensukseskan program PUAP, dengan cara melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa Demapan khususnya di beberapa desa di Kabupaten Grobogan yakni Desa Sumberagung, Prigi, crewek, dan Krongen.

DAFTAR PUSTAKA

- BKP.2014. *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- Departemen Pertanian. 2014. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta: Deptan Press.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Rahayu, B.A. 2006. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandar Institute.
- Rivai, R.S., dkk. 2010. *Laporan Hasil Penelitian Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2010*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rachman, B., dkk. 2010. *Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di Tingkat Rumah Tangga dan Wilayah Perdesaan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

MODEL IMPLEMENTASI DESA ARGO-EKOWISATA DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMPELGADING)

Rohmatul Khasanah

Universitas Negeri Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Agro-ecotourism, Tourism,

Ampelgading

Abstrak

Pariwisata dewasa ini mempunyai peranan yang vital dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur pariwisata dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sebagai daerah yang mempunyai kekayaan alam dan khasanah budaya yang luar biasa, juga mempunyai potensi untuk dijadikan kawasan agro-ekowisata. Letak geografis yang terdiri dari pegunungan dan tanah miring menjadi potensi yang unik untuk implementasi desa agro-wisata. Konsep agro-ekowisata bisa dijadikan alternatif dalam kebijakan pembangunan pariwisata. Konsep agro-ekowisata menghubungkan antara kearifan alam, kearifan budaya dan kearifan sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan di bidang pariwisata guna membentuk kemandirian ekonomi daerah. Metode yang digunakan pada konsep agro-ekowisata menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mengimplementasi model desa argo-wisata yang berbasis wisata pertanian dan sosial budaya. Dengan model yang telah dirumuskan diharapkan ke depannya pemerintah dapat menjadikan pendoman perumusan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan di bidang pariwisata guna membentuk kemandirian ekonomi daerah

Abstract

Tourism nowadays has a vital role in the development and growth of the local economy. However, the development of tourism infrastructure regarded as one of the causes of environmental damage. Ampelgading Malang as the area has a wealth of natural and cultural treasures which was biasah, also have the potential for conversion to agro-ecotourism. Geographical location consisting of mountains and sloping ground into the unique potential for the implementation of agro-tourism village. The concept of agro-ecotourism could be an alternative in tourism development policies. The concept of agro-ecotourism links between natural wisdom, wisdom and social wisdom. The purpose of this research is to take policies in the context of development in the field of tourism to form regional economic independence. The method used in the agro-ecotourism concept uses a qualitative approach, with the aim of implementing the model village agro-based tourism and socio-cultural tourist farms. With models that have been

formulated expected in the future the government can make pedomangambilan policy formulation and development in the field in order to establish economic independence pariwisata area.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- rohmatulkhasanah025@gmail.com
- adeirma@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara geografis Ampel Gading terletak di antara Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Pronojiwo Lumajang. Kecamatan Ampel Gading merupakan satu dari tiga puluh tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang mempunyai karakteristik dan khasanah budaya yang unik. Karakteristik tersebut tercermin dari kondisi alam, budaya dan sosial interaksi masyarakat. Kawasan Ampel Gading merupakan jalur utama lintas selatan menuju Kabupaten Lumajang. Hal itulah yang menjadi salah satu keuntungan tersendiri sebagai salah satu kawasan strategis perekonomian darat. Potensi sumber daya alam (SDA) di Kecamatan AmpelGading sangat mendukung dalam mengembangkan wilayah. Khususnya dalam mengembangkan kawasan Kabupaten Malang karena, Kecamatan Ampel Gading merupakan penyangga dari Taman Wisata Nasional Bromo- Tengger - Semeru. Secara topografi wilayah Ampel Gading terdiri dari pegunungan, dataran tinggi dan lahan miring dengan tingkat kemiringan yang tajam. Tingkat kemiringan tanah itu yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, kondisi yang demikian keadaan tanahnya cukup subur dan dapat mendukung

jalu pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Dengan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang dimiliki dapat dikelola menjadi sebuah pariwisata yang berbasis lingkungan, kebudayaan dan sektor pertanian. Perpaduan dari objek tersebut dapat dapat dikembangkan dalam sebuah konsep desa agro-ekowisata. konsep ini terdiri dari dua definisi yang berbeda tetapi mempunyai orientasi yang sama yakni sama-sama berorientasi terhadap kelestarian lingkungan. Argo menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya pertanian. Sedangkankan, ekowisata merupakan produk pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari gabungan berbagai kepentingan yang muncul dari kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan (Western, 1999; 2-3). Konsep agro-ekowisata dapat dijadikan sebuah konsep baru dalam dunia pariwisata Kabupaten Malang.

Dalam upaya implementasi konsep agro-ekowisata perlu kerjasama dengan berbagai pihak yakni Pemerintah Daerah (Perda), Pemerintah Desa (Perdes) dan masyarakat di Kecamatan AmpelGading. Dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Selain itu, perencanaan yang terintegrasi juga akan mengurangi dampak-

dampak yang tidak diharapkan baik pada saat ini maupun yang akan datang. Pemanfaatan potensi sumber daya alam sering kali tidak dilakukan secara optimal dan cenderung eksploitatif. Kecenderungan ini perlu segera dibenahi salah satunya melalui pengembangan industri pariwisata dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati berbasis pada pengembangan desa agro-ekowisata. Dengan adanya desa agro-ekowisata di Kecamatan Ampel Gading diharapkan bisa menjadi model percontohan kawasan agro-ekowisata dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Bab IV pasal 10 tentang pembangunan kepariwisataan. Bahwa perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu dengan sektor lain. Dengan adanya perda tentang pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan model pengembangan dan Implementasi desa agro-ekowisata di Kecamatan Ampel Gading

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kecamatan Ampel Gading berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Wajak di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kecamatan Tirtoyudo di sebelah barat dan Kecamatan Pronojiwo (Lumajang) di sebelah timur. Kecamatan Ampel Gading terdiri dari 13 desa dengan karakteristik yang khas dan unik. Jumlah penduduk penduduk mencapai 59.869 jiwa dengan kepadatan

penduduk sebesar 396 jiwa/km² (data kabupaten Malang dalam angka 2012). Kecamatan Ampel Gading memiliki lahan yang subur dengan karakteristik tanah yang sangat miring. Dengan kondisi yang demikian, memberikan peluang untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan kepariwisataan. Didukung dengan komoditas unggulan seperti salak pondo semeru di desa Tirtomarto dan durian di desa Lebakharjo. Kesuburan lahan tersebut akibat dari abu vulkanik dari Gunung Semeru serta curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Jumlah desa di Kecamatan Ampel Gading ada tiga belas desa.

1. Potensi Agro-ekowisata Kecamatan Ampel Gading

Dengan berbagai produk unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Ampel Gading, maka perlu dilakukan pelestarian dan juga pengembangan produk dan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah terbentuknya konsep agro-ekowisata. sebelum diterapkan Kawasan agrowisata yang sudah berkembang memiliki kriteria-kriteria, karakter dan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kawasan agrowisata merupakan suatu kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan.
- 2) Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi. Kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan

sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya sektor agro.

- 3) Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan. Berbagai kegiatan dan produk wisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

2. Prasyarat Kawasan Agrowisata

Pengembangan kawasan agrowisata harus memenuhi beberapa prasyarat dasar antara lain:

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang akan dijadikan komoditi unggulan.
- b. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrowisata, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan.

3. Model Pengembangan Agro-ekowisata

Agrowisata merupakan serangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensi pemandangan alam pertaniannya ataupun kekhasan aktifitas produksi dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kegiatan agro wisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan,

pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Disamping itu yang termasuk dalam agro wisata adalah perhutanan dan sumber daya pertanian.

Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan dan potensi pertanian, bilamana ditata secara baik dan ditangani secara serius dapat mengembangkan daya tarik wisata bagi satu daerah tujuan wisata. Agro wisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, memberikan desain lingkungan yang estetis bila dikelola dan dirancang dengan baik.

Dengan berkembangnya agrowisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain bahwa fungsi pariwisata dapat dilakukan dengan fungsi budi daya pertanian dan pemukiman pedesaan dan sekaligus fungsi konservasi. Upaya pengembangan agro wisata pedesaan yang memanfaatkan potensi pertanian, dan melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata (*community based tourism*). Pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah agro wisata yang dapat mengikutsertakan peran dan aspirasi masyarakat pedesaan selaras dengan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat pedesaan dibina secara berkesinambungan, agar potensi-

potensi yang dimiliki daerah digali secara optimal, sehingga dapat memberikan hasil maksimal bagi petani, masyarakat desa, pengusaha dan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Sejalan dengan itu perlu adanya pola pembinaan agro wisata agar para pelaku pariwisata dan pelaku pertanian secara sinergis dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan agro wisata yang bermanfaat bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Sedangkan pengembangan Ekowisata pada saat sekarang ini menjadi aktivitas ekonomi yang penting yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mendapatkan pengalaman mengenai alam dan budaya untuk dipelajari dan memahami betapa pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Pada saat yang sama ekowisata dapat memberikan *generating income* untuk kegiatan konservasi dan keuntungan ekonomi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ekowisata. Ekowisata dikatakan mempunyai nilai penting bagi konservasi dikarenakan ada beberapa hal antara lain:

1. memberikan nilai ekonomi bagi daerah yang mempunyai tujuan kegiatan konservasi pada daerah yang dilindungi.
2. memberikan nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk program konservasi di daerah yang dilindungi.
3. menimbulkan penambahan pendapatan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat disekitar lokasi ekowisata.
4. dapat mengembakan konstituen yang mendukung konservasi baik tingkat lokal, nasional dan internasional.

5. mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan
6. mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Kegiatan ekowisata sudah banyak diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan berbagai model pengembangan yang ada telah mampu mengangkat kemandirian perekonomian daerah. Dari sisi nilai tambah ekowisata, ada kemungkinan dalam implementasi program tersebut apabila tidak direncanakan dengan baik maka akan sebaliknya yang awalnya mendukung terhadap kelestarian lingkungan hidup malah menjadi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan hidup di daerah tersebut. Oleh karena itu dalam pengembangan ekowisata perlu adanya rencana pengelolaan yang mengacu kepada tujuan utama awalnya yaitu mendorong dilakukannya pengawetan lingkungan hidup, sehingga ekowisata perlu di rencanakan pengelolaannya dengan mengintergrasikan dalam pendekatan sistem untuk konservasi yang menggunakan desain konservasi.

Adapun model yang ditawarkan dalam implementasi adalah model desa agro-ekowisata berbasis massa, minat khusus dan lingkungan bisnis.

a. Model Pengembangan Pariwisata Massa

Kepariwisata global yang berkembang sangat pesat didorong oleh adanya *mass tourism*. Menurut Kodhyat (1992), pariwisata massa meliputi kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak, datang rombongan demi rombongan, dan berasal dari

berbagai tingkat sosial ekonomi. Pemikiran Kodhyat terutama menyangkut wisatawan dalam jumlah banyak, diperjelas lagi oleh Cooper (1993) yang mengutip pikiran Cohen yang membagi wisatawan massa menjadi dua jenis yaitu wisatawan massa yang terorganisir (*the organized mass tourist*) dan wisatawan massa yang individu (*the individual mass tourist*). Kedua jenis wisatawan ini masih tergantung terhadap keberadaan industri pariwisata yang ada.

Menurut Fauker (dalam Gunawan, 1997) pariwisata massa merupakan perkembangan pariwisata yang bercirikan jumlah wisatawan yang besar, pembelian paket wisata dan perjalanan wisata yang sangat diseragamkan, mencakup segala-galanya dan dalam kelompok besar. Secara perorangan wisatawan yang ikut dalam wisatawan massa.

Mengunjungi daerah tujuan wisata yang umum untuk bersantai, menikmati pemandangan dan kegiatan dengan siraman sinar matahari, tanpa terlalu banyak ditantang oleh pengalaman yang asli dan asing baginya. Mereka berupaya memperbanyak pengalamannya dengan memasukkan banyak daerah tujuan wisata dalam jadwal perjalanannya dan mereka sangat merasakan kebutuhan untuk memamerkan "kehebatan" wisatanya kepada teman dan kerabat di tempat tinggalnya. Sebenarnya kepariwisataan massa dapat membuka jalan untuk melahirkan kepariwisataan yang

berkualitas (Ismaningrum, 2005).

b. Model Pengembangan Pariwisata Minat Khusus

Kepariwisataan yang berkualitas atau disebut pariwisata baru oleh Faulker (dalam Gunawan, 1997) dikatakan sebagai : (1) wisatawan yang lebih canggih dan ber-pengalaman, (2) sangat suka merencanakan perjalanannya sendiri, dan (3) bepergian secara mandiri. Ciri yang lain adalah bersifat spontan, luwes dalam mengatur susunan perjalanan, lebih terdorong untuk mencari objek wisata dengan minat khusus seperti wisata tirta, petualangan, dan umumnya kaya dan mencari pengalaman yang asli (khas) dan perjalanan mereka singkat ke satu tujuan wisata saja. Bentuk pariwisata minat khusus diterjemahkan dari *Special Interest Tourism*. Bentuk wisata ini apabila dilihat dari wisatawannya merupakan pariwisata dengan wisatawan dengan kelompok atau rombongan kecil (Fandeli, 2002). Pariwisata minat khusus dapat terfokus pada dua aspek, yakni :

- Aspek budaya

Dalam aspek budaya, wisatawan akan terfokus perhatiannya pada tarian, musik, seni, kerajinan, pola tradisi masyarakat, aktivitas ekonomi yang spesifik, arkeologi dan sejarah.

- Aspek Alam

Dalam aspek alam, wisatawan dapat terfokus pada flora, fauna, geologi, taman nasional, hutan, sungai, danau, pantai, laut dan perilaku ekosistem tertentu.

Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan petualangan, dimana wisatawan secara fisik menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan, karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil, seperti kegiatan : *tracking, hiking*, pendakian gunung, *rafting* di sungai, dan lainnya. Pariwisata minat khusus ini juga dikaitkan dengan upaya pengayaan pengalaman atau *enriching* bagi wisatawan yang melaksanakan perjalanan ke daerah-daerah yang masih belum terjamah atau ke daerah yang masih alami.

c. Model Lingkungan Bisnis

Menurut Umar (2003:74) lingkungan bisnis dapat dibagi atas dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: Lingkungan Jauh dan Lingkungan Industri, sementara itu, lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Dalam mengkaji ketiga macam lingkungan ini Umar (2003:74-75) menyatakan bahwa lingkungan Jauh dapat dikaji melalui faktor-faktor PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi), lingkungan Industri dapat dikaji melalui aspek-aspek yang terdapat dalam konsep strategi bersaing (*competitive strategy*) dari Porter, serta lingkungan internal akan dikaji melalui beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan fungsional, rantai nilai (*value chains*),

kurva belajar/pengalaman (*learning curve*), dan *balanced scorecard*.

KESIMPULAN

Model pengembangan untuk implementasi desa agro-ekowisata mempunyai kriteria khusus. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil sebuah kebijakan dan pengembangan lebih lanjut. Dalam pengembangan agro-ekowisata diperlukan cara-cara pengelolaan, perusahaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, akan tetapi perlu diperhatikan dari aspek pelestarian alam jangan sampai dilaksanakan kegiatan pariwisata malah memberikan ancaman yang lebih banyak terhadap proses pelestarian. Dengan adanya model implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Damanik, J dan Weber, H.F, 2006 *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Haryanto, Joko Tri, 2014. *Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY*. Jurnal Kawistara Universitas Gajah Mada, volume 4 Nomor 3. Desember 2014.
- Inskeep, 1995. *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*.

Sudana, I Putu, 2013. *Srategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*. Jurnal Analisis pariwisata Universitas Udaya, volume 13 No 3

Yoeti, O.A. 2000. *Ekowisata: Pariwisata berwawasan Lingkungan Hidup*. PT Pertja. Jakarta.

<https://joecky.wordpress.com/2010/03/29/pencanaan-pengembangan-kawasan-agrowisata>



PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA MULYOAGUNG AKIBAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

Annisa Dwi Apsari , Lely Viki Fatmala dan Tesalonika Taradebora

Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

Mahasiswa Universitas Negeri Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

social change, development, the environment, TPST

Abstrak

Desa Mulyoagung Kabupaten Malang merupakan kawasan semi perkotaan yang menjadi tempat tujuan bermukimnya pendatang. Peningkatan volume sampah terutama sampah domestik yang diakibatkan peningkatan penduduk tidak dapat dihindari. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan merugikan lingkungan dan manusia. Permasalahan sampah yang terjadi di kawasan semi perkotaan perlu ditanggulangi melalui sebuah sarana pengolahan sampah. Salah satu usaha untuk menangani masalah peningkatan volume sampah di Desa Mulyoagung dilakukan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain untuk mengatasi permasalahan sampah, TPST ini juga bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Tulisan ini memfokuskan pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar TPST Desa Mulyoagung akibat pembangunan berwawasan lingkungan melalui TPST. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar TPST yang sebelumnya tidak bekerja, kini beralih menjadi pekerja di TPST tersebut dengan gaji yang stabil dan mampu mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi adanya TPST ini juga menimbulkan dampak negatif berupa konflik antara pihak TPST dengan warga sekitar karena udara tercemar oleh bau sampah yang tidak sedap.

Abstract

Mulyoagung village of Malang is a semi-urban area is a destination for migrants bermukimnya. The increase in the volume of waste, especially domestic waste as a result of population increase can not be avoided. Garbage is not managed properly will harm the environment and humans. Waste problem that occurs in semi-urban area needs to be addressed through a sewage treatment facility. One attempt to address the problem of increasing the volume of waste in the village Mulyoagung done through the Integrated Waste Management (TPST). In addition to addressing the problems of garbage, TPST is also aimed at reducing poverty. This paper focuses on social change in communities around the village TPST Mulyoagung due to environmentally sound development through TPST. The method used is qualitative method with a naturalistic approach through interviews and observations. The results showed that people around TPST

that previously did not work, now turned into workers TPST with a stable salary and able to meet their needs. But the existence of this TPST also had a negative impact of conflict between the parties TPST with local residents due to air polluted by garbage smell unpleasant.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- adwiapsari@gmail.com
- lelyviki6@gmail.com
- tesa_debor@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya pasti tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia, hasil-hasil dari organisme ataupun hasil proses alamiah. Seiring berkembangnya waktu, populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih sehinggabanyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil-hasil produksi dari berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Apalagi jika sampah-sampah tersebut tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, mengganggu dan merusak ekosistem, dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Meningkatnya aktivitas masyarakat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang

berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah semi perkotaan adalah pengolahan sampah. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan yang cepatakan menghadapi pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengolahan sampah dan biaya-biaya lingkungan. Permasalahan sampah yang terjadi di kawasan semi perkotaan perlu ditanggulangi melalui sebuah sarana pengolahan sampah. Dalam pengolahan sampah terdapat dua aspek, yaitu aspek teknis dan nonteknis. Teknis terdiri atas pewadahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir, daur ulang, dan pengomposan. Sedangkan aspek nonteknis terdiri atas keuangan, institusi dan instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, partisipasi pihak swasta, pungutan retribusi dan peraturan pemerintah (Nadisa,dkk., 2009). Salah satu bentuk usaha penanganan masalah peningkatan volume sampah di Desa Mulyoagung dilakukan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Desa Mulyoagung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terletak di antara Kota Malang dan Kota Batu. Berdasarkan letak Desa Mulyoagung yang berada di antara Kota

Batu dan Kota Malang, Desa Mulyoagung menjadi salah satu tujuan para pendatang untuk bermukim sehingga peningkatan sampah terutama sampah domestik pun tidak dapat dihindari. Penelitian ini berusaha menggambarkan pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Mulyoagung dan perubahan sosial masyarakat terkait isu lingkungan sampah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan, khususnya pada masyarakat Desa Mulyoagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Melalui penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti berusaha mendapatkan data tentang perubahan sosial masyarakat Desa Mulyoagung akibat pembangunan berwawasan lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara *Focus Group Discussion* (FGD). FGD yang peneliti maksud adalah peneliti melakukan *social mapping* dengan bertanya jawab pada narasumber yang telah dianggap memiliki informasi tentang berbagai aspek dalam lokasi penelitian. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah meliputi pengamatan mengenai kegiatan di TPST, meliputi *setting*, urutan kegiatan

pengolahan sampah di TPST, interaksi yang terjadi antara TPST dengan warga Desa Mulyoagung serta perubahan sosial yang diakibatkan oleh TPST terhadap warga Desa Mulyoagung. Analisis data, meliputi reduksi data, pemaparan data sampai pada penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik milik Lewis A. Coser. Menurut teori Coser, konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring berkembangnya waktu, populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil-hasil produksi dari berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia. Desa Mulyoagung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Jetis, Sengkaling, Dermo, Jetak, dan Jetak Ngasri. Desa ini terletak di antara Kota Malang dengan Kota Batu sehingga desa ini menjadi jalur utama untuk ke Kota Malang dari Kota Batu maupun sebaliknya. Keadaan geografis Desa Mulyoagung yang berada di daerah lereng gunung menyebabkan desa ini berhawa sejuk dengan suhu udara rata-rata 20° C. Akses menuju ke pusat kota juga tidak jauh dan sulit. Hal tersebut menjadi alasan para pendatang memutuskan untuk bermukim di Desa Mulyoagung sehingga secara berangsur-angsur kepadatan penduduk pun

mulai meningkat dan volume sampah terutama sampah domestik juga meningkat. Peningkatan kepadatan penduduk ini juga menyebabkan jenis mata pencaharian masyarakat Desa Mulyoagung mulai bervariasi tidak hanya sekedar petani saja seperti membuka usaha warung, bengkel, dan sebagainya. Akibatnya sampah yang dihasilkan juga mulai bermacam-macam. Peningkatan volume sampah ini tidak diiringi dengan pengolahan sampah yang baik dan efektif karena sebelum adanya TPST masyarakat desa membuang dan menimbun sampah di bantaran sungai Brantas sehingga berakibat pada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup ekosistem yang ada di Desa Mulyoagung.

Adanya berbagai masalah tersebut, maka melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung yang diketuai oleh Bapak F. Supadi mengusulkan untuk dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, sebagai bentuk usaha yang mengolah sampah agar memiliki nilai jual dan bermanfaat. Berdirinya TPST di Desa Mulyoagung tidak lepas dari dukungan masyarakat Desa Mulyoagung dan juga pemerintah Kabupaten Malang melalui PNPM Mandiri, APBD Pemkab Malang, APBN serta dibina oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dan mulai beroperasi pada awal Februari tahun 2011 dengan nama TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Usaha tersebut dilandasi oleh pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan di Desa Mulyoagung terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Pembangunan ber-

wawasan lingkungan sendiri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Proses kerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu berorientasi pada prinsip pengolahan 3R yakni *reduce, reuse, recycle* agar dapat tercapai program *zero waste* yaitu pemanfaatan limbah sampah secara maksimal pada masa mendatang. Prinsip-prinsip pengolahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: menerapkan strategi *Reduce – Reuse – Recycle* (3R) untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, meningkatkan skala pelayanan di perkotaan dan mengorganisasikan, pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir dengan efisien, menerapkan pembuangan sampah dengan *metode sanitary landfill* atau metode pengolahan lainnya yang ramah lingkungan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan (Kafiar, 2013). Untuk mencapai hal tersebut TPST menerapkan pembagian proses kerja yang terdiri dari beberapa zona dalam proses pengolahan sampah. Sebelum memasuki zona-zona pengolahan sampah di TPST, sampah dikumpulkan terlebih dahulu dari seluruh warga Desa Mulyoagung juga sebagian dari desa tetangga. Berdasarkan data dari pihak TPST, sampah-sampah yang terkumpul terdiri dari 39% sampah organik, 49% sampah anorganik, dan 12% residu. Setelah sampah terkumpul, pengolahan sampah pertama berada di Zona I yaitu tempat proses awal pemilahan sampah. Pada zona ini sampah dipilah berdasarkan jenis-

jenisnya yaitu sampah kaca atau beling, lapak keras, lapak kertas, lapak plastik, limbah nasi, serta pemilihan kompos dan residu. Setelah melalui proses pemilahan di Zona 1, sampah akan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya dan dilakukan pengepakan pada setiap lapak siap jual di Zona 2. Sampah-sampah tersebut terutama yang berupa sampah anorganik dilakukan pengepakan agar bisa dijual kembali sedangkan untuk residu diangkut kembali untuk dikirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain menghasilkan sampah daur ulang yang bisa dijual kembali, TPST ini juga mengolah sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dilakukan pengolahannya di Zona 3, sedangkan sampah organik yang berupa sisa limbah makanan diolah menjadi pakan ternak baik untuk peternakan di lingkungan TPST sendiri maupun dijual untuk peternakan yang ada di luar TPST. Pada pengolahan pupuk kompos di Zona 3, sampah dicampur dengan kotoran hewan ternak yang diambil dari peternakan yang berada di Zona 4. Pengolahan sampah dengan pengomposan merupakan cara penumpukan sampah pada lubang kecil dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pupuk yang alamiah atau proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap buangan organik yang *biodegradable* (Subandi, 2006). Pupuk kompos yang sudah ditimbang dan dibungkus ke dalam karung akan dijual dengan harga Rp. 500,00/kg. Hasil dari penjualan pupuk kompos dan sampah daur ulang tersebut menjadi salah satu sumber

pendapatan TPST untuk biaya operasional dan upah untuk pekerja.

Selain TPST 3R Mulyoagung Bersatu bertujuan untuk mencapai program pengolahan sampah *zero waste*, TPST ini juga bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Mulyoagung. Sejak berdirinya TPST ini warga Desa Mulyoagung yang awalnya tidak memiliki pekerjaan menjadi pekerja di TPST, namun ada juga pekerja TPST yang berasal dari desa lain yang tidak jauh dari Desa Mulyoagung. Sejauh ini terdapat 22 petugas angkut sampah, 50 pegawai operasional TPST, 3 staff administrasi, 3 linmas, dan 2 pengurus koperasi. Dari semua pekerja tersebut mendapat upah antara minimal Rp. 1.000.000,00 hingga maksimal Rp. 1.750.000,00 setiap bulan. Biaya untuk gaji pekerja diperoleh dari penjualan sampah daur ulang, pupuk kompos, serta iuran warga Desa Mulyoagung dan beberapa desa yang mengolah sampahnya di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Iuran warga berkisar mulai dari Rp. 5.000,00 hingga Rp 25.000,00 per rumah.

Meskipun TPST ini berdampak positif bagi lingkungan maupun warga Desa Mulyoagung, TPST juga menimbulkan dampak negatif bagi warga yang bermukim disekitar lokasi TPST. Bagi sebagian warga yang bermukim di sekitar lokasi TPST, bau sampah yang berasal dari TPST mengganggu kenyamanan warga. Tidak hanya bau sampah saja, lalat-lalat yang berasal dari sampah yang menumpuk di TPST juga berkeliaran ke pemukiman warga. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik diantara warga sekitar lokasi TPST dengan pihak pengelola TPST. Apabila dilihat dari teori konflik milik Lewis

A. Coser, konflik ini merupakan konflik realistik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. TPST sendiri yang seharusnya merupakan bentuk pembangunan berwawasan lingkungan malah menimbulkan kontradiksi yaitu adanya pencemaran udara dengan bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak TPST mengupayakan agar sampah yang baru tiba di TPST segera dipilah dan diselesaikan dalam waktu satu hari dengan mengerahkan seluruh pekerja dari zona lain dan dari petugas angkut sampah untuk membantu proses pemilahan agar tidak terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Sedangkan untuk mengatasi lalat.

pihak TPST menanggulangnya dengan cara membudidayakan ikan dengan membuat kolam ikan yang lokasinya berada di lingkungan TPST. Budidaya ikan tersebut berguna untuk mengurangi jumlah lalat karena setiap pagi banyak belatung yang ada di sekitar lokasi pemilahan sampah. Sebelum belatung tersebut menjadi lalat, belatung dikumpulkan dan digunakan sebagai pakan ikan sehingga jumlah lalat yang berasal dari belatung akan berkurang.

Berdasarkan hasil temuan di atas, penulis mencoba menganalisis permasalahan yang terjadi pada TPST Desa Mulyoagung menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah akronim untuk kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari lingkungan eksternal perusahaan. Analisis

SWOT, menurut Jogiyanto (2005) digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa:

- S : Pembangunan TPST Desa Mulyoagung merupakan suatu wujud pembangunan berwawasan lingkungan.
- W : Sampah yang menumpuk di TPST Desa Mulyoagung menyebabkan munculnya lalat dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
- O : Terjadi konflik antara warga yang tinggal di sekitar TPST dengan pihak pengelola TPST akibat lalat dan bau sampah yang tidak sedap.
- T : Konflik yang terjadi harus segera diselesaikan agar tidak berbuntut pada protes massal dari warga yang merasa tidak nyaman dengan adanya TPST di dekat pemukimannya.

Melalui analisis di atas, penulis menawarkan solusi yang ditujukan kepada pihak TPST untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara warga dengan pihak TPST. Solusi pertama, pihak TPST dapat mengurangi munculnya lalat dan bau sampah yang tidak sedap dengan cara menambah jumlah pekerja di TPST agar proses pemilahan sampah lebih cepat selesai. Jumlah pekerja yang memadai akan mengurangi terjadinya penumpukan sampah dalam jangka waktu satu hari. Pekerja sendiri juga sebaiknya diutamakan berasal dari Desa Mulyoagung sendiri agar dapat terjalin hubungan yang baik. Solusi kedua, pihak

TPST bisa menjalin komunikasi yang baik dengan warga Desa Mulyoagung terutama sekitar TPST untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari seperti dengan mengadakan program untuk ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK Desa Mulyoagung maupun lembaga lainnya untuk mengolah sampah daur ulang menjadi hasil karya yang berguna dan bernilai jual.

SIMPULAN

Pengolahan sampah sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain bermanfaat dalam menjaga kondisi lingkungan, pengolahan sampah juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pengolahan sampah ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yaitu dalam pengolahan sampah organik menghasilkan pupuk kompos, sampah nasi untuk dijual sebagai pakan hewan ternak serta belatung dalam sampah untuk budidaya ikan. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengolahan sampah merupakan wujud upaya pemberdayaan masyarakat lewat potensi kemampuan yang mereka miliki. Masyarakat dalam pengolahan sampah ini didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah ini selain berdampak baik bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa permasalahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat pengolahan sampah. Masalah bau sampah yang tidak sedap dan banyaknya lalat yang bersumber dari tempat pengolahan sampah merupakan penyebab

konflik antara pihak pengelola sampah dengan warga sekitar. Tempat pengolahan sampah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat. Agar kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, masyarakat dan pihak pengelola harus memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penulis menawarkan solusi dengan cara menambah jumlah pegawai TPST untuk mempercepat proses pemilahan sampah dan mewujudkan komunikasi yang baik antara pihak pengelola sampah dengan masyarakat yang tinggal disekitar tempat pengolahansampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Agenda 21 Sektorial Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan* (Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektorial Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 2000)
- Jogiyanto. 2005. *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta.
- Kafiar, F.P., 2013. *Analisis Pencemaran Bahan Toksik Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Ternak Sapi Potong di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo Surakarta*. Tesis S2 Prodi Ilmu Lingkungan UNS. Surakarta.
- Nadiasa, M., Sudarsana, D.K., Yasmara, I.N. 2009. *Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 13 (2): 120-135.

Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Subandi, D. 2006. *Sampah, sesuatu yang “terlupakan” namun berdaya guna*. Working Paper K3LH. PT. Pupuk Kaltim, TBK.

<http://tpst-mulyoagungbersatu.blogspot.com>

MENCIPTAKAN GENERASI MUDA TANPA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SITUBONDO

Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono

Mahasiswa Universitas Negeri Malang

Fakultas Ilmu Sosial

Program Studi Pendidikan Sosiologi

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Early marriage, counseling

Abstrak

Angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Arjasa terbilang tinggi. Tingginya angka pernikahan dini tersebut dilatari oleh banyak faktor, yang paling dominan adalah faktor budaya dengan dibuktikan sudah menjadi turun-temurun. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam membentuk keluarga. Pernikahan dini menjadi perhatian banyak pihak mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan dini adalah hubungan seks di kalangan usia muda, penyakit yang menular, dan mental serta emosi yang masih labil yang kemungkinan menyebabkan suatu konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis deskriptif, di mana penulis ingin memaparkan atau menggambarkan beberapa sudut pandang tentang pernikahan dini, yakni dari sudut pandang budaya yang ada di Kabupaten Situbondo, sudut pandang agama Islam, dan sudut pandang hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah ingin memaparkan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih memberlakukan pernikahan dini tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hasil penelitian ini adalah pencegahan pernikahan dini sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi remaja saat ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Pencegahan pernikahan dini juga ingin membentuk generasi muda yang sadar akan pendidikan. Pada dasarnya, menikah memang menjadi privasi keluarga atau diri sendiri. Tetapi dalam pendidikan, kita sadar apa yang harus kita lakukan. Masyarakat dan remaja dalam pencegahan pernikahan dini ini dorong agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal melalui pendidikan.

Abstract

Figures early marriage in Situbondo, especially in Sub Arjasa fairly high. The high rates of early marriage are backed by many factors, the most dominant cultural factors with proven already become hereditary. Early marriage can be defined as two people of the opposite sex who was a teenager in a family. Early marriage to the attention of many parties in view of the risks arising from early marriage is sex in young people, infectious diseases, and mental and emotional unstable that may be causing a conflict. This study used qualitative methods, namely descriptive analysis, in which the author wants to explain or describe some viewpoints about the wedding

themselves, that is, from the standpoint of culture in Situbondo, Islamic religious viewpoint, and the viewpoint of the law of Indonesia. The purpose of this study was to describe as well as a consideration for the people who still impose early marriage without looking at other aspects. The result of this research is the prevention of early marriage is very important for people, especially for teenagers today. Besides beneficial to oneself, is also beneficial to avoid a negative view of society. Prevention of early marriage also want to form young people who are aware of education. Basically, getting married has become the family's privacy, or yourself. But in education, we are aware of what we should do. Society and youth in the prevention of early marriage is encouraged to have the awareness to improve human resources optimally through education.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- nanditogonzales@yahoo.co.id
- aminullaharief@gmail.com

PENDAHULUAN

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal anak perempuan menikah umur 16 tahun dan laki – laki 19 tahun. Dikatakan bahwa pernikahan dini harus dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak, tetapi yang terjadi di Kabupaten Situbondo penikahan dini disebabkan ada paksaan atau tekanan orangtua, sehingga anak menyetujuinya yang disebabkan oleh rasa takut untuk membantah perintah orang tuanya dan penyebab lainnya seperti rasa bakti kepada orang tuannya. Permasalahan yang terjadi di era modern ini marak terjadi pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Adapun beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini di Kabupaten Situbondo, yakni berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pandangan yang menjadi masalah pada masyarakat Situbondo adalah pandangan pernikahan dini pada saat anak sudah melewati masa pubertas harus dinikahi agar tidak akan menimbulkan aib

keluarga, masalah ekonomi dalam hal ini tidak menjadi faktor dominan apabila ditilik dari faktor penyebabnya, melainkan faktor tradisi, budaya dan orang tua yang menstimulus anaknya melakukan pernikahan dini. Hal ini juga disebabkan adanya stigma orang tua yang melekat dan turun-temurun bahwasanya pernikahan dini akan menghapus aib atau pandangan seseorang kepada keluarga yang mempunyai anak pada fase pubertas, orang tua bebas dari tanggung- tanggung dalam arti orang tua memberikan kepercayaan sekaligus mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga pandangan bahwa anak itu akan bahagia jika menikah pada usia dini. Adapun beberapa dampak permasalahan dalam pernikahan dini, yakni meliputi melanggarnya hak-hak anak itu sendiri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini yang dapat berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku.

Secara umum pernikahan dini di Kabupaten Situbondo sering dijumpai

padakalangan kelas bawah dengan cara berfikir yang masih menganut tradisi budaya daerah itu sendiri dan tujuan penulis dalam penelitian ingin menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini. Peranan orang tua, guru, dan lingkungan dalam menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini, serta menjelaskan hambatan-hambatan dalam menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini di Kabupaten Situbondo.

Hal ini ditujukan agar generasi muda pada saat ini tidak hanya menjadi generasi penurus, tetapi juga pelurus bangsa agar tidak berlarut-larut terjerumus oleh adanya budaya pernikahan dini yang marak di Kabupaten Situbondo serta ditujukan untuk memaparkan bahayanya pernikahan dini, maupun menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat desa-desa di kabupaten Situbondo yang masih memberlakukan pernikahan dini tanpa melihat dampak lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena pernikahan dini yang ada di Kabupaten Situbondo.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. (Ghoni Almansyur, 2012:175). Sumber data yang dipilih dalam penelitian terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 2 guru, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, dan 4 pelaku pernikahan dini.

Peneliti memakai teori fenomenologi. Teori fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Teori fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofi yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Nyata Generasi Muda di Desa Kesambirampak

Secara umum, generasi muda dapat diartikan sebagai populasi remaja/anak muda/pemuda yang sedang membentuk dirinya. Akan tetapi, tidak terdapat suatu definisi yang dianggap paling tepat, banyak pandangan yang mengartikannya dari berbagai perspektif. Namun, dalam rangka untuk pelaksanaan suatu pembinaan bahwa generasi muda ialah bagian suatu generasi yang berusia 0-30 tahun.

Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat di Kabupaten Situbondo karena generasi muda adalah generasi penerus bangsakeselak, tetapi yang terjadi saat ini pada generasi muda di Kec. Arjasa Kab. Situbondo terjadi hal yang tidak wajar, yaitu berhenti sekolah dengan alasan menikah. Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Arjasa sangat marak dilakukan oleh kalangan pelajar MTS dan MA. Data yang diperoleh pada tahun 2011-2016 siswa-siswi MTS Nurul Hikam yang berhenti ada sekitar lima orang dengan alasan menikah dan data MA Nurul Hikam pada tahun 2011-2016 yang berhenti 11 orang dengan alasan sepuluh menikah dan satu hamil di luar nikah.

Budaya menikah pada usia dini di Kecamatan Arjasa disebabkan tradisi budaya turun-menurun melakukan pernikahan dini sejak usia 10-15 tahun dan orang tua yang sangat setuju apabila anaknya melakukan pernikahan dini. Ada empat pasang pelakupernikahan dini memberikan alasan untuk menikah di usia muda, yaitu karena di jodohkan oleh orangtua sejak dalam

kandungan, ekonomi, hamil diluar nikah dan kemauan diri sendiri. Remaja di Desa Kesambirampak sebenarnya bersemangat untuk bersekolah, tetapi faktor yang melatar belakangi putus sekolah adalah orang tua, orang tua berkeinginan untuk anaknya berhenti sekolah agar membantu perekonomian orang tua, menghilangkan aib keluarga setelah melewati fase pubertas dan sudah dijodohkan dalam kandungan. Remaja di Kecamatan Arjasa tidak mengetahui dampak negatif menikah dini terutama terhadap kesehatan reproduksi wanita.

B. Pandangan terhadap Pernikahan Dini

Beberapa akademisi (Pelaku pendidikan) menaggapinya dengan beberapa perspektif, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua guru yang berada di daerah tersebut, faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini di desa tersebut adalah faktor budaya. "Sebenarnya, fenomena pernikahan dini yang ada disini sudah menjadi suatu budaya, penulis masih tidak setuju jika faktor ekonomi yang paling dominan dalam hal ini.

Memang benar, faktor ekonomi juga mendorong, tetapi penulis sendiri meyakini bahwa orangtua dari korban pernikahan dini pada dasarnya mampu membiayai anaknya sekolah, tetapi masyarakat yang ada disini masih belum sadar. Pada beberapa waktu lalu penulis telah menjumpai korban pernikahan dini yang sudah dijodohkan sejak dia masih kecil" ujar sang guru. Pada umunya, guru sudah memberi sosialisasi tentang fenomena tersebut, guru sudah memberi motivasi-motivasi agar tetap menempuh jenjang pendidikan terlebih dahulu.

Menurut salah satu tokoh agama yang ada di daerah tersebut, sebenarnya dalam perspektif Islam, siapapun yang sudah berada dalam masa akil baligh, itu sudah sah untuk melakukan pernikahan. Mungkin karena ekonomi daerah pelosok yang masih rendah, itu juga bisa menjadi pemicu utama. Sebab, orangtua juga tidak ingin menambah keluarga dan akhirnya anaknya terpaksa dijodohkan dan menikah.

Salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak setuju dengan adanya pernikahan dini di kalangan remaja pada umumnya. "Menikah atau tidak itu memang menjadi keputusan dari keluarga tersendiri, tapi setidaknya anak bebas untuk memilih jalan hidupnya, Masyarakat masih beranggapan pendidikan itu tidak ada manfaat dan jaminan kerja. Hal ini juga menjadi hambatan kami, tapi setidaknya pengalaman untuk dunia kerja nantinya bisa didapatkan didalam pendidikan" ujarnya.

Peneliti menganalisa fenomena tersebut dengan teori fenomenologi. Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Schutz bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. (Sumber rujukan). Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap proses interaksi sosial. Bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau

bertindak sesuai yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan pehatiannya kepada satu bentuk dari subyektifitas yang disebutnya antar subyek. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.

Dapat diartikan bahwa fenomena pernikahan dini yang ada di Kabupaten Situbondo adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat akan pernikahan dini bahwasannya pernikahan dini itu baik.

C. Hambatan Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini

Menikah di usia dini di Kecamatan Arjasa merupakan realita yang sering terjadi meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 1954 menentang pernikahan usia dini pada anak, namun ironisnya, praktik pernikahan usia dini masih berlangsung. Implementasi undang-undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat.

Pelaku pernikahan dini di Kecamatan Arjasa sering sekali bekerja sama kepada Kantor Urusan Agama (KAU) untuk memanipulasi umur supaya pernikahan menjadi legal, tetapi tidak sedikit pula yang melalui pernikahan sirih karena agama Islam memandang pernikahan dengan kedua

pasangan sudah akil baligh, kesehatan jasmani, dan mempelai laki – laki sudah mampu menafkahi mempelai perempuan. Kurangnya informasi dan sosialisasi di daerah terpencil/desa bahwasanya pernikahan dini sangat berbahaya pada remaja perempuan.

Pergaulan bebas tidak bisa dipungkiri dari remaja walau seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan terkena dampaknya walau dapat dikatakan hanya sedikit. Dengan perkembangan zaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Orang tua sangat khawatir karena takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai konsensus nilai dan normadengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.

KESIMPULAN

Pencegahan pernikahan dini sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi remaja saat ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Pencegahan pernikahan dini juga ingin

membentuk generasi muda yang sadar akan pendidikan. Pada dasarnya, menikah memang menjadi privasi keluarga atau diri sendiri. Tetapi dalam pendidikan, kita sadar apa yang harus kita lakukan. Masyarakat dan remaja dalam pencegahan pernikahan dini ini dorong agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal melalui pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini ini selain berdampak baik bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa permasalahan bagi negara. Masalah yang ditimbulkan adalah suap menyuap untuk melegalkan suatu pernikahan ketika tidak memiliki KTP atau belum mencukupi batas umur yang telah ditentukan oleh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi prihatin tersendiri jika suap menyuap tersebut menjadi kebiasaan yang terus terulang. Agar kegiatan menciptakan generasi muda tanpa pernikahan dini berjalan dengan baik, masyarakat dan pemerintah harus memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penulis memberikan solusi dengan cara membuka lapangan pekerjaan di daerah plosok. Sebab, mereka (orangtua yang melakukan pernikahan dini terhadap anaknya) beralasan bahwa ekonomi yang rendah sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu, masyarakat harus sadar khususnya bagi orangtua. Anak berhak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Diharapkan anak dapat menempuh jenjang pendidikan terlebih dahulu, karena faktanya pada saat ini dunia kerja sudah mengeluarkan peraturan kelulusan dalam mendaftarkan pekerjaan.

RUJUKAN PUSTAKA

Ahmad, Zulkifli. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hakim, Luthfil. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

www.rri.co.id

<http://www.anneahira.com/pernikahan-dini-16969.htm>

www.smallcrab.com

www.jatim.bps.go.id



PERANAN GURU DAN SISWA PADA KEGIATAN PERINTISAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA ALAM (SWALIBA)

Apik Budi Santoso, Wahyu Setyaningsih, dan Dhahrul Biqih

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Early marriage, counseling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru dan siswa dalam program perintisan Swaliba, dan mengetahui faktor penunjang serta penghambat program perintisan Swaliba. Penelitian dilaksanakan di SMPN 41 Semarang dengan subyek penelitian guru dan siswa SMPN 41 Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan propotional random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan deskriptif persentase. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) Peranan guru dalam bidang lingkungan termasuk dalam kriteria tinggi, dalam bidang kebencanaan termasuk dalam kriteria sedang; peranan siswa dalam bidang lingkungan termasuk dalam kriteria tinggi, sedangkan untuk bidang kebencanaan termasuk dalam kriteria rendah. (2) Program perintisan Swaliba di SMPN 41 Semarang dapat berjalan karena adanya faktor penunjang, yaitu partisipasi aktif seluruh warga sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kerjasama yang baik dengan mitra sekolah sekalipun terkendala oleh penerapan kurikulum, monitoring dan kerjasama.

Abstract

This study aims to determine the role of teachers and students in the Swaliba pilot program, and determine the supporting factors and inhibiting Swaliba pilot program. Research conducted at SMPN 41 Semarang, the research subjects are teachers and students of SMPN 41 Semarang. random sampling technique used in this study. Data were collected through interviews, observation, documentation and questionnaires, and analyzed using descriptive percentages. The results were obtained: (1) The teachers role in the environment are at high criteria, in the disaster are at moderate criteria; the students role in the environment are at high criteria, while for the disaster are in the low criteria. (2) Swaliba pilot program in SMPN 41 Semarang can be run for their supporting factors, like the active participation of all citizens of the school, the availability of facilities and infrastructure, a good cooperation with schools partner even if constrained by the curriculum implementation, monitoring and schools partner cooperation.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi

- apikbudi@mail.unnes.ac.id

- wahyusetyaningsih@mail.unnes.ac.id

- dhahrulbiqih@gmail.com

PENDAHULUAN

Sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana alam (Swaliba) merupakan sebuah konsep yang disusun untuk membentuk suatu wadah pendidikan yang mampu menerapkan serta menciptakan manusia yang bisa melestarikan lingkungan dimanapun mereka berada dan hidup berdampingan dengan bencana (Liesnoor, 2015:13). Seluruh konsep tersebut diturunkan ke dalam 2 indikator yakni indikator lingkungan hidup yang meliputi udara dan cahaya, tumbuhan, sampah, air, energi, kesehatan, dan budaya, sedangkan indikator kebencanaan meliputi gedung tahan bencana dan denah bangunan, tempat dan jalur evakuasi, peta bencana, rambu dan sistem peringatan bencana, alat penyelamatan, sistem manajemen, dan pelatihan mitigasi bencana.

Aspek yang menjadi perhatian sekolah untuk dikelola dengan cermat dan benar jika mengembangkan Program Swaliba yaitu: Pengembangan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; (2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan dan mitigasi bencana alam; (3) Pengembangan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam berbasis partisipatif; (4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekolah (Hartika, 2015 : Vol. 3).

Program perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) di SMP Negeri 41 Semarang merupakan program kerjasama antara Pusat Studi Kebencanaan Universitas Negeri Semarang berkerjasama dengan mahasiswa Geografi Universitas Negeri Semarang dan

SMPNegeri 41 Semarang sebagai sekolah binaan. SMPN 41 Semarang menjadi sekolah binaan Swaliba sejak tahun 2014. Program yang sudah dijalankan antara lain pelatihan dan pembuatan biopori di lingkungan sekolah, pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan limbah sampah, penanaman obat rumah tangga dalam bentuk laboratorium tanaman, Pembuatan dan penempelan poster bertemakan peduli lingkungan, pembentukan ekstrakurikuler *Go Clean* bagi siswa untuk menanamkan perilaku peduli lingkungan melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan kegiatan *field trip* yang berisi tentang pemberian pengetahuan potensi bencana longsor di sekitar sekolah.

Program perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) di SMP N 41 Semarang bertujuan agar dapat mewujudkan sekolah yang menerapkan kebijakan tentang pelestarian lingkungan dan meminimalkan resiko bencana di sekitar lingkungan sekolah. Program perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) juga bertujuan agar membentuk perilaku dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam. Program dan kegiatan yang sudah dilakukan terkait bidang lingkungan dan kebencanaan tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan kerjasama dari seluruh warga sekolah SMPN 41 Semarang sesuai dengan peranan masing-masing warga.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui peranan guru dan siswa pada kegiatan perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) di SMP N 41 Semarang. (2)

Mengetahui faktor penunjang dan penghambat program perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) di SMP N 41 Semarang.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.		Populasi guru	Populasi siswa		Jumlah sampel
			Kelas VII	Kelas VIII	
1		33	224	224	
	Sampel(15%)	5	34	34	73

Sumber : Buku Induk SMP N 41 Semarang 2016

Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana alam (Swaliba) di SMP Negeri 41 Semarang, peranan warga sekolah dalam kegiatan perintisan Swaliba dan faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan program kegiatan perintisan Swaliba. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

SMP N 41 Semarang terletak di Jalan

warga sekolah SMP N 41 Semarang yang meliputi guru dan siswa (kelas VII dan VIII). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional random sampling* dengan mengambil 15% dari jumlah populasi sehingga diperoleh sampel yang berjumlah 73 terdiri dari 5 guru dan 68 siswa.

Cepoko Utara. RT.04 RW.01, Cepoko Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Letak astronomis SMP N 41 Semarang terletak pada titik koordinat 7° 04' 17.3" LS - 110° 21' 29.9" BT (Lihat Peta pada Lampiran). SMP N 41 Semarang memiliki luas lahan seluas 12.600 m² dengan luas bangunan sekolah 3.679 m². Pemanfaatan lahan digunakan untuk bangunan, fasilitas sekolah dan lahan terbuka. Pemanfaatan sebagai ruang terbuka hijau meliputi penggunaan lahan sebagai taman 1000 m², kebun 2100 m² dan *green house* 60 m². Sedangkan lahan belum tertangani merupakan lahan terbuka yang paling dominan yaitu seluas 4009 m².

2. Peranan Guru Dan Siswa Pada Kegiatan Perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba)

Program Perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang bertujuan untuk mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana alam di Kota Semarang. Dalam visi dan misinya SMP N 41 Semarang menerapkan kebijakan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Visi tersebut adalah Berakhlak Mulia, Cerdas, Terampil, Unggul dalam Prestasi dan Berwawasan Lingkungan. Visi ini menjadi perwujudan Swaliba yakni mencetak lulusan yang berakhlak mulia, cerdas dalam mengelola dan menjaga lingkungan sehingga mampu berprestasi dalam segala bidang. Dana untuk kegiatan lingkungan atau kebencanaan diperoleh sekolah dari APBD Provinsi Jawa tengah dan APBD Kota Semarang. Anggaran tersebut digunakan sekolah untuk memperbaiki bangunan, membangun bangunan baru, pendanaan kegiatan lingkungan dan kebencanaan, pengelolaan sampah dan listrik serta biaya perawatan bangunan sekolah.

Peranan guru dan siswa dalam program perintisan Swaliba berisi tentang keikutsertaan dalam program bidang lingkungan dan kebencanaan di SMP N 41 Semarang. Konsep rancangan Swaliba mempunyai indikator yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni indikator lingkungan hidup dan indikator tanggap bencana. Peranan guru dan siswa dalam program perintisan Swaliba mencakup lima jenis peranan yaitu peranan berupa tenaga, peranan berupa keahlian, peranan berupa

pikiran/ide, peranan berupa barang dan peranan berupa uang.

2.1. Pelaksanaan Indikator Bidang Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sekolah, penggunaan sarana dan prasarana sekolah seefisien mungkin, penerapan budaya bersih, sehat dan cinta lingkungan.

a. Kondisi Pengelolaan Energi

Penghematan energi di SMPN 41 Semarang diwujudkan melalui himbauan pihak sekolah kepada warga sekolah untuk menghemat energi melalui kampanye pemasangan poster dan tulisan di tempat-tempat strategis yang berisi tentang ajakan untuk menghemat energi listrik seperti pemakaian AC, kipas, televisi seperlunya, dan penghematan air. Sekolah ini juga telah memanfaatkan ventilasi dan jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan ruang secara baik, dengan tujuan agar memperlancar pergantian udara di dalam ruangan dan juga sebagai efisiensi penggunaan lampu, AC, dan kipas angin.

b. Kondisi Penghijauan dan Sanitasi

SMP N 41 Semarang telah melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. program penghijauan tersebut melibatkan seluruh warga sekolah. Program penghijauan yang dilakukan yaitu tamanisasi dan penanaman pohon. Penanaman tumbuhan selain bertujuan untuk penghijauan juga sebagai upaya pengurangan potensi bencana longsor.

Sanitasi di SMP N 41 Semarang sudah dikeloladengan baik. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara menyediakan 54 buah tempat sampah terpisah yaitu tempat sampah

organik dan anorganik. Untuk mengelola sampah Tim Swaliba Unnes melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos kepada guru dan siswa. Ketersediaan air bersih disekolah guna pemenuhan kebutuhan untuk toilet, air wudhu, penyiraman tumbuhan, kolam, cuci tangan dan kebersihan fasilitas sekolah mencukupi.

c. Kondisi Pengelolaan Lingkungan Sehat

SMP N 41 Semarang mengembangkan pengelolaan lingkungan sehat dan mengajak warga sekolah untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang diwujudkan melalui penempelan poster tentang kesehatan, penghimbau terhadap siswa tentang konsumsi jajanan sehat, kantin sehat dan sosialisasi cuci tangan. Selain itu, sekolah mempunyai program kebersihan Tumitlangkung (Tujuh menit untuk kelas dan lingkungan) yang diadakan setiap hari jumat guna melatih siswa agar membiasakan berperilaku bersih dan menjaga lingkungan.

2.2. Pelaksanaan Indikator Bidang Tanggap Bencana

Indikator tanggap bencana berkaitan dengan ketahanan dan kesiapan sekolah serta warga sekolah menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan SMP N 41 Semarang.

a. Gedung Tahan Bencana dan Denah Bangunan

Upaya SMP N 41 Semarang untuk meminimalisir terjadinya bencana longsor salah satunya dengan melakukan perbaikan gedung sekolah yang meliputi perataan tanah untuk pembangunan gedung sekolah

sehingga mengurangi erosi pada tanah dan pembuatan fondasi atau dasar bangunan yang kuat serta talud yang melebar melebihi bangunan di atasnya agar bangunan berdiri kokoh. Pembuatan biopori juga dilakukan di area sekolah guna mengurangi genangan air dan sebagai lubang resapan air hujan sehingga mengurangi erosi tanah yang disebabkan oleh air hujan.

b. Simulasi Mitigasi Bencana

Program *Field Trip* yang berisi pemberian materi dan pengetahuan tentang materi bencana tanah longsor dan mitigasi bencana longsor dengan tujuan agar siswa bisa mengetahui potensi longsor yang ada di sekitar sekolah mereka dan dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor, Program simulasi mitigasi bencana dilakukan secara rutin dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah.

2.3. Tingkat Peranan Guru dalam Bidang Lingkungan

Peranan guru di SMP N 41 Semarang dalam bidang lingkungan diantaranya adalah ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Swaliba Unnes. Kegiatan yang diikuti guru yaitu penanaman tumbuhan obat dan pembuatan pupuk kompos. Guru ikut serta dalam meningkatkan program lingkungan yang diadakan sekolah dan melaksanakan kebijakan sekolah tentang menjaga dan merawat lingkungan. Guru melaksanakan penghematan sumber daya alam dan energi dengan penghematan air serta efisiensi penggunaan listrik seperti membuka jendela guna mengurangi penggunaan kipas dan lampu. Guru

memberikan pengetahuan tentang upaya melestarikan dan menjaga lingkungan di sekolah dan mengajarkan siswa mengelola sampah dengan membuat barang daur ulang. Guru juga turut menyumbang dana dan sarana yang dibutuhkan guna mensukseskan program lingkungan yang dilakukan di sekolah.

Peranan guru di SMP N 41 Semarang dalam bidang lingkungan dengan kriteria

tinggi sebanyak 5 guru (100%). Rata-rata peranan guru dalam bidang lingkungan menunjukkan persentase sebesar 86,2% termasuk pada kriteria tinggi. Tingkat peranan guru terendah pada bidang lingkungan yaitu tingkat peranan guru menyumbang tumbuhan untuk ditanam di lingkungan sekolah dengan persentase 40% termasuk kriteria sedang.

Tabel 2. Peranan Guru Dalam Bidang Lingkungan

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	66,8 – 100	Tinggi	5	100 %
2	33,36 – 66,7	Sedang	-	-
3	0 – 33,35	Rendah	-	-
Jumlah			5	100
Rata-rata (%)		Tinggi		86,2 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Tingkat Peranan Guru Dalam Bidang Kebencanaan

Rata-rata peranan guru dalam bidang kebencanaan memiliki peranan sedang. Peranan guru dalam bidang kebencanaan diupayakan melalui pengajaran denah sekolah tentang fungsi ruang sekolah kepada siswa, melakukan simulasi mitigasi bencana dan menyumbang sejumlah uang guna

melakukan perbaikan gedung sekolah. Peranan guru dengan nilai persentase tertinggi 100% yaitu pada peranan berupa uang sedangkan persentase terendah 20% yaitu pada peranan guru berupa keahlian mengajarkan sistem rambu peringatan bencana, penggunaan alat penyelamatan dan mendampingi siswa dalam program simulasi bencana.

Tabel 3. Peranan Guru Dalam Bidang Kebencanaan

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	66,8 – 100	Tinggi	1	20 %
2	33,36 – 66,7	Sedang	3	60 %
3	0 – 33,35	Rendah	1	20 %
Jumlah			5	100 %
Rata-rata (%)		Tinggi		50 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 guru di SMPN 41 Semarang yang memiliki peranan dalam bidang kebencanaan termasuk kriteria tinggi ada 1 guru (20%), termasuk kriteria sedang ada 3 guru (60%) dan kriteria rendah ada 1 guru (20%). Rata-rata persentase peranan guru dalam bidang kebencanaan yaitu 50% termasuk pada kriteria sedang.

2.4. Tingkat Peranan Siswa Dalam Bidang Lingkungan

Siswa memiliki peranan yang tinggi dalam bidang lingkungan di SMP N 41 Semarang. Siswa berpartisipasi menyumbang dan menanam pohon di lingkungan sekolah, melaksanakan program kebersihan yang diadakan sekolah, ikutserta dalam program penanaman tumbuhan obat, pembuatan biopori dan pembuatan pupuk

kompos. Selain melaksanakan program kebersihan, siswa menghemat air dengan cara menggunakan air seperlunya, menutup kran air dan efisiensi penggunaan listrik dengan cara membuka jendela kelas sehingga mengurangi penggunaan kipas angin dan lampu. Siswa ikut serta dalam penempelan poster bertema lingkungan, pembuatan pupuk kompos dan biopori di lingkungan sekolah. Siswa juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lubang biopori sehingga biopori tetap berfungsi dengan maksimal. Perawatan biopori yang dilakukan oleh siswa yaitu mengganti sampah daun pada lubang biopori secara berkala setiap minggu dan membersihkan lubang biopori dari tanan dan sampah yang menutup sehingga air dapat meresap secara maksimal pada lubang biopori.

Tabel 4. Peranan Siswa Dalam Bidang Lingkungan

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	66,8 – 100	Tinggi	57	83,8 %
2	33,36 – 66,7	Sedang	11	16,2 %
3	0 – 33,35	Rendah	-	- %
Jumlah			68	100 %
Rata-rata (%)		Tinggi		77,66 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa peranan siswa pada bidang lingkungan dalam kegiatan perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang menunjukkan kriteria tinggi sebanyak 57 siswa (83,8%) dan peranan siswa pada kriteria sedang ada 11 siswa (16,2%). Rata-rata peranan siswa dalam bidang lingkungan menunjukkan kriteria tinggi dengan persentase sebesar

77,66%. Tingkat peranan siswa paling tinggi yaitu berupa sikap siswa membuang sampah pada tempatnya dengan persentase 98% termasuk pada kriteria tinggi. Sedangkan tingkat peranan siswa terendah yaitu tingkat peranan siswa berupa keahlian membuat barang daur ulang dari sampah menunjukkan kriteria sedang dengan persentase 37%.

2.5. Tingkat Peranan Siswa Dalam Bidang Kebencanaan

Dalam bidang kebencanaan sebagian besar siswa memiliki peranan yang rendah. Peranan dengan persentase terendah (12%) ditunjukkan pada peranan berupa tenaga dalam mengikuti ekstrakurikuler. Sedangkan persentase tertinggi yaitu pada peranan siswa berupa keahlian membaca dan mempelajari

denah ruang sekolah dengan persentase sebesar 80%. SMP N 41 Semarang menyediakan media denah ruang sekolah dan guru mengajarkan kepada siswa tentang memahami letak dan fungsi ruang sekolah. Pembelajaran denah ruang sekolah juga bertujuan untuk menghimbau siswa agar tidak mendekati tebing yang berada dekat dengan sekolah.

Tabel 5. Peranan Siswa Dalam Bidang Kebencanaan

No.	Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	66,8 – 100	Tinggi	6	8,9 %
2	33,36 – 66,7	Sedang	24	35,2 %
3	0 – 33,35	Rendah	38	55,9 %
Jumlah			68	100 %
Rata-rata (%)		Tinggi		35,25 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Dari tabel dapat diketahui bahwa dari 68 siswa yang memiliki peranan dalam bidang kebencanaan termasuk kriteria tinggi ada 6 siswa (8,9%), termasuk kriteria sedang ada 24 siswa (35,2%) dan kriteria rendah ada 38 siswa (55,9%). Rata-rata peranan siswa dalam bidang kebencanaan di SMP N 41 Semarang yaitu 35,25% termasuk dalam kriteria sedang.

3. Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Program Perintisan Swaliba

Dalam pelaksanaan program perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang terdapat faktor penunjang dan penghambat faktor-faktor penunjang tersebut antara lain :

1. Tenaga pendidik yang berperan aktif dalam menyumbangkan ide berupa program pada perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi

Bencana Alam (Swaliba) untuk diadakan.

2. Partisipasi aktif seluruh warga sekolah pada kegiatan di lapangan sehingga mensukseskan program lingkungan dan kebencanaan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung berupa bangunan sekolah, ruang kelas, tempat sampah, laboratorium, taman sekolah, biopori, alat kebersihan, toilet bersih, kantin dan poster serta slogan bertema tentang lingkungan dan kebencanaan yang memadai di SMP N 41 Semarang, sehingga mempermudah berjalannya program perintisan Swaliba.
4. Kerjasama yang baik antara SMP N 41 Semarang dengan Tim Swaliba Unnes, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang dan PT. Angkasa Pura dalam

pelaksanaan program terkait bidang lingkungan dan kebencanaan. Kerjasama yang dijalin oleh SMP N 41 Semarang sangat mendukung jalannya program perintisan Swaliba. Kemitraan tersebut membantu sosialisasi kegiatan lingkungan dan kebencanaan serta pengadaan sarana untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan sekolah.

Program perintisan Swaliba juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut mempengaruhi penerapan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana alam dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Faktor-faktor yang menghambat program perintisan Swaliba di SMPN 41 Semarang adalah :

1. Adanya mata pelajaran yang sulit diintegrasikan dengan materi berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, sehingga mengalami kesulitan dalam penerapan kurikulum berbasis lingkungan dan mitigasi bencana alam.
2. Kurangnya monitoring terhadap hasil kegiatan yang dilakukan menjadi kendala berarti dalam pelaksanaan perintisan Swaliba. Perlunya pengawasan dan pendampingan terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga program berjalan berkelanjutan dan hasil dari program tersebut selalu dalam kondisi terawat.
3. Kurangnya kerjasama dengan badan kebencanaan. Pengetahuan tenaga pendidik dalam bidang mitigasi bencana masih kurang. Sumbangan

ide terkait program bidang kebencanaan dan simulasi mitigasi bencana oleh guru belum dilaksanakan. Sekolah memerlukan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang rutin dan pengadaan sarana serta prasarana mitigasi bencana yang memadai.

PEMBAHASAN

1. Peranan Guru dan Siswa dalam Program Perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang

Peranan guru dalam bidang lingkungan rata-rata termasuk kriteria tinggi sedangkan dalam bidang kebencanaan peranan guru termasuk dalam kriteria sedang. Peranan guru dalam bidang lingkungan memiliki peranan yang tinggi terutama partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, penanaman dan program lingkungan yang diadakan sekolah. Peranan guru terendah dengan kriteria sedang pada bidang lingkungan yaitu tingkat peranan guru menyumbang tumbuhan untuk ditanam di lingkungan sekolah hal ini disebabkan pihak sekolah sudah menyiapkan tumbuhan untuk ditanam di area sekolah. Selain itu, tumbuhan yang ditanam di sekolah juga didapat dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang dan dari siswa.

Peranan guru dalam bidang kebencanaan memiliki peranan sedang yang berarti peranan yang dilakukan oleh guru di SMP N 41 Semarang sudah berjalan, namun belum maksimal. Peranan guru dalam bidang lingkungan dan program perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang terlihat peranan guru dalam bidang lingkungan lebih signifikan dibanding kebencanaan. Program perintisan dengan Tim Swaliba Unnes dan program

sekolah di bidang lingkungan yang diadakan sudah terealisasi dan sudah didukung melalui kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, kelengkapan sarana dan prasarana kebersihan yang memadai dan kegiatan partisipatif pelestarian lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah SMP N 41 Semarang. Sedangkan peranan guru dalam bidang kebencanaan menunjukkan tingkat yang lebih rendah. hal ini dikarenakan upaya dan realisasi dalam bidang kebencanaan belum maksimal. SMP N 41 Semarang belum mencantumkan kebijakan siaga bencana dalam visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana untuk menunjang program kebencanaan belum memadai dan pengadaan sistem rambu penyelamatan bencana dan jalur evakuasi belum dilakukan oleh sekolah.

Peranan siswa dalam bidang lingkungan lebih tinggi dibanding peranan siswa dalam bidang kebencanaan. Sebagian besar siswa memiliki peranan tinggi dalam bidang lingkungan sedangkan dalam bidang kebencanaan sebagian besar siswa menunjukkan tingkat peranan yang rendah. Program lingkungan di SMP Negeri 41 Semarang sudah terealisasi melalui kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dan melalui kegiatan partisipatif yang melibatkan siswa. Kegiatan partisipatif dalam bidang lingkungan yang diadakan di SMP N 41 Semarang dan melibatkan siswa antaralain : penanaman pohon, pembuatan biopori, pelatihan kompos dan pemasangan poster bertema lingkungan. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah dalam bidang lingkungan sudah memadai seperti ketersediaan tempat sampah di area sekolah dan pengadaan alat kebersihan. Sedangkan

sebagian besar tingkat peranan siswa dalam bidang kebencanaan menunjukkan kriteria rendah. Kegiatan partisipatif dalam bidang kebencanaan yang diadakan di SMP N 41 Semarang yaitu ekstrakurikuler pramuka dan program perintisan Swaliba hanya diikuti oleh sebagian siswa.

2. Faktor penunjang dan Penghambat Program Perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang

Faktor penunjang tidak terlepas dari usaha dari pihak sekolah dan peranan dari seluruh warga sekolah dalam mengimplementasikan kegiatan terkait bidang lingkungan dan kebencanaan. Upaya dan program yang dilaksanakan SMP N 41 Semarang tidak lepas dari sumbangan pengetahuan yang dimiliki oleh para Guru yang memberikan pengetahuan tentang lingkungan dan kebencanaan kepada siswa dalam mata pelajaran yang diadakan, memberikan penugasan kepada siswa untuk membawa tumbuhan untuk ditanam di lingkungan sekolah, mengajarkan siswa membuat daur ulang dari sampah bekas serta memberi penugasan kepada siswa membuat poster bertema lingkungan untuk ditempel di dinding sekolah.

Keikutsertaan seluruh warga sekolah menunjang program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Warga sekolah turut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut serta menanam pohon di lingkungan sekolah, pembuatan biopori, upaya penghematan air dan energi, guru dan siswa ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler dan simulasi mitigasi bencana.

Berjalannya program perintisan Swaliba tidak lepas dari ketersediaan sarana

dan prasarana pendukung. Bangunan sekolah, ruang kelas dan laboratorium, pengadaan tempat sampah dan alat kebersihan yang memadai, adanya kantin bersih dan pengadaan poster lingkungan dan kebencanaan di dinding sekolah juga bermanfaat untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk menjaga lingkungan di sekitar mereka.

SMP N 41 Semarang bekerjasama dengan Tim Swaliba Unnes, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang dan PT. Angkasa Pura dalam pelaksanaan program bidang lingkungan dan kebencanaan. Kerjasama dengan Tim Swaliba Unnes guna melakukan perintisan dan pembinaan Swaliba. Pembinaan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan lingkungan dan *Field Trip*. Kerjasama SMP N 41 Semarang dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang guna pengadaan tumbuhan untuk ditanam di lingkungan sekolah. Warga sekolah menanam rumput vertiver di lingkungan sekolah yang berfungsi sebagai tumbuhan yang dapat mengurangi erosi tanah sehingga meminimalisir potensi terjadinya longsor. Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura guna pengadaan alat kebersihan di SMPN 41 Semarang.

Berjalannya program perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (Swaliba) di SMP Negeri 41 Semarang tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang terjadi. Tidak semua mata pelajaran dapat sisipi tentang pengetahuan terhadap lingkungan dan bencana alam. Mata pelajaran IPS dan IPA dapat disisipi pengetahuan tentang lingkungan dan kebencanaan dan diajarkan kepada siswa. Namun, mata pelajaran yang

lain sulit dihubungkan dengan pengetahuan lingkungan dan bencana alam.

Kurangnya pengawasan terhadap program kegiatan perintisan Swaliba yang sudah dilaksanakan merupakan faktor penghambat yang ada di SMP N 41 Semarang. Hasil dari kegiatan yang sudah diadakan seharusnya selalu diberikan pengawasan sehingga mendapat perawatan secara berkala. Selain itu, dengan adanya monitoring berjalannya program yang sudah dilaksanakan dapat terus berlanjut. Faktor kurangnya monitoring ini membuat tidak terawatnya dan terhentinya program yang sudah diadakan. Biopori yang sudah dibuat tidak semuanya terawat baik. Penggantian sampah kering di dalam lubang biopori tidak dilakukan secara berkala. Komunikasi antara pihak sekolah dan kerjasama sangat dibutuhkan sehingga pengawasan dan keberlanjutan program perintisan Swaliba yang telah berjalan selalu mendapat perhatian.

Kurangnya kemitraan dalam bidang kebencanaan membuat minimnya kegiatan dalam bidang mitigasi bencana alam. Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan di SMP N 41 Semarang belum lengkap, belum adanya rambu peringatan bencana dan peta rawan bencana untuk pembelajaran siswa. SMP N 41 Semarang perlu mewujudkan kerjasama dalam bidang kebencanaan guna melakukan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana longsor secara rutin. Sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana longsor diperlukan agar meningkatkan pengetahuan dan kesiap-siagaan seluruh warga sekolah dalam bidang kebencanaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang telah berjalan baik dengan melibatkan partisipasi guru dan siswa dalam bentuk kegiatan sosialisasi Swaliba, penanaman tumbuhan obat, pembuatan biopori, pembuatan pupuk kompos dan *field trip*.
2. Rata-rata persentase peranan guru pada bidang lingkungan termasuk pada kriteria tinggi. Sedangkan pada bidang kebencanaan peranan guru menunjukkan kriteria sedang. Peranan siswa pada bidang lingkungan termasuk dalam kriteria tinggi sedangkan pada bidang kebencanaan peranan siswa menunjukkan rata-rata dalam kriteria sedang.
3. Pelaksanaan program perintisan Swaliba di SMP N 41 Semarang tidak terlepas dari dukungan faktor penunjang yang berkaitan dengan partisipasi aktif warga sekolah, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dan kemitraan yang baik. Hambatan program perintisan Swaliba berkaitan dengan penerapan kurikulum, monitoring program, dan kerjasama dengan instansi bidang kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbut Balai Pustaka.
- Dewi, Hartika A. 2014. *Partisipasi Siswa Dalam Pelaksanaan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana*. Skripsi. Semarang: Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial.
- Endarmoko, Eko. 2009. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Keith Davis, John W. Newtrom. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Liesnoor Setyowati, Dewi. dkk. 2015. *Pelatihan Pembinaan Sekolah Swaliba. Handout* Semarang: UNNES.
- LIPI, UNESCO, ISDR. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Alam*. Jakarta: LIPI Press.
- Paryadi, Sugeng. 2008. *Konsep Lingkungan Sekolah*. Cianjur: Direktorat Jendral PMPTK, Departemen Pendidikan Nasional.
- R.A. Santoso Sastropoetro. 1989. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Soemarwoto, O. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana Di Indonesia Ke Mana?* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA MATA PELAJARAN IPS MATERI MASALAH SOSIAL KELAS IV SEKOLAH DASAR

Qurun In Evri Lilasari, Muhari, Suhanadji

Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Device Learning, Inquiry Learning, Critical Thinking

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berawal dari guru yang menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada tanpa adanya inovasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan validitas dan keefektifan perangkat pembelajaran serta mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 4D Thiagarajan (1974) dengan *control group pretest-posttest design* yang menghasilkan perangkat pembelajaran inkuiri meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, dan tes hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis. Subjek penelitian yaitu siswa kelas IV Sekolah Dasar. Instrumen penelitian berupa lembar validasi perangkat, lembar pengamatan keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan tes. Berdasarkan hasil validasi diperoleh skor perangkat pembelajaran yaitu 4.3 dengan kategori sangat valid. Keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran memperoleh 88.5% dengan kategori sangat baik, aktivitas siswa sebesar 87.97% dengan kategori sangat baik serta tes memperoleh nilai sebesar $80.16 \geq 75$ yang berarti mengalami peningkatan. Maka perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah dengan Uji T diperoleh taraf signifikansi sebesar $0.031 < 0.05$.

Abstract

The background of this research is the fact that there are still many teachers used device learning without innovation so the critical thinking students' ability. The purpose of this research to describe the validity and the effectiveness of device learning and to know difference in the critical thinking ability between the students who were taught used learning inquiry with the students who were taught in a talk method. This research was conducted using research and development with 4D model Thiagarajan (1974) with control group pretest-posttest design which produces device inquiry learning such as implementation learning, students' worksheet, and the result test which reflectif the critical thinking students' ability. The subject of this research were the students of four graders of Elementary

School. The instrument used in this research were validation, implementation learning observation sheet, student activity sheet, and test. The validation results show device learning was 4.3 with very valid category. The learning implementation got a percentage of 88.5% which shows very good category, the students activity got a percentage of 87.97% which shows very good category and test got $80.16 \geq 75$ which show increased. So, the development device learning can be taken effective. A difference in the critical thinking ability between the students who were taught used learning inquiry with the students who were taught in a talk method with T-Test got the significance was $0.031 < 0.05$.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
info@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Keinginan untuk mengenali hakikat manusia dengan segala aktivitasnya merupakan pintu masuk untuk belajar apa itu IPS. Berbagai gejala dan fenomena yang ada di sekeliling, baik yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap alam maupun sebaliknya merupakan esensi dari kajian IPS. Misalnya melalui permasalahan sosial yang ada di daerah sekitarnya. Dalam kehidupan banyak peristiwa terjadi, ada yang baik dan ada yang tidak. Peristiwa buruk dalam masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial.

Masalah sosial merupakan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Untuk memperkenalkan berbagai fenomena sosial maupun alam, berbagai stimulant mulai dari gambar, tayangan video, artikel surat kabar maupun kegiatan pengamatan langsung dapat diperkenalkan pada anak usia SD. Gunansyah (2015:1) Mengenali dan memahami suatu fenomena atau peristiwa

dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan sejumlah potensi dasar yang dimiliki anak, diantaranya potensi rasa ingin tahu, rasa ingin melihat kenyataan, rasa ingin mencari dan rasa ingin menemukan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kecamatan Plemahan, Kediri, kurikulum yang digunakan di sekolah mengacu pada KTSP. Temuan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara secara bertahap pada beberapa kepala sekolah dan guru SDN di kecamatan Plemahan, Kediri menunjukkan rata-rata pihak sekolah dan guru menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada. Perangkat pembelajaran tersebut bukan hasil dari pemikiran sendiri melainkan mengedit yang sudah ada atau menyuruh orang lain untuk membuatnya. Beberapa alasan dikemukakan antara lain karena keterbatasan waktu untuk membuat perangkat pembelajaran yang baru. Jika diteruskan kondisi seperti ini, dikhawatirkan akan mengurangi ide dan pemikiran dalam melakukan inovasi dalam dunia pendidikan.

Proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran IPS, pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru dengan metode ceramah. Sistem pencatatan materi yang dilakukan siswa masih menggunakan kalimat penuh yang membuat catatan menjadi panjang, tidak menarik serta membosankan sehingga membuat siswa enggan untuk membacanya kembali. Kondisi seperti ini menyebabkan daya kemampuan berpikir kritis siswa tidak akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran yang hanya duduk manis untuk mendengar dan menerima informasi dari guru. Hal ini terbukti dengan perolehan nilai siswa pada mata pelajaran IPS rata-rata memperoleh nilai 70. Artinya nilai tersebut masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) yang ditentukan yaitu 75. Sehingga perlu diadakan perbaikan nilai.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPS khususnya di SD belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya pembelajaran tersebut, karena pembelajaran belum dirancang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga kemampuan berpikir kritis siswa kurang diasah dan dikembangkan. Ennis (1996:4) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Indikator berpikir kritis dalam IPS antara lain merumuskan masalah, membuat hipotesis, menganalisis data, membuat kesimpulan serta menentukan solusi.

Untuk dapat melibatkan siswa secara fisik, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran, maka guru hendaknya merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi pelajaran dan keterampilan dirinya untuk membangkitkan kemampuan berpikir siswa dalam belajar. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran dan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan peran aktif siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Siradjuddin dan Suhanadji (2012:61) menyatakan bahwa keterampilan berpikir merupakan salah satu tujuan penting dalam IPS dan salah satu model mengajar keterampilan berpikir melalui inkuiri. Indrawati (dalam Trianto, 2011:134) juga mengemukakan bahwa suatu pembelajaran

pada umumnya akan lebih efektif bila diselenggarakan melalui model-model pembelajaran yang termasuk rumpun pemrosesan informasi. Salah satu yang termasuk dalam pemrosesan informasi adalah model pembelajaran inkuiri.

Brickman (2014) dalam penelitiannya dengan judul *Inquiry Based Learning Teaching and Learning, Enquiry based learning: Perspectives on practice Higher Education* mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri bertujuan untuk mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengalaman belajar yang tepat serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya dan berperan aktif dalam pembelajaran sehingga mampu memahami konsep dengan baik serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dalam bahasa mereka sendiri sehingga secara keterampilan berpikir kritis siswa diasah dan dikembangkan.

Penelitian Rahayu (2011) dengan judul *Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS dengan Berorientasi Strategi Inkuiri* menyimpulkan bahwa aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran yang berorientasi strategi inkuiri dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, dapat merangsang siswa dalam berpikir kritis, kreatif dan bekerja sama serta hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah. Badeni (2001) juga menyatakan bahwa masalah dan solusi pembelajaran IPS adalah dengan menerapkan pembelajaran inkuiri.

Gokhale (1995) dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Learning*

Enhances Critical Thinking" menyatakan bahwa berpikir kritis dapat dilatih dengan memberikan latihan soal-soal. Penelitian dengan judul *Design of Social Learning Environment as Inquiry-Based on Cloud Technology for Enhancing the Critical Thinking Skill and Collaborative Learning* yang dilakukan oleh Meepian (2013) menyimpulkan pembelajaran yang baik untuk mempelajari pembelajaran sosial adalah berbasis inkuiri dan pembelajaran kolaboratif bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

Salah satu alternatif memecahkan masalah pembelajaran di atas yaitu dengan pembelajaran inkuiri. Glend (2004) Melalui inkuiri siswa dapat memanfaatkan berbagai isu/wacana publik yang sedang berkembang, belajar mengambil keputusan, dan memfasilitasi siswa untuk terlibat sebagai warga negara untuk menyelidiki dunia sosial mereka dengan menggunakan cara berpikir ilmiah untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah. Melalui inkuiri guru dapat leluasa memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelidikan, terlibat dalam diskusi kolaboratif, memahami masalah secara substantif dan reflektif. Dwi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar* menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa terjadi peningkatan dengan diterapkannya pembelajaran inkuiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah validitas perangkat pembelajaran inkuiri yang dikembangkan? 2) Bagaimanakah keefektifan perangkat pembelajaran inkuiri

yang dikembangkan? 3) Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan validitas perangkat pembelajaran inkuiri yang dikembangkan, mendeskripsikan keefektifan perangkat pembelajaran inkuiri yang dikembangkan dan mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah.

Dalam penelitian ini akan dikembangkan produk perangkat pembelajaran inkuiri yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan tes hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis.

IPS secara formal didefinisikan sebagai studi terintegrasi ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam mengembangkan kompetensi warga Negara. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pembelajaran IPS merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah. Dari sekian konsep dasar IPS, secara esensi Pendidikan IPS adalah mengembangkan pengetahuan dan keterlibatan dalam dalam masalah-masalah warga Negara. Permendiknas Tahun 2006 mengemukakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.

Mata pelajaran IPS bertujuan agar

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut a) Mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, b) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan d) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Trianto (2011:135) mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Sanjaya (2008:196) pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.

Teori yang melandasi pembelajaran inkuiri yaitu teori konstruktivisme dan teori penemuan. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual suatu organisme didasarkan pada dua fungsi, yaitu fungsi organisasi dan adaptasi. Teori Piaget tersebut yang mendasari teori konstruktivistik. Menurut teori konstruktivistik, perkembangan intelektual adalah suatu proses dimana anak secara aktif membangun pemahamannya dari hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya.

Teori penemuan oleh Bruner mem-

fokuskan pada pendekatan penemuan. Pembelajaran dengan pendekatan penemuan merupakan suatu komponen penting dalam pendekatan konstruktivisme inovasi pendidikan. Menurut Bruner pembelajaran penemuan menekankan pada pengalaman-pengalaman aktif dan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa menemukan ide-ide mereka sendiri dan memperoleh makna oleh mereka sendiri.

Massialas dan Cox (dalam Sanjaya, 2006:204) menyatakan bahwa karakteristik pengembangan inkuiri sosial terdiri atas tiga yakni: pertama, adanya aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas; kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri; ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis.

Mengacu pada Joyce, Bruce & Weil (1992) bahwa terdapat 6 langkah dalam pembelajaran inkuiri sosial seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.
Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri

Phase	Describe
Phase One	Present and clarify puzzling situation
Phase Two	Develop hypothesis from to explore or solve
Phase Three	Define and clarify hypothesis
Phase Four	Explore hypothesis in terms its assumption, implications, and logical validity.
Phase Five	Gather facts and evidence to support hypothesis
Phase Six	From generalized expression or solution

Langkah-langkah tersebut dalam kajian ilmu-ilmu sosial digambarkan oleh Wahab (2007:62) yaitu a) Orientasi terhadap masalah, b) Menyusun hipotesis, c) Membuat perumusan dan pembatasan masalah, d) Melakukan eksplorasi, e) Mengumpulkan fakta-fakta dan data, dan berdasarkan hasil analisis dirumuskan, f) Generalisasi atau pernyataan terhadap masalah.

Depdiknas (2003) Salah satu kecakapan hidup (*life skill*) yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah keterampilan berpikir. Berpikir merupakan salah satu aktivitas mental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemampuan berpikir kritis setiap individu berbeda antara satu dengan lainnya sehingga perlu dipupuk sejak dini.

Menurut Ennis (1996:4) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Definisi berpikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang membuat keputusan atau pertimbangan. Indikator berpikir Kritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini

Tabel 2
Indikator Berpikir Kritis

Indikator	Sub Indikator
Memfokuskan pertanyaan	Merumuskan pertanyaan
Menganalisis argumen	Mengidentifikasi dan menangani suatu ketidaktepatan
Bertanya dan menjawab pertanyaan	Memberikan penjelasan sederhana
Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi	Menarik kesimpulan
Memutuskan tindakan	Merumuskan solusi alternatif

Setyosari (2013:223) menyatakan bahwa pengembangan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dapat berupa proses, produk, dan rancangan. Tujuan penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Ibrahim (2002:3) Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Buku Ajar Siswa (BAS), evaluasi, serta media pembelajaran. Perangkat pembelajaran dalam penelitian ini berisi silabus, RPP, LKS dan Tes.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau R&D (*Research and Development*) yang menghasilkan perangkat pembelajaran inkuiri. Sejalan dengan hal itu, Sugiyono

(2014:407) menyatakan bahwa R&D (*Research and Development*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

Subjek penelitian yaitu siswa kelas IV SDN Sidowarek II sebanyak 15 anak (Uji Coba I) dan siswa kelas IV SDN Puhjarak II (Uji Coba II) yang terdiri dari kelas IV A sebagai kelas kontrol dan kelas IV B sebagai kelas eksperimen.

Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D dari Thiagarajan, dkk (1974:5) yang terdiri dari 4 tahapan pokok, yakni; 1. *Define* atau tahap pendefinisian, 2. *Design* atau tahap perancangan, 3. *Development* atau tahap pengembangan, 4. *Disseminate* atau tahap penyebaran. Tetapi penelitian ini hanya samapai pada tahap 3D.

Uji coba penelitian ini adalah menggunakan desain eksperimen dengan kelompok kontrol (*Pretest-posttest control group desain*) (Sugiyono, 2013:538). Desain penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1.

<i>Pretest-posttest control group desain</i>				
Eksperiment group	<i>E</i>	<i>O1</i>	<i>X</i>	<i>O2</i>
Control group	<i>C</i>	<i>O3</i>		<i>O4</i>

Penelitian ini menggunakan instrumen yang terdiri dari: (1) Lembar validasi; (2) Lembar pengamatan; (3) Tes. Lembar validasi digunakan untuk mengukur validitas perangkat pembelajaran inkuiri yang terdiri dari RPP, LKS serta tes hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis. Lembar observasi digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran serta aktivitas siswa selama

proses pembelajaran. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan rumus statistik dan teknik analisis kualitatif dengan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan diuraikan berdasarkan proses pengembangan perangkat pembelajaran inkuiri. Penguraian berdasarkan proses pengembangan tersebut terdiri dari: 1) tahap pendefinisian, 2) tahap perancangan, 3) tahap pengembangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui alur perkembangan produk dari tahap awal (pendefinisian) sampai tahap akhir (penyebaran).

Dalam tahap pendefinisian telah dilakukan analisis kurikulum. Materi yang dikembangkan dalam pembelajaran inkuiri disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku yaitu KTSP. Kurikulum yang sesuai dipilih dan dikelompokkan secara terpadu. Hasil pengelompokan kurikulum yang terdiri dari SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar). Kemudian setelah selesai dikelompokkan selanjutnya dibuat tujuan pembelajaran dan indikatornya.

Dalam tahap perancangan dibuat dengan mengumpulkan berbagai materi, ilustrasi dan tata letak yang menarik. Setelah itu ditulis sesuai kebutuhan berdasarkan SK dan KD yang telah dikelompokkan tadi. Kemudian didesain dengan desain yang menarik sesuai kebutuhan.

Setelah perangkat pembelajaran

inkuiri jadi, tahap selanjutnya adalah memvalidasi ke para pakar. Hasil validasi perangkat pembelajaran. Hasil validasi RPP memperoleh skor total rata-rata sebesar 4.43 dengan kategori sangat valid, hasil validasi LKS sebesar 4.29, dan hasil validasi tes sebesar 4.2 sehingga diperoleh hasil validasi perangkat pembelajaran secara keseluruhan sebesar 4.3 dengan kategori sangat valid dan layak untuk diterapkan.

Tahap selanjutnya, setelah perangkat pembelajaran inkuiri dinyatakan valid oleh validator, Perangkat tersebut diujicobakan secara terbatas atau tahap uji coba I. Uji coba I dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Hasil keterlaksanaan RPP sebesar 88% dan termasuk kategori sangat baik. Hasil analisis aktivitas siswa sebesar 85.98% dan berkategori sangat baik serta hasil analisis tes sebesar 80 dan sudah mencapai ketuntasan minimal yaitu ≥ 75 sehingga dapat dikatakan mengalami peningkatan.

Setelah itu dilakukan uji coba II dengan desain penelitian yang telah dipilih, yakni *Pretest-posttest control group desain* dengan 1 kelas sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas lagi sebagai kelas kontrol. Dalam uji coba II ini, pembelajaran dilakukan sebanyak 5 kali dengan dilakukan pretes dan postes pada setiap pembelajarannya. Kemudian dari seluruh tes tersebut diambil rata-ratanya dan dihitung menggunakan teknik analisis data sesuai pada bab 3. Untuk membantu analisis data, peneliti menggunakan SPSS 19 karena cara penggunaannya dan hasil dari analisis data lebih cepat, mudah dan praktis. SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) adalah program komputer yang digunakan untuk analisis data statistik.

Berdasarkan hasil analisis keter-

laksanaan RPP pada kelas eksperimen sebesar 88.5% dan termasuk kategori sangat baik. Hasil analisis aktivitas siswa pada kelas eksperimen sebesar 87.97% dan berkategori sangat baik. Hasil analisis pada kelas eksperimen diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada saat pretes adalah 47. Sedangkan hasil nilai rata-rata pada saat postes adalah 80.16. Hasil tes siswa pada saat pretes tidak mengalami peningkatan karena belum mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu ≥ 75 sedangkan pada postes terjadi peningkatan karena nilai tes sudah berada di atas nilai ketuntasan minimal.

Sedangkan hasil tes pada kelas kontrol diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada saat pretes adalah 54. Sedangkan hasil nilai rata-rata pada saat postes adalah 74. Hasil tes siswa pada saat pretes dan postes tidak terjadi peningkatan karena belum mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu ≥ 75 .

Tahap selanjutnya dilakukan uji t pada data pretes dan postes, baik kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Untuk lebih terperinci hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		T	Df.	Sig 2 Tailed	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
hasil pretes	Equal variances assumed	.168	58	.098	-7.000	4.166

Berdasarkan hasil analisis dan aturan uji t, diperoleh signifikansi 0,098 lebih besar

daripada alpha 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa di antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang signifikan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Syaratnya jika t hitung bernilai positif atau t hitung $>$ t tabel maka ada perbedaan. Sebaliknya, jika t hitung bernilai negatif atau t hitung $<$ t tabel maka tidak ada perbedaan (Sundayana, 2015:146). Oleh karena itu, hasil t hitung pada data pretes tersebut baik kelas eksperimen ataupun kelas kontrol bernilai negatif dan hasil t sebesar $-0,299 <$ t tabel sebesar 2,064 maka dapat dinyatakan bahwa data pretes tidak ada perbedaan.

Tabel 3.
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		T	Df	Sig 2 Tailed	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
hasil postes	Equal variances assumed	2.207	58	.031	6.167	2.795

Berdasarkan hasil analisis dan aturan uji t, diperoleh signifikansi 0.031 kurang dari alpha 0.05, maka hipotesis terbukti, ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang signifikan. Tabel 3 juga menunjukkan adanya perbedaan nilai *posttest* pada kelas eksperimen yang menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah yaitu nilai

posttest pada kelas eksperimen sebesar 80.16 sedangkan nilai *posttest* pada kelas kontrol sebesar 74. Maka dapat disimpulkan dari hasil uji T dan nilai *posttest* kedua kelas tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa dengan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang menggunakan metode ceramah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penelitian dilakukan pada uji coba I dan uji coba II dengan 5 kali pertemuan yang terdiri dari prertemuan 1 pemberian tes (*pretest*), pertemuan 2,3, dan 4 dilakukan pembelajaran inkuiri serta pertemuan 5 pemberian tes (*posttest*). Uji coba I dilakukan pada 15 siswa kelas IV SDN Sidowarek II. Uji coba I dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

Uji coba II dilakukan untuk mengetahui konsistensi perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba II telah dilakukan kepada 60 siswa yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu 30 siswa dikelompokkan dalam kelas kontrol dan 30 siswa lainnya dikelompokkan sebagai kelas eksperimen. Pada awal pertemuan dilakukan *pretest* untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kritis siswa. Dari hasil *pretest* tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata siswa tidak berbeda jauh dimana kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 54 dan kelas eksperimen sebesar 47. Selain itu dalam uji T juga diketahui bahwa taraf signifikansi *pretest* sebesar 0,098 yang artinya 0,098 lebih besar daripada alpha 0.05 sehingga diartikan bahwa tidak

ada perbedaan signifikan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah.

Pada *posttest* diperoleh rata-rata nilai yang berbeda. Hal ini terlihat pada perolehan nilai *posttest* dan hasil uji T terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai *posttest* pada kelas eksperimen sebesar 80.16 yang berarti mengalami peningkatan karena telah mencapai ketuntasan di atas KKM yaitu ≥ 75 sedangkan nilai *posttest* pada kelas kontrol sebesar 74 yang berarti tidak terjadi peningkatan karena belum mencapai ketuntasan di atas KKM yaitu ≥ 75 . Selain itu uji T pada *posttest* kedua kelas menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0.031 kurang dari alpha 0.05 sehingga diartikan bahwa ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah.

Hasil tersebut memiliki arti bahwa pemberian perlakuan terhadap kelas eksperimen dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa jika dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Artinya, hipotesis yang berbunyi “ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan dengan metode ceramah” diterima. Simpulan akhir dari penelitian ini yaitu pengembangan perangkat pembelajaran inkuiri pada kelas IV SD materi masalah

sosial di daerah sekitar efektif untuk meningkatkan kemam-puan berpikir kritis siswa.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan pada materi masalah sosial di daerahnya. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV menunjukkan bahwa komponen RPP yang memuat kegiatan dengan pembelajaran inkuiri sudah terpenuhi dengan baik yang meliputi orientasi terhadap masalah, menyusun hipotesis, membuat perumusan dan pembatasan masalah, eksplorasi, mengumpulkan data dan menganalisis data serta membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil validasi RPP dapat disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan memperoleh rata-rata validasi sebesar 4.43 dengan kategori sangat valid dan layak digunakan.

Sedangkan rancangan LKS memuat beberapa instruksi sesuai dengan langkah pembelajaran inkuiri dan masalah sosial di daerah sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Glend (2004) yang menyatakan bahwa melalui inkuiri siswa dapat memanfaatkan berbagai isu/wacana publik yang sedang berkembang, belajar mengambil keputusan, dan memfasilitasi siswa untuk terlibat sebagai warga negara untuk menyelidiki dunia sosial mereka dengan menggunakan cara berpikir ilmiah untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah. Rancangan LKS memperoleh skor rata-rata validasi sebesar 4.29 dengan kategori sangat valid.

Gokhale (1995) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Learning*

Enhances Critical Thinking” menyatakan bahwa berpikir kritis dapat dilatih dengan memberikan latihan soal-soal. Tes disusun dalam bentuk soal uraian sebanyak 5 butir soal dimana setiap soal mewakili indikator berpikir kritis yaitu merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi dan menangani suatu ketidaktepatan, memberikan penjelasan sederhana, menarik kesimpulan, dan merumuskan solusi alternatif dengan skor rata-rata adalah 4.2 termasuk kategori sangat valid.

Berdasarkan tabel 4.6 pada Bab IV dapat diperoleh data skor rata-rata perangkat pembelajaran yaitu 4,3 dengan kategori sangat valid sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran dalam penelitian ini layak untuk diterapkan.

Uji coba I dilaksanakan di SDN Sidowarek II pada kelas IV yang berjumlah 15 siswa. Pada saat proses pembelajaran, siswa bekerja secara mandiri maupun berdiskusi secara kelompok. Siswa aktif mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, siswa juga berusaha berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Sesekali siswa menanyakan hal yang tidak mereka pahami.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh dua pengamat, keterlaksanaan RPP memperoleh persentase sebesar 88% termasuk kategori sangat baik serta semua kegiatan yang tercantum dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran inkuiri memperoleh persentase sebesar 85.98% dan termasuk kategori sangat baik. Nilai *pretest* sebesar 60.33 dan belum mencapai ketuntasan yaitu ≥ 75 dan

nilai *posttest* sebesar 80 dan mencapai ketuntasan minimal yaitu ≥ 75 sehingga mengalami peningkatan maka perangkat pembelajaran dikatakan efektif.

Setelah mengetahui perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid dan efektif berada di atas batas minimum, dilanjutkan menguji instrumen tes berpikir kritis dengan uji reliabilitas dan uji sensitivitas butir soal. Uji realibilitas memiliki koefisien realibilitas $r_{ii} = 0,891$ dikategorikan memiliki derajat realibilitas sangat tinggi sedangkan uji sensitivitas butir soal di atas menunjukkan bahwa perolehan sensitivitas butir soal berada pada rentangan $0,33 - 0,46$ yang berarti $S \geq 0,30$ memiliki arti butir soal tersebut sensitif atau peka terhadap efek-efek pembelajaran.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran IPS materi masalah sosial dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV Sekolah Dasar. Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian yang berjudul *Design of Social Learning Environment as Inquiry-Based on Cloud Technology for Enhancing the Critical Thinking Skill and Collaborative Learning* yang dilakukan oleh Meepian (2013) menyimpulkan pembelajaran yang baik untuk mempelajari pembelajaran sosial adalah berbasis inkuiri dan pembelajaran kolaboratif bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi (2013) yang berjudul *Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar* menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa terjadi peningkatan dengan

diterapkannya pembelajaran inkuiri.

Implementasi perangkat pembelajaran pada uji coba II dilakukan untuk mengetahui konsistensi perangkat pembelajaran inkuiri dalam kelas yang lebih luas yaitu pada kelas eksperimen dan kontrol.

Setelah data terkumpul (hasil *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen dan kelas kontrol) diperlukan adanya analisa data. Sebelum dianalisis diadakan uji persyaratan untuk mengetahui apakah data tersebut dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak bias dengan menggunakan analisis *t-test*. sehingga diharapkan adanya perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Dari hasil *pretest* kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengujian normalitas data dengan uji statistik normalitas *Kolmogorov Smirnov* dengan bantuan software SPSS 17.0. Berdasarkan data yang diperoleh dari perhitungan hasil uji *Kolmogorof-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa data rata-rata berdistribusi normal karena memiliki sign 0.656 lebih besar dari nilai alpha (0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Setelah kedua data penelitian tersebut dinyatakan berdistribusi normal, selanjutnya dicari nilai homogenitas dengan menggunakan bantuan Uji Homogeneity of *Variance test* pada *One-way Anova* melalui SPSS 17.0. Berdasarkan hasil uji homogenitas memiliki sign 0.357 lebih besar dari nilai alpha (0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbukti homogen.

Apabila data *pretest* telah terbukti berdistribusi normal dan homogen maka dapat dilakukan uji t test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berpikir

kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah. Hasil uji t test menunjukkan taraf signifikansi 0,098 lebih besar daripada alpha 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa di antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang signifikan.

Setelah itu mulai dilakukan penelitian pada kedua kelas yaitu menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan nilai *pretest* yang diperoleh kelas IVA sebesar 54 dan kelas IVB sebesar 47. Nilai yang lebih rendah dijadikan kelas eksperimen maka ditentukan kelas IVA (kelas kontrol) dan IVB (kelas eksperimen) SDN Puhjarak I. Kemudian pada kelas eksperimen diberikan treatment menggunakan pembelajaran inkuiri dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Setelah dilakukan proses pembelajaran, kedua kelas diberikan *posttest* dengan materi yang sama untuk melihat hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis dari masing-masing kelas.

Berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa rata-rata nilai *posttest* kelas eksperimen 80.16 yang artinya telah mencapai nilai ketuntasan ≥ 75 dan terjadi peningkatan. Sedangkan pada kelas kontrol nilai *posttest* memiliki rata-rata 74 yang artinya belum mencapai nilai ketuntasan ≥ 75 .

Sebelum data dianalisis dengan uji t-Test, data hasil belajar siswa diadakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai prasyarat melakukan uji t test. Hasil uji normalitas diperoleh sign 0.215 lebih besar

dari nilai alpha (0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas diperoleh sign 0.324 lebih besar dari nilai alpha (0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbukti homogen.

Hasil analisis t-tes menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,031 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah. Hasil kesimpulan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2011) dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS dengan Berorientasi Strategi Inkuiri menyimpulkan bahwa aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran yang berorientasi strategi inkuiri dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, dapat merangsang siswa dalam berpikir kritis, kreatif dan bekerja sama serta hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah.

KESIMPULAN

Simpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan perangkat pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPS materi masalah sosial kelas IV Sekolah Dasar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil validasi dari validator skor rata-rata RPP sebesar 4.43, LKS sebesar 4.29, dan tes

sebesar 4.2 sehingga diperoleh skor rata-rata perangkat pembelajaran yaitu 4,3 sehingga perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat valid dan layak untuk digunakan, 2) Berdasarkan analisis data yang meliputi keterlaksanaan RPP memperoleh persentase rata-rata 88.5% termasuk kategori sangat baik serta semua kegiatan yang tercantum dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan, aktivitas siswa selama proses pembelajaran berkategori sangat baik dengan rata-rata 87.97%, nilai tes hasil belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis memperoleh nilai sebesar 80.16 yang berarti mengalami peningkatan karena telah mencapai ketuntasan di atas KKM yaitu ≥ 75 . Maka perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif, 3) Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diajarkan menggunakan perangkat pembelajaran inkuiri dengan kelompok siswa yang diajarkan menggunakan metode ceramah dengan taraf signifikansi sebesar 0.031 kurang dari 0.05

Berdasarkan skor rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 80.16 dan kelas kontrol 74. Dengan demikian dapat dinyatakan pembelajaran di kelas eksperimen lebih mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa daripada di kelas kontrol.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran inkuiri, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1) Guru seyogyanya terampil menggunakan pembelajaran inkuiri pada materi atau kelas lain karena telah mampu meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa, 2) Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pembelajaran lain seperti PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) yang diduga bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa

DAFTAR PUSTAKA

- Brickman. 2014. *Inquiry Based Learning Teaching and Learning, Enquiry based learning: Perspectives on practice Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational* Vol. 5.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kurikulum 2004. Jakarta: Depdiknas.
- Dwi, Rahmanto. 2013. *Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Surabaya: Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unesa Vol 1, No. 2.
- Ennis, R.H. 1996. *Critical Thinking*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Glend D. Mc Lary. 2004. *Social Studies and Science Inquiry for Elementary School*. Lesley University Journal.
- Gokhale. 1995. *Collaborative Learning Enhances Critical Thinking*. Journal of Development Education 93, 145-147.
- Gunansyah, Ganes. 2015. *Pendidikan IPS*. Surabaya: Unesa University Press.
- Hasan S. Hamid. 2002. *Pendidikan IPS dan Ilmu Sosial di Masa Mendatang*. JPIS. No. 19. Bandung.

- Hasrudin. 2004. *Penggunaan Pertanyaan Dalam Tatanan Pembelajaran PBL Untuk Meningkatkan Penalaran dan Hasil Belajar Biologi Sisw SMPN Kota Malang*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ibrahim, M. 2002. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat SLTP Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Joyce, Bruce and Weil Marsha. 1992. *Models of Teaching. Fourth Edition*. Massachusetts: Allyn and Bacon a Division of Simon and Schuster Inc.
- Kemedikbud. 2013. *Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meepian. 2013. *Design of Social Learning Environment as Inquiry-Based on Clonal Technology for Enhancing the Critical Thinking Skill and Collaborative Learning*. Journal of Social Learning 142, 132-135.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Siradjuddin dan Suhanadji. 2012. *Pendidikan IPS*. Surabaya: Unesa University Press.
- Thiagarajan, S., et al. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Expectional Children*. Minneapolis, Minnesota: Leadership Training Institute/Special Education, University of Minnesota.
- Trianto. 2011. *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Piaget. 1977. *The Development of Thought, Equilibrium Of Cognitive, Structures*. New York: The Viking Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
- Wahab, Abdul. 2007. *Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

PEMBERDAYAAN DAN TANTANGAN MONETESASI BERBASIS POTENSI LOKAL DESA WISATA KARANGASEM BANTUL

Ghifari Yuristiadhi

Prodi Kepariwisataan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2016

Dipublikasikan Desember 2016

Keywords :

Karangasem, empowerment, tourist villages, monetisasi, local potential

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengalaman Program Studi Diploma Kepariwisataan UGM dalam mendampingi masyarakat Dusun Karangasem, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dalam merintis desa wisata sejak tahun 2014. Sebagian besar (95%) masyarakat Dusun Karangasem sejak puluhan tahun secara turun-menurun telah menjadi pengrajin bambu, dengan produk yang awalnya hanya nampan dan tempat nasi kemudian berkembang menjadi aneka perabot dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Melihat potensi lokal tersebut, Program Studi Diploma Kepariwisataan UGM berpikir untuk mendorong masyarakat untuk mengembangkan kepariwisataan di dusun tersebut. Terlebih selain potensi budaya yang dimiliki, dusun ini juga memiliki potensi wisata alam berupa pemandangan bentang alam, aliran sungai dan hutan pinus. Berjalannya lancarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dua tahun ini disebabkan karakter masyarakat yang ingin maju dan tidak *money oriented*. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan kepariwisataan yang memang *profit-oriented* mau tidak mau akan mendorong perubahan karakter masyarakat. Paper ini ingin melihat lebih jauh bagaimana strategi masyarakat Karangasem berhadapan dengan monetisasi dan memetakan strategi selanjutnya yang dipersiapkan UGM untuk terus mendampingi masyarakat Karangasem dengan karakter yang barangkali berubah dalam membangun desa wisata di dusunnya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian diskriptif ini adalah partisipatoris dan wawancara sedangkan artikel ini disajikan dengan deskriptif analitis.

Abstract

This article discusses the experience UGM Tourism Diploma Course in assisting the people of Karangasem Hamlet, Village Muntuk, Dlingo subdistrict, Bantul, the pioneer of rural tourism since 2014. The vast majority (95%) Karangasem Dusun community for decades is hereditary has become a bamboo craftsman, with a product that initially only the tray and place the rice and then developed into a variety of furniture and other household needs. Seeing the local potential, Tourism Diploma Program UGM thought to encourage communities to develop tourism in the village. Moreover, in addition to the potential of culture held, this village also has the potential of nature tourism in the form of a view of the landscape, streams and pine forests. The smooth passage of the two-year community development activities is due to the character of the people who want to move forward and not money oriented. But over time, the tourism activities that are profit-oriented will inevitably push changes the character of the community.

This paper would like to see further how community strategies to deal with monetisasi Karangasem and map out strategies UGM further prepared to continue to assist the people of Karangasem with characters that might change in building a tourist village in the hamlet. The method used to collect data in this descriptive study is participatory and interviews while this article is presented with descriptive analytical.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
ghifariyuristiadhi@gmail.com

PENDAHULUAN

Kecamatan Dlingo terletak di sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul. Terbangun di atas wilayah seluas 3.787,803 hektar, kecamatan ini terdiri dari enam desa: Terong, Dlingo, Temuwuh, Muntuk, Mangunan dan Jatimulyo. Kecamatan Dlingo berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Patuk, Gunungkidul; sebelah timur Kecamatan Playen, Gunungkidul; sebelah selatan Kecamatan Playen, Gunungkidul; dan sebelah barat kecamatan Imogiri dan Plered, Bantul (www.bantulkab.go.id).

Secara geografis, kecamatan Dlingo berada di dataran rendah. Pusat kecamatan Dlingo berada pada ketinggian 320 meter dpl. Jarak antara pusat kecamatan Dlingo dan pusat Kabupaten Bantul sekitar 23 kilometer. Secara umum, kecamatan Dlingo beriklim seperti dataran rendah di wilayah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi di wilayah ini adalah 39 derajat Celcius dan terendah 24 derajat Celcius. Bentangan wilayah Kecamatan Dlingo 0% berupa daerah yang datar sampai berombak, 100% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung (www.bantulkab.go.id).

Kecamatan Dlingo dihuni oleh 8.894 KK dengan total penduduk 35.514 orang. Penduduk laki-laki sebanyak 17.718 orang dan perempuan 18.796 orang. Tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 650 jiwa/km². Masyarakat Kecamatan Dlingo sebagian besar berprofesi sebagai petani. Data monografi kecamatan menunjukkan bahwa 20,88% atau 7.625 penduduk bekerja di sektor pertanian (www.bantulkab.go.id).

Meskipun topografi yang didominasi lahan berombak hingga berbukit, ternyata sawah banyak dijumpai di kecamatan ini. 14% wilayah Dlingo adalah persawahan, 25% lahan lainnya merupakan lahan non-pertanian dan 61% tanah bukan sawah yang digunakan pemukiman. Masyarakat yang menjadi petani di desa ini sebagian besar di sawah selain itu ada juga yang berkebun. Selain itu ada juga yang mengusahakan usaha non-*farm* seperti kerajinan bambu (di Muntuk) dan meubel serta daun pintu (di Temuwuh). Sisanya bekerja dengan profesi guru, pegawai negeri, karyawan ataupun pedagang.

Desa Muntuk merupakan bagian dari Kecamatan Dlingo. Desa ini berada di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Imogiri. Topografi yang dimiliki desa ini tidak berbeda dengan topografi

mayoritas di wilayah Kecamatan Dlingo yakni perbukitan dan tanah yang gersang. Namun, satu hal yang menarik dari Desa Muntuk, khususnya Dusun Karangasem dan Tangkil adalah tumbuhnya kerajinan bambu yang menjadi penyokong utama kehidupan masyarakat di dusun tersebut. Khususnya Dusun Karangasem yang kemudian dipilih menjadi lokasi pengabdian masyarakat Prodi Diploma Kepariwisata UGM, hampir 95% masyarakatnya menggantungkan ekonominya dari kerajinan bambu ini.

Merujuk Koentjaraningrat (2002), dalam konsepsi tujuh unsur kebudayaan dapat dikatakan bahwa bambu menjadi bagian dari sistem pencaharian masyarakat Dusun Karangasem. Teknik menganyam bambu yang terwariskan dari generasi ke generasi, yang tentunya disertai dengan pengembangan, menjadi kearifan lokal yang berharga. Dalam perspektif Prodi Diploma Kepariwisata UGM kearifan lokal ini sayang jika hanya berhenti pada pembuatan kerajinan bambu secara turun menurun. Mengapa tidak potensi kearifan lokal ini dikembangkan sebagai sebuah atraksi wisata yang bisa disinergikan dengan potensi alam lain yang dimiliki dusun ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memilih metode pengumpulan data dengan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Menurut Sujana dan Ibrahim (1989), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini memusatkan

perhatian pada pemecahan masalah-masalah aktual kepariwisataan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Metode observasi partisipatif adalah metode observasi yang dilakukan dengan mengamati perilaku apa dan siapa untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Djaelani, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Karangasem terletak sekitar 8 kilometer di sebelah selatan pusat kecamatan Dlingo ini terdiri dari 10 RT. Dusun ini berbatasan dengan dusun Seropan I di sebelah selatan, Tangkil di sebelah timur dan selatan dan Ngliseng di sebelah utara. Luas keseluruhan Dusun Karangasem adalah 121,2280 ha. Luas tersebut terdiri dari pekarangan 43,5685 ha, sawah 11,8090 ha, tegalan 46,3005 ha, hutan 19.1500 ha dan lain-lain 0,4000 ha. Di Dusun Karangasem terdapat beberapa sarana prasarana umum, yakni 3 bangunan masjid, 4 bangunan mushalla, 1 bangunan TK, 2 unit kegiatan PAUD, 2 unit kegiatan Posyandu, 11 bangunan Poskamling dan satu lapangan bola volley. Dusun Karangasem terdiri dari 337 KK dan 975 jiwa (491 laki-laki dan 485 perempuan). 98% dari masyarakat Dusun ini bekerja sebagai pengrajin bambu. 2% lainnya sebagai guru, pegawai, dan petani (Profil Dusun Karangasem, 2015).

1. Karangasem sebelum Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pada saat Prodi Diploma Kepariwisata Sekolah Vokasi UGM merintis program pengabdian masyarakat di Dusun Karangasem, secara umum kondisi pariwisata di Kecamatan Dlingo belum

terlalu berkembang seperti saat ini. Hari ini jika menyebut kata Dlingo sangat identik dengan hutan pinus dan Puncak Becici. Data dari kecamatan ini menyebutkan bahwa potensi wisata yang dimiliki antara lain Gua Gajah di Temuwuh, kebun buah di Mangunan (sebagian masuk Desa Muntuk), serta hutan pinus dan sentra kerajinan bambu di Muntuk, namun sayangnya masih sekedar menjadi sentra industri bambu dan belum dikembangkan menjadi desa wisata dengan keunggulan pada industri kerajinan ini. Berdasarkan data Kecamatan Dlingo, Desa Muntuk masih terkategori desa tertinggal yang menjadi target pengentasan kemiskinan.

Industri kerajinan anyaman bambu di Muntuk berkembang di dua dusun, yakni Tangkil dan Karangasem. Kebanyakan anyaman bambu tersebut dijadikan tempat tisu, bakul, tempat pakaian dengan berbagai ukuran. Selain kerajinan bambu, kerajinan kayu juga berkembang, antara lain dibuat ukir-ukiran dan aneka souvenir. Menurut catatan Kecamatan Dlingo, industri anyaman bambu dan kayu di desa ini masih punya beberapa kendala, antara lain: 1) desain yang monoton, 2) pemasaran dikuasai tengkulak, 3) belum ada web/email bagi kelompok pengrajin, 4) pemanfaatan limbah kayu banyak untuk bahan bakar, dan 5) keterbatasan bahan baku.

2. Program Pengabdian Masyarakat Diploma Kepariwisata Sekolah Vokasi UGM

Melihat potensi dari Dusun Karangasem, pada tahun 2014 dan 2015 diselenggarakan program pengabdian masyarakat. Di tahun pertama,

diselenggarakan program pengabdian masyarakat pada tahun 2014. Sedangkan di tahun kedua diselenggarakan pada tahun 2015. Metode program pengabdian dilaksanakan dengan tiga metode, sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah
Materi disampaikan mencakup tema-tema berikut: potensi yang belum tergali di Desa Muntuk (Muntuk menuju Desa Wisata), apa dan bagaimana pengelolaan homestay berbasis masyarakat, dan merancang wisata edukasi kerajinan di Muntuk. Hasilnya bagaimana dari kajian keilmuan pariwisata...
- b. Metode *Focus Group Discussion*
Focus Group Discussion diselenggarakan dalam rangka menggali ide dan wacana yang ada di dalam masyarakat yang berminat pada pengembangan wisata di desa Muntuk.
- c. Metode Excursion
Ekskursi (*excursion*) atau kunjungan singkat diselenggarakan di akhir program sosialisasi. Setelah sebelumnya masyarakat sudah mendapatkan materi tentang potensi yang tersembunyi dari Desa Muntuk, pengembangan homestay, dan perancangan wisata edukasi kerajinan anyaman bambu, masyarakat dampingan diajak untuk mengunjungi desa-desa atau kawasan yang telah mengembangkan diri menjadi desa wisata kerajinan yang telah banyak dikunjungi para pelajar maupun wisatawan untuk berlatih membuat kerajinan bambu. Desa-desa atau kawasan yang akan dikunjungi antara

lain Brayut, Malangan dan Kreet. Ketiga desa wisata tersebut dipilih berdasarkan kesamaan karakteristik dan potensi yang bisa menjadi inspirasi.

3. Dampak Sosial-Ekonomi Pengabdian Masyarakat di Karangasem

a. Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Desa Wisata

Usai dilaksanakan program pengabdian masyarakat tahun pertama (2014) perubahan yang tampak dari rintisan Desa Wisata Karangasem ini adalah keterbukaan berpikir masyarakat dan kesadaran tentang potensi budaya yang dimiliki oleh dusunnya yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Kesadaran itu berbuah dengan disepakatinya terbentuknya Kelompok Sadar Wisata.

Di tahun pertama pengabdian masyarakat, terbentuknya elite baru di Dusun Karangasem ini belum terlalu mencolok bagi masyarakat lain. Namun setelah diselenggarakannya pengabdian masyarakat yang kedua, sentimen dan kecemburuan mulai tampak dari sebagian masyarakat dusun.

b. Hadirnya Wisatawan ke Karangasem

Jika dipetakan, potensi yang dimiliki rintisan desa wisata Karangasem terdiri dari potensi budaya dan alam. Potensi budaya terdiri dari aktivitas masyarakat menganyam bambu di depan rumah masing-masing dan terwariskan dari periode ke periode, selain itu juga adanya kelompok-kelompok seni antara lain kelompok jatilan “Sido Rukun”, kethoprak “Cahyo Mudho Budoyo”,

karawitan, qasidah, dangdut “Asta Nada”, shalawat, hadroh dan klub olahraga voli. Sedangkan potensi alam terdiri dari *Watu Lumpang* yakni batu besar yang terletak di bagian barat dusun. Batu ini menghadap ke pemandangan Dusun Karangasem bagian bawah. Menurut tradisi lisan, di atas batu inilah anak-anak setelah khitan berjemur dalam rangka mempercepat keringnya luka. Selain itu ada juga *Watu Kromo* dan *Watu Kodok* yang terletak di bagian selatan dusun. Nama tersebut dinisbatkan kepada nama pemilik lahan tersebut yakni Mbah Kromo dan bentuk batu yang menyerupai katak. Dari batu ini juga terlihat bentang alam Karangasem yang indah. Di bagian timur dusun terdapat air terjun yang tingginya sekitar 7 meter. Selain itu, dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan hutan pinus, kungkungan ke hutan pinus juga bisa dirangkai sebagai paket wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Desa Wisata.

Hadirnya rintisan desa wisata di Dusun Karangasem dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Desa Wisata mulai membawa perubahan bagi Dusun Karangasem dengan hadirnya para wisatawan. Sesuai dengan yang dikonsepsikan dalam pengembangan Desa Wisata Karangasem, selain model pariwisata edukasi kerajinan bambu, juga dikembangkan pariwisata desa yang menyediakan ruang bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaannya.

c. Resistensi dan Strategi Penyelesaiannya

Hadirnya aktivitas pariwisata di Dusun Karangasem menjadi angin segar bagi

masyarakat. Selain menjadikan dusun mereka dikenal masyarakat yang lebih luas, kehadiran pariwisata akan dapat lebih mempopulerkan kerajinan bambu yang telah turun menurun menjadi kearifan lokal di dusun mereka. Tanpa disadari oleh kelompok sadar wisata ataupun pengelola desa wisata, hadirnya aktivitas pariwisata di Karangasem ternyata meninggalkan sebagian masyarakat lain yang merasa tidak dilibatkan.

Dalam proses perintisan desa wisata Karangasem yang bermula dari program pengabdian masyarakat, sejak awal yang terlibat adalah masyarakat yang tinggal tidak jauh dari rumah Pak Dukuh Karangasem. Alasannya saat itu sederhana, yakni agar mudah dikumpulkan dan berkomunikasi. Namun setelah organisasi pengelola kepariwisataan di Karangasem terbentuk ternyata baru disadari bahwa pemangku kepentingan di dusun belum melibatkan seluruh masyarakat di dusun ini, atau setidaknya representasi berdasarkan sebaran RT. Dari 10 RT yang ada di dusun Karangasem, tidak lebih dari setengah yang terlibat dalam aktivitas perintisan desa wisata di Karangasem.

Resistensi muncul dari masyarakat yang merasa ditinggal. Plang desa wisata Karangasem yang dipasang di bagian depan dusun yang masuk dalam RT 5 dicopot warga. Pun dengan spanduk yang dipasang untuk menyambut wisatawan. Bahkan kemudian sekitar 50 orang datang melakukan unjuk rasa di rumah Pak Dukuh dalam rangka menyampaikan ketidakpuasannya karena merasa ditinggal dan tidak dilibatkan dalam kegiatan kepariwisataan. Sentimen ini hadir seiring yang mereka

bayangkan adalah uang yang mengalir dari aktivitas pariwisata, baik yang langsung berupa tiket masuk, uang makan, juga yang tidak langsung seperti dampak pembelian kerajinan bambu dari *show room* orang-orang yang terlibat dalam Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Desa Wisata (Wawancara dengan Supriyanto dan Karyadi).

Resistensi tersebut perlahan dapat diselesaikan dengan musyawarah warga Dusun Karangasem dan diakomodirnya perwakilan warga dari wilayah RT lain. Kebetulan nama-nama pengurus versi final belum diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul sebagai salah satu persyaratan mengajukan Surat Keputusan penetapan Desa Wisata. Hal itu dapat diterima oleh masyarakat yang merasa tidak puas. Dalam momen *Merti Dusun* atau *Bersih Dusun* yang menjadi acara tahunan Dusun Karangasem yang setiap tahunnya diselenggarakan bersama Tangkil, pada 20 April 2016 lalu diserahkan secara simbolik Surat Keputusan Penetapan Desa Wisata untuk Karangasem kepada Ketua Kelompok Sadar Wisata Karangasem, Supriyanto. Surat Keputusan yang resmi baru akan diserahkan kemudian langsung oleh Bupati Bantul.

KESIMPULAN

Pariwisata yang memiliki dimensi ekonomi tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Di dusun yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, masalah ekonomi tetaplah menjadi isu sensitif masyarakat. Pariwisata jika tidak dikelola dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat akan menjadi pemantik konflik

horizontal di tengah masyarakat. Kehidupan sosial-ekonomi yang awalnya harmonis bisa menjadi *crah* (tidak harmonis) dikarenakan sentiment dikarenakan tidak ada pemerataan sumber ekonomi. Monetesasi sudah menjadi keniscayaan, meski di desa sekalipun. Pengalaman perintisan desa wisata Karangasem, Muntuk, Dlingo, Bantul ini menjadi pelajaran bahwa integrasi masyarakat tidak bisa begitu saja dilupakan ketika membangun desa wisata yang notabene akan menjadi sumber ekonomi baru bagi orang-orang yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif". *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. Vol. XX, No. 1, Maret 2013.

Dusun Karangasem. 2015. "Profil Dusun Karangasem"

Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

bantulkab.go.id.

muntuklestari.wordpress.com